

**DIKOTOMI WILAYAH TIMUR – BARAT  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PERKEMBANGAN  
WILAYAH KABUPATEN AGAM**

**T E S I S**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**BETSY RIVAI SYARIF**  
L4D 002 117



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2 0 0 4**

**DIKOTOMI WILAYAH TIMUR – BARAT  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PERKEMBANGAN  
WILAYAH KABUPATEN AGAM**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

**BETSY RIVAI SYARIF**  
L4D002117

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 17 Juni 2004

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 17 Juni 2004

Pembimbing Pendamping

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

Pembimbing Utama

Ir. Ragil Haryanto, MSP

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, 17 Juni 2004

**BETSY RIVAI SYARIF**  
NIM L4D002117

LPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4185/T/MTPWK/C <sub>1</sub>
Tgl.	5-5-2006

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb,*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Illahi Rabbi atas rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga tesis ini selesai dengan baik. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai jenjang Strata 2 (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana Program Magister Teknik Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang.

Melalui tesis yang berjudul "*Dikotomi Wilayah Barat – Timur dan Ketidakseimbangan Perkembangan Kabupaten Agam,*" penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Kabupaten Agam khususnya dan bagi perkembangan ilmu perencanaan pada umumnya.

Penulis menyadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis mohon maaf atas kekuarangan tersebut.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menunjukkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa H. Rivai Sjarif dan Mama Rosni D, yang telah mengorbankan segalanya.
2. Suami tercinta Firmansyah Lumban Tobing, SH, MM, yang telah mencurahkan segalanya, serta si kecil calon bayiku yang selalu menemani dan menjadi semangat dalam penyelesaian tesis ini.

3. Adik – adik tercinta Ir. Dick Tito, Ir. Reka Akmar, MT, Boy Vy Giska dan Benny Briand yang selalu berdoa, membantu dan memberi semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Ir. Ragil Haryanto, MSP selaku Mentor yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP sebagai Co-Mentor yang juga telah memberikan waktu dan pikiran dalam membimbing penulisan tesis ini.
6. Bapak Dipl. Ing. Benyamin Abdurrahman selaku dosen penguji dalam sidang ujian tesis.
7. Bapak Prihadi Nugraha, ST, MT selaku dosen pembahas.
8. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program S2 MPWK.
9. Para dosen dan staf pengajar di Program Magister Teknik Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Rekan-rekan MPWK Angkatan II yang telah memberikan semangat dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga kebaikan bapak, ibu dan rekan-rekan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin

Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, Juni 2004,

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi .....	10
1.3.1 Tujuan Studi .....	10
1.3.2 Sasaran Studi .....	10
1.3.3 Manfaat Studi .....	11
1.4 Ruang Lingkup Studi .....	11
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial .....	11
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial .....	14
1.5 Kerangka Pemikiran .....	14
1.6 Metode Penelitian .....	18
1.6.1 Pendekatan Penelitian .....	18
1.6.2 Kerangka Analisis .....	19
1.6.3 Teknik Analisis .....	21
1.6.4 Metode Pengumpulan Data .....	25
1.6.4.1 Kebutuhan Data .....	25
1.6.4.2 Metode Pengumpulan Data .....	26
1.6.5 Interpretasi Hasil Penelitian .....	30

1.7	Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH DAN</b>		
	<b>KETIDAKSEIMBANGAN WILAYAH .....</b>	<b>32</b>
2.1	Pengembangan Wilayah .....	32
2.1.1	Konsep-Konsep Pengembangan Wilayah .....	36
2.1.1.1	Pusat-pusat Pertumbuhan .....	36
2.1.1.2	Pengembangan Ekonomi Lokal .....	45
2.1.1.3	Konsep Small Market Town .....	47
2.1.2	Aspek-Aspek Pengembangan Wilayah .....	49
2.2	Konsep Spasial Dalam Lingkup Wilayah .....	51
2.2.1	Pembangunan Ekonomi Berbasis Wilayah .....	52
2.2.2	Pengembangan Wilayah Berbasis Kompetisi .....	55
2.2.3	Pengembangan Ruang Terpadu .....	56
2.3	Dikotomi Dalam Perencanaan .....	57
2.3.1	Pertumbuhan VS Kesejahteraan .....	57
2.3.2	Ketidaksimbangan VS Keseimbangan .....	59
2.3.3	Pemusatan VS Penyebaran .....	61
2.3.4	Keseimbangan Ruang Sebagai Model Alternatif .....	62
2.4	Analisis Kebijakan .....	64
2.5	Rangkuman Kajian Teori .....	68
<b>BAB III TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN KAB. AGAM.....</b>		
3.1	Gambaran Umum Kabupaten Agam .....	71
3.2	Karakteristik Pemanfaatan Ruang .....	75
3.2.1	Luas dan Penggunaan Lahan .....	75
3.2.2	Penyebaran Permukiman .....	75
3.2.3	Jaringan Jalan .....	80
3.3	Perkembangan Sosial Ekonomi .....	82
3.3.1	Kependudukan .....	82
3.3.1.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	82
3.3.1.2	Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	85
3.3.1.3	Sejarah dan Budaya Masyarakat Kabupaten Agam ..	86
3.3.2	Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi .....	95
3.4	Tinjauan Terhadap Perekonomian Daerah .....	97

3.4.1	Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi .....	97
3.4.2	Keuangan Daerah .....	97
3.4.3	Kondisi Perekonomian Kabupaten Agam .....	100
3.4.4	Peranan Sektor-sektor Ekonomi Unggulan .....	101
3.4.5	PDRB dan Pendapatan Regional Perkapita .....	102
3.4.6	Perkembangan Kelompok Sektor PDRB .....	103
3.4.7	Posisi Perekonomian Kabupaten Agam terhadap Sumatera Barat	105
<b>BAB IV ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>		
<b>KABUPATEN AGAM .....</b>		<b>107</b>
4.1	Identifikasi Faktor-faktor Yang Menjadikan Ketidakseimbangan Pengembangan Wilayah Kabupaten Agam .....	107
4.2	Analisis Perbedaan Ketidakseimbangan di Kabupaten Agam .....	109
4.2.1	Analisis Infrastruktur .....	110
4.2.2	Analisis Fisik Alam .....	112
4.2.3	Analisis Ekonomi dan Sosial .....	120
4.2.4	Analisis Sejarah dan Budaya .....	122
4.2.5	Analisis Kelembagaan .....	123
4.3	Analisis Potensi Sumberdaya Kabupaten Agam .....	127
4.4	Analisis Kebijakan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Agam ...	128
4.5	Analisis Ketidakseimbangan Pengembangan di Wilayah Kabupaten Agam .....	128
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>		<b>132</b>
5.1	Kesimpulan .....	132
5.2	Rekomendasi .....	135
DAFTAR PUSTAKA .....		138
LAMPIRAN .....		143
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		190



## DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel I.1	Kebutuhan Data Penelitian .....	27
Tabel II.1	Pendefinisian Wilayah Secara Konsepsional .....	34
Tabel III.1	Jumlah Nagari dan Desa di Kabupaten Agam Menurut Kecamatan Tahun 2002 .....	73
Tabel III.2	Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Agam Menurut Kecamatan Tahun 2002 .....	77
Tabel III.3	Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya Pada Kawasan Lindung dan Budidaya di Kabupaten Agam Tahun 2001 ...	78
Tabel III.4	Panjang Jalan Negara, Propinsi dan Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 2001 .....	81
Tabel III.5	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Agam Tahun 2001 .....	82
Tabel III.6	Luas Wilayah, Rumah Tangga, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Agam Tahun 2001 .....	84
Tabel III.7	Presentase Persebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 1992 - 2001 .....	85
Tabel III.8	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Agam Tahun 2001 .....	86
Tabel III.9	Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Agam Tahun 2001 ...	95
Tabel III.10	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Agam Tahun 2003 .....	96
Tabel III.11	PDRB Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1998 – 2000 .....	98
Tabel III.12	PDRB Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1998 – 2000 .....	99
Tabel III.13	Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Agam Tahun 1998 – 2002	102
Tabel III.14	PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Agam Tahun 1999 – 2002 .....	103
Tabel III.15	Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1999 – 2002 .....	104

Tabel III.16	Posisi Perekonomian Kabupaten Agam Terhadap Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2001 .....	106
Tabel IV.1	Nilai Indeks Aksesibilitas Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Agam Tahun 2003 .....	111
Tabel IV.2	Tingkat Keterpusatan, Daya Hubung, Kelengkapan Fasilitas Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Agam Tahun 2003 ...	121
Tabel IV.3	Perbandingan Jumlah Proyek Fisik dan Dana Proyek di Kabupaten Agam Tahun 2000 - 2003 .....	125
Tabel IV.4	Presentase Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Agam Barat Tahun 2000 - 2003 .....	127
Tabel IV.5	Presentase Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Agam Timur Tahun 2000 - 2003 .....	127
Tabel IV.6	Keterkaitan Antar Faktor-Faktor Penyebab Ketidakseimbangan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Agam .....	129

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Peta Orientasi .....	4
Gambar 1.2 Peta Administrasi.....	15
Gambar 1.3 Peta Perwilayahan.....	16
Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran Studi .....	17
Gambar 1.5 Kerangka Pelaksanaan Penelitian .....	20
Gambar 2.1 Strategi Pembangunan dan Sumber Daya Lokal Yang Diandalkan .....	54
Gambar 2.2 Analisis Kebijakan Yang Berorientasi Pada Masalah ...	65
Gambar 2.3 Hirarki Kebijakan .....	66
Gambar 3.1 Peta Tata Guna Lahan .....	76
Gambar 3.2 Peta Penyebaran Permukiman .....	79
Gambar 3.3 Peta Jaringan Jalan .....	83
Gambar 4.1 Peta Topografi .....	115
Gambar 4.2 Peta Kemiringan .....	116
Gambar 4.3 Peta Hidrologi .....	117
Gambar 4.4 Peta Jenis Tanah .....	118
Gambar 4.5 Peta Penggunaan Lahan Dengan Kesesuaian Tanaman .....	119
Gambar 5.1 Strategi Pengembangan .....	137

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Analisis Aksesibilitas .....	143
Lampiran B	Analisis Wilayah Pengaruh .....	150
Lampiran C	Analisis Ekonomi dan Sosial .....	154
Lampiran D	Analisis Skalogram .....	159
Lampiran E	Analisis Kebijakan .....	162
Lampiran F	Analisis Implementasi Pembangunan .....	177

## ABSTRAK

*Kabupaten Agam yang terbagi menjadi wilayah pengembangan Agam Barat dan Agam Timur merupakan salah satu kabupaten yang paling berpotensi di Propinsi Sumatera Barat, diantaranya pertanian, industri kecil, kerajinan dan keindahan alam yang mendukung kegiatan wisata yang ada di kabupaten ini. Sedangkan dilihat dari peranannya, Kabupaten Agam mempunyai peranan yang cukup penting bagi regional Sumatera Barat, Riau dan Jambi sebagai pemasok utama hasil-hasil pertanian yang menjadi kebutuhan pokok di wilayah tersebut seperti beras dan sayur mayur.*

*Dalam perkembangannya, Agam Timur yang menjadi hinterland langsung Kota Bukittinggi cenderung lebih berkembang dibandingkan Agam Barat. Perbedaan perkembangan wilayah Agam Barat- Agam Timur ini mengakibatkan pembangunan daerah Kabupaten Agam tidak merata. Dikotomi Barat – Timur yang terjadi di wilayah ini, terutama disebabkan oleh perbedaan fisik alam (geografis) dan sejarah budaya dari kedua wilayah ini.*

*Berdasarkan teori-teori dikotomi yang telah ada sebelumnya, dikotomi yang disebabkan oleh perbedaan geografis dan sejarah budaya belum tersentuh oleh teori-teori tersebut. Oleh sebab itu, dikotomi Barat – Timur yang menjadikan ketidakseimbangan perkembangan wilayah di Kabupaten Agam ini merupakan suatu hal yang sangat spesifik dan perlu dijadikan kajian studi lebih lanjut.*

## ABSTRACT

*Kabupaten Agam consists of two parts; Agam Barat developing region and Agam Timur developing region is a most potential region in Sumatera Barat with agriculture, home industries, handicraft and beautiful nature that support tourism activities in this region. Kabupaten Agam has role for regional, it seems that Sumatera Barat, Riau and Jambi as main food producer like rice and vegetables.*

*In development of Kabupaten Agam, Agam Timur as hinterland of Bukittinggi, disposed more development from Agam Barat. Difference of development region (Agam Barat – Agam Timur), resulted regional development in Kabupaten Agam has not spread throughout the region. Causal factor West – East dichotomy in this region is geographical and socio-cultural.*

*Based on the dichotomy theories, West – East dichotomy in Kabupaten Agam has not found in those theories. Because of that, the West – East dichotomy that make imbalance development region form a specific case and needed continuation of this research.*

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan proses desentralisasi pembangunan yang di dalamnya terkandung tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah, maka kemampuan daerah (khususnya pemerintah kabupaten) dalam melaksanakan pembangunan, perlu ditingkatkan dengan berbagai macam strategi. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta tepat sasaran, baik yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya, maupun sumber dana, serta dalam rangka mengintegrasikan pembangunan antar daerah dan antar sektor.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pengembangan kawasan-kawasan potensial dan strategis perlu dilakukan secara intensif, sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja pembangunan, maupun untuk menata lingkungan ke kondisi yang lebih baik. Oleh karenanya, dalam kebijaksanaan pembangunan sekarang ini, pemerintah kabupaten memandang penting untuk melaksanakan pembangunan dengan pendekatan paradigma baru. Dengan kata lain, kebijaksanaan pembangunan harus didasarkan pada komitmen bersama dan bukan hanya sekedar urusan pemerintah semata.

Kabupaten Agam, sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah yang cukup luas di Propinsi Sumatera Barat hendaknya mempunyai strategi pembangunan ke depan yang bisa dijadikan alat untuk menanggulangi situasi yang ada pada saat ini. Berbagai kesenjangan pembangunan yang terjadi selama

ini di wilayah Kabupaten Agam, menjadi persoalan yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan. Keadaan yang telah berlarut-larut sekian lama apabila tidak ditangani sesegera mungkin, akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perkembangan wilayah Kabupaten Agam sendiri.

Agam sebagai sebuah kabupaten, terbagi menjadi Wilayah Pengembangan Agam Barat dan Wilayah Pengembangan Agam Timur. Potensi-potensi sumber daya yang bisa dibanggakan diantaranya pertanian, industri kecil dan kerajinan, keindahan alam, perikanan, perkebunan dan lokasi yang tepat di jalur lintas Regional Jambi, Sumbar, Riau dan Sumut. Agam juga merupakan hinterland langsung dengan kota Bukittinggi (terutama untuk Agam Timur). Dan yang paling penting, hingga saat ini Kabupaten Agam masih menjadi pemasok utama hasil-hasil pertanian terutama kebutuhan beras dan sayur mayur untuk Propinsi Riau (Bappeda Agam, 2003).

Pada awal sejarahnya, Agam merupakan salah satu luhak (daerah) dari Pemerintahan Kerajaan Minang Kabau (Ranah Minang). Ranah Minang ini mempunyai wilayah yang cukup luas mencakup Sumatera Barat, Daerah Limo Koto Kampar (Bangkinang) yang sekarang termasuk Propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) yang sekarang berada di Propinsi Jambi dan sebagian Daerah Tapanuli Selatan (Kota Nopan) yang secara administrasi sekarang ini berada di Propinsi Sumatera Utara. Luhak Agam ini, daerahnya meliputi Daerah Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman sekarang. Menurut Keilstra (1888), dalam masa pemerintahan Belanda, Luhak Agam diubah



statusnya menjadi *Afdeling* Agam yang meliputi *Onder Distrik* Agam Tua, *Onder Distrik* Maninjau, dan *Onder Distrik* Talu.

Pada permulaan kemerdekaan RI tahun 1945, bekas daerah *Afdeling* Agam diubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanaan, yaitu Kewedanaan Agam Tua, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu. Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil di mana Kewedanaan Talu dimasukkan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar Kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan Administrasi Kotamadya Bukittinggi. Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut, dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam (Bappeda Agam, 2003).

Dalam perkembangannya, Agam Timur yang merupakan hinterland langsung dari Kota Bukittinggi cenderung lebih berkembang dibandingkan dengan Agam Barat. Letak Agam Timur yang sangat strategis, yang berada di jalur utama jalan negara yang menghubungkan Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara, menjadikan daerah ini mempunyai aksesibilitas yang sangat tinggi. Adapun rute perjalanan antar propinsi yang ada di wilayah Agam Timur ini yaitu :









- Padang – Bukittinggi – Baso – Payakumbuh – Propinsi Riau
- Padang – Bukittinggi – Palupuh – Pasaman – Propinsi Sumatera Utara

**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

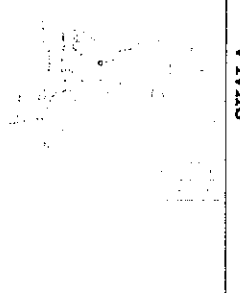
**DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN AGAM**

**PETA ORIENTASI**

**KETERANGAN :**

-  IBU KOTA PROPINSI
-  IBU KOTA KABUPATEN
-  IBUKOTA KECAMATAN
-  BATAS KABUPATEN
-  BATAS KECAMATAN
-  JARINGAN JALAN
-  SUNGAI
-  WILAYAH STUDI

**INSERT**



**SKALA**

SKALA 1 : 2.125.000  
0 21,25 42,50 63,75 Km

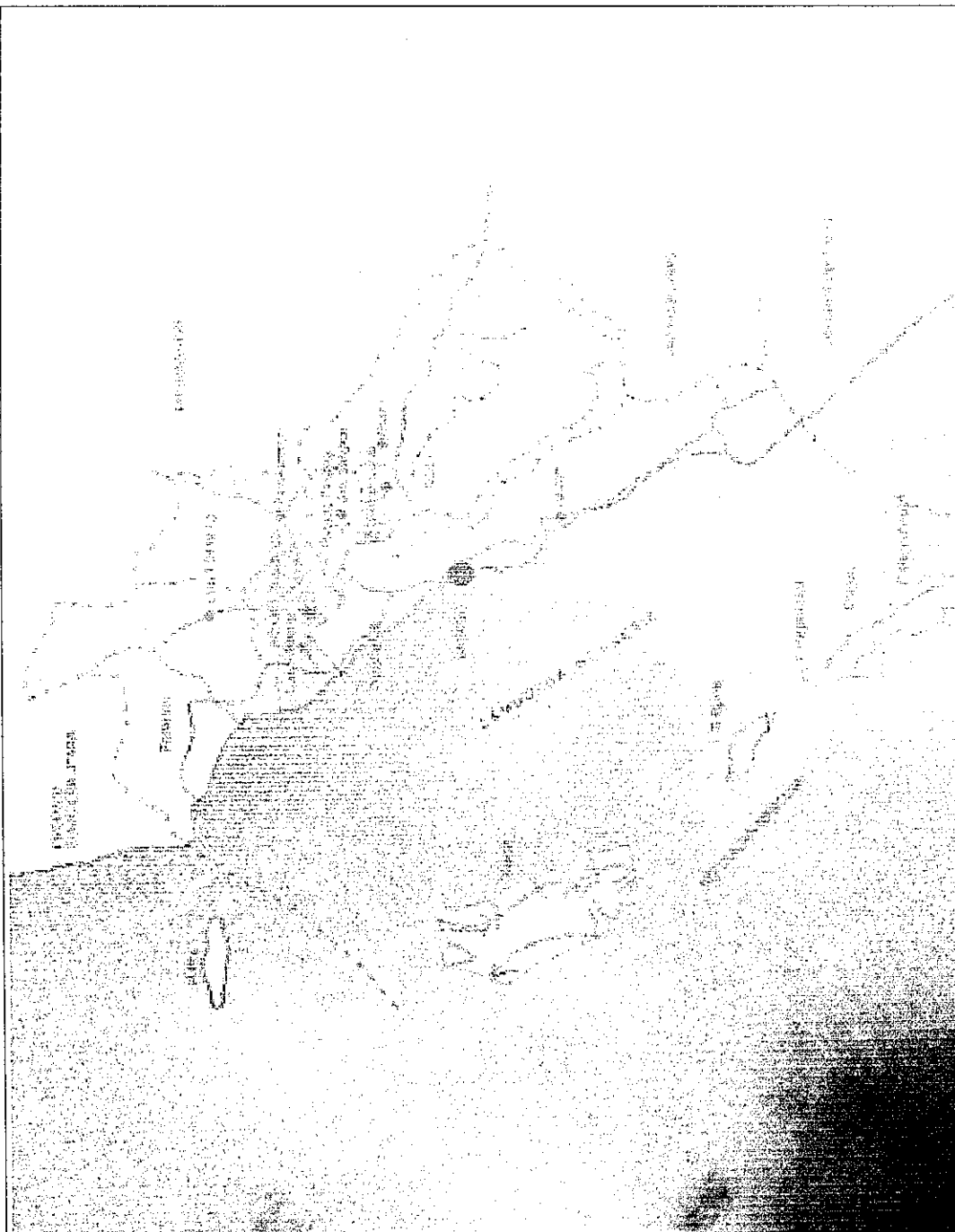


**NOMOR**

Halaman

Gambar

SUMBER :  
BAPPEDA PROPINSI SUMATERA BARAT, 2002



# KABUPATEN AGAM

Gambar 1.1 memperlihatkan peta orientasi Kabupaten Agam untuk daerah-daerah sekitarnya.

Agam Timur juga merupakan daerah dengan lahan pertanian yang sangat potensial. Kecamatan-kecamatan yang berada di Wilayah Agam Timur ini merupakan pertanian yang subur dan terkenal sebagai penghasil beras dan palawija dengan kualitas baik. Hasil pertaniannya rata-rata dijual untuk konsumsi daerah tetangga terutama pasokan sayur-mayur dan beras untuk Propinsi Riau (Dobbin, 1992).

Namun di sisi lain, pada saat ini ada kekhawatiran besar dalam bidang pertanian di Wilayah Agam Timur. Konversi lahan-lahan pertanian terhadap lahan permukiman dan lahan untuk kegiatan perekonomian, terjadi terutama pada kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar Kota Bukittinggi (Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, Kecamatan IV Angkat Candung dan Kecamatan Baso). Perubahan fungsi lahan ini, terlihat sangat signifikan di ruas jalan negara yang menghubungkan Padang – Bukittinggi – Payakumbuh. Di kiri – kanan ruas jalan tersebut yang pada awalnya merupakan lahan pertanian padi dan palawija yang produktif, telah berubah dipadati oleh bangunan-bangunan berupa ruko dan diikuti oleh pengembangan komplek-komplek perumahan di belakangnya.

Menurut Disperindag Kabupaten Agam (2003), potensi lainnya adalah kerajinan sulaman tangan, bordiran dan industri konveksi yang sudah merupakan usaha turun temurun masyarakatnya. Pada umumnya, industri sulaman tangan dan bordiran telah melakukan ekspor ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam dan Hongkong. Untuk industri konveksi umumnya masih

menitikberatkan pada pemenuhan permintaan daerah (Sumbar, Riau, Jambi dan Sumut), walaupun sudah ada yang menjalin kerjasama dengan pihak Singapura dan Malaysia. Usaha kerajinan emas, perak dan pandai besi, juga melengkapi potensi yang dapat dikembangkan di Wilayah Agam Timur. Dan yang tak kalah pentingnya seperti yang dikemukakan oleh PHRI Bukittinggi – Agam (2003), adalah potensi keindahan alam seperti air terjun, telaga, ngalau (gua), ngarai dan panorama alam yang sangat sayang apabila dilewatkan begitu saja.

Di samping itu, Agam Timur merupakan pusat perdagangan dan jasa, terutama semasa ibukota kabupaten ini berada di Kota Bukittinggi yang juga merupakan sebuah kotamadya tersendiri pada saat itu. Keberadaan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam tidak bisa dipisahkan karena keterkaitan sejarah yang sangat erat antara kedua daerah ini. Bukittinggi terkenal dengan julukannya sebagai “*koto rang agam*” atau kotanya orang Agam (Zulqaiyyim, 1996). Orang Agam yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang tinggal dan bermukim di *Onder Distrik* Agam Tua pada zaman Belanda, atau Kewedanaan Agam Tua pada masa awal kemerdekaan.

Dengan kata lain, orang-orang Agam Tua lebih merasa sebagai orang Bukittinggi atau telah merasa menjadi orang Bukittinggi. Namun bila dicermati lebih jauh lagi, di samping kedekatan faktor lokasi yang terlihat dengan jelas, hubungan kekerabatan dan sosial budaya pun membuat masyarakat Agam Timur ini tetap merasa sebagai orang Bukittinggi, bahkan sampai saat sekarang ini.

Apabila kita lihat, Agam Barat sebenarnya juga mempunyai potensi yang tak kalah menariknya dibandingkan dengan Agam Timur. Lokasinya yang

langsung berbatasan dengan Samudera Hindia dan mempunyai sebuah danau yang besar, menjadikan Wilayah Agam Barat mempunyai potensi yang besar pada sektor perikanan terutama perikanan laut dan perikanan jala terapung di Danau Maninjau. Potensi kelautan yang dimiliki oleh wilayah ini juga beragam, mulai dari perikanan, kawasan pesisir pantai dan perkebunan kelapa.

Untuk kawasan pesisir yang dilalui oleh jalur transportasi Padang – Pariaman – Lubuk Basung – Manggopoh – Pasaman – Propinsi Sumatera Utara, terdapat objek-objek wisata alam bahari yang pantas untuk dikembangkan. Selain itu, pertanian dan perkebunan terutama perkebunan kelapa dan kelapa sawit juga tampak mendominasi wilayah ini. Ada juga pertanian dan perkebunan yang berorientasi agroindustri. Akan tetapi, potensi-potensi seperti yang tersebut di atas tidak menyebar rata di setiap kecamatan. Sistem pertanian yang sebahagian besar masih bersifat tradisional dan pemanfaatan lahan yang belum optimal, menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas pertanian.

Infrastruktur yang tersedia di Kabupaten Agam sudah cukup memadai terutama untuk jaringan jalan di Wilayah Agam Timur yang sudah mencapai ke pelosok-pelosok perdesaan. Keadaan ini sangat menguntungkan dari segi aksesibilitas, sehingga memudahkan pengangkutan orang dan barang terutama yang menghubungkan kantong-kantong produksi ke pusat-pusat pemasaran. Dukungan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, semakin memacu berkembangnya Wilayah Agam Timur.

Untuk Wilayah Agam Barat, jaringan jalan masih belum memadai karena kondisi topografi yang berbukit-bukit sehingga menyulitkan pengembangan

prasarana transportasi. Adanya kendala aksesibilitas, menyulitkan interaksi antara Agam Barat dengan Agam Timur.

Masih ada satu hal lagi yang kalau boleh dikatakan agak mencolok dari Agam Barat dan Agam Timur, yaitu sosial – budaya. Perbedaan adat – istiadat antara masyarakat Agam Barat yang lebih mendekati budaya pesisiran Padang Pariaman, dengan masyarakat Agam Timur yang lebih dekat ke Bukittinggi dirasakan juga sebagai salah satu faktor yang memberikan kontribusi perbedaan perkembangan kedua wilayah ini.

Ibukota Kabupaten Agam yang telah dipindahkan dari Bukittinggi (Agam Timur) ke Lubuk Basung (Agam Barat) secara *de facto* pada tanggal 19 Juli 1993 yang dikuatkan dengan PP Nomor 8 Tahun 1998 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Agam, yang bertujuan untuk lebih memacu pertumbuhan Wilayah Agam Barat, masih belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Sarana dan prasarana yang telah disiapkan di Lubuk Basung terutama untuk para pegawai pemerintah daerahnya sendiri, tidak mampu menghalangi arus *commuter* yang besar dari Bukittinggi – Lubuk Basung yang sebagian besar adalah pegawai kantor-kantor pemerintah yang ada di Lubuk Basung. Resiko cukup besar terutama pada rute kelok 44 (empat puluh empat) dan waktu tempuh yang cukup lama (1,5 – 2 jam), tidak mereka hiraukan. Pada umumnya, para penglaju ini berasal dari daerah Agam Timur yang tetap merasa lebih nyaman untuk tinggal dan bermukim di daerah asalnya.

Perbedaan perkembangan wilayah antara Agam Barat dan Agam Timur ini semakin terasa jauh sejak ditetapkannya Agam Timur (terutama Kecamatan IV

Angkat Candung) sebagai Kawasan Agropolitan untuk Kabupaten Agam pada awal tahun 2003. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Agam Timur semakin pesat dengan dibukanya pasar khusus pusat hasil konveksi, industri kecil dan kerajinan yang berlokasi di jalan lintas Bukittinggi – Padang (di Kecamatan IV Koto) dan pasar khusus agropolitan untuk menampung hasil-hasil pertanian yang berlokasi di jalan lintas Bukittinggi – Payakumbuh, tepatnya di Desa Koto Hilalang Kecamatan IV Angkat Candung.

Banyak perbedaan yang dapat dilihat secara nyata di Wilayah Kabupaten Agam terutama menyangkut keadaan fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Perbedaan-perbedaan yang akan selalu menjadi perdebatan panjang dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan wilayahnya. Perbedaan-perbedaan tersebut juga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat Kabupaten Agam sendiri, terutama jika sudah menyangkut pelayanan sosial, pengadaan sarana dan prasarana, dan yang paling penting, akan selalu menjadi masalah dalam pembangunan wilayah di kabupaten ini.

Apabila pelaksanaan pembangunan lebih difokuskan ke Wilayah Agam Timur, maka Agam Barat merasa dianaktirikan karena mereka merasa lebih membutuhkan pembangunan dibanding Agam Timur yang telah maju. Namun, bila pembangunan lebih berfokus ke Agam Barat, maka Agam Timur agak keberatan karena merasa uang yang digunakan untuk pembangunan di Agam Barat berasal dari Agam Timur. Keadaan seperti inilah yang terus menerus terjadi selama bertahun-tahun di Kabupaten Agam dan telah sekian lama tersembunyi sehingga menjadi dalam sekam dalam pelaksanaan pembangunan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Agam, dirumuskan suatu masalah utama dalam studi ini, yaitu : ***“Hubungan antara kebijakan pembangunan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakseimbangan pembangunan, memberikan kontribusi terhadap pengembangan Kabupaten Agam”***

Untuk menjawab permasalahan utama yang nantinya akan dijadikan studi, dilakukan pendekatan melalui *research question*, yaitu: ***“Faktor faktor apa saja yang berpengaruh terhadap ketidakseimbangan dalam pengembangan Kabupaten Agam.”***

## **1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi**

### **1.3.1 Tujuan Studi**

Adapun tujuan studi ini adalah untuk mengeksplorasi atau menggali lebih dalam faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan Wilayah Kabupaten Agam. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan identifikasi sektor-sektor potensial pada masing-masing wilayah yang nantinya dapat memacu pengembangan Kabupaten Agam terutama di Wilayah Agam Barat.

### **1.3.2 Sasaran Studi**

Sasaran studi ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan pengembangan Wilayah Kabupaten Agam.
2. Menganalisis perbedaan dan ketidakseimbangan yang terjadi di Kabupaten Agam



3. Menganalisis potensi sumberdaya dan faktor-faktor penunjang lainnya seperti sumber daya alam dan sumber dana pembangunan.
4. Mengkaji kebijakan-kebijakan pembangunan yang sudah ada untuk Kabupaten Agam baik secara lokal dan regional.

### **1.3.3 Manfaat Studi**

Penelitian yang dilakukan dalam studi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang fundamental bagi strategi pengembangan wilayah Kabupaten Agam di masa mendatang, terutama dalam penerapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

## **1.4 Ruang Lingkup Studi**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansial**

Salah satu pendekatan pembangunan daerah yang biasa digunakan adalah melalui pendekatan sistem perwilayahan. Pendekatan sistem perwilayahan dimaksudkan untuk “Mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan dan keseimbangan antar wilayah dalam hal sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional yang dijelaskan secara struktur wilayah, antar daerah dalam satu kerangka nasional” (Ditjen Cipta Karya, 1984).

Ketidakseimbangan wilayah menurut Myrdal (1957) merupakan akibat dari perkembangan ekonomi yang tumbuh pada suatu tempat yang tepat dan akan terus tumbuh melalui proses sirkuler dan kumulatif yang tepat sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan wilayah. Keseimbangan ruang dalam sistem perwilayahan menurut Friedmann (1966) dapat dicapai apabila “Pengalokasian sumber daya dapat dicapai secara optimal jika faktor-faktor

produksi yang saling berkaitan dapat terdistribusi yang selanjutnya terjadi pergeseran antara penggunaannya dengan lokasi yang tidak memungkinkan tanpa mengurangi produksi nasional.”

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksimbangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Agam, maka ruang lingkup substansi dalam studi di Wilayah Kabupaten Agam ini dibatasi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakseimbangan pembangunan di Agam Barat dan Agam Timur yaitu :

- Infrastruktur
- Fisik alam
- Sosial ekonomi
- Historis dan Budaya
- Kelembagaan

2. Potensi sumberdaya dan sumber dana yang menunjang pembangunan di Kabupaten Agam yaitu :

**1. Sumber daya manusia**

Dalam proses pembangunan daerah, manusia merupakan potensi sumber penyediaan tenaga kerja yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan (Mubyarto, 1973).

Secara rinci potensi sumber daya manusia terbagi atas :

- Jumlah dan perkembangan penduduk
- Tenaga kerja per sektor kegiatan
- Distribusi penduduk

Kehidupan sosial ekonomi penduduk juga merupakan potensi sumberdaya manusia yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan daerah.

## **2. *Sumber daya alam***

Sumber daya alam adalah sumber fisik alam yang dapat digali untuk tujuan-tujuan peningkatan kehidupan perekonomian suatu daerah (Mubyarto, 1973). Sumber daya alam merupakan modal dasar yang penting bagi pembangunan perekonomian daerah yang dikelompokkan sebagai berikut :

- Keadaan morfologi dan geologi
- Penggunaan tanah
- Pengairan
- Daerah konservasi
- Lokasi akibat bahaya gunung berapi

## **3. *Sumber dana***

Sumber dana pembangunan di Kabupaten Agam sekarang ini masih berupa dana dari APBD, APBN dan PAD. Sumber dana yang berasal dari PAD harus digali lebih besar lagi dari potensi yang ada di Kabupaten Agam dengan tidak mengandalkan pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi.

3. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang sudah ada untuk Kabupaten Agam baik secara lokal dan regional.

Aspek ini menyangkut ketersediaan berbagai jenis fasilitas yang menunjang lancar atau tidaknya proses kegiatan pembangunan daerah secara keseluruhan

yang disediakan oleh lembaga pemerintahan daerah sebagai fungsi pelayanan masyarakat. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat berupa fasilitas sosial maupun perekonomian.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Spasial**

Dalam studi ini, lingkup spasialnya adalah dua perwilayahan yang ada di Kabupaten Agam yaitu Wilayah Agam Barat yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan Wilayah Agam Timur dengan 6 (enam) kecamatan dengan melihat potensi wilayah (sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan) dan efisiensi ruang dari masing-masing kecamatan di kedua wilayah. Untuk lebih jelasnya, wilayah administrasi dan perwilayahan Agam Timur dan Agam Barat, dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Kesenjangan pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Agam terutama pada kedua daerah pengembangannya (Agam Barat dan Agam Timur), memerlukan suatu studi (penelitian) untuk melihat faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan pembangunan tersebut. Faktor-faktor tersebut akan teliti bagaimana interaksinya dalam memberikan kontribusi terhadap ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi, sehingga nantinya akan diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat bermanfaat sebagai masukan yang fundamental bagi strategi pengembangan wilayah terutama untuk Kabupaten Agam.

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran studi ini dapat dilihat pada Gambar 1.4.

**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

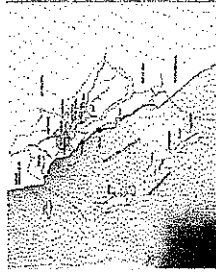
**DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PEREMBANGAN  
KABUPATEN AGAM**

**PETA BATAS ADMINISTRASI**

**KETERANGAN :**

- IBU KOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KOTAMADYA
- IBUKOTA KECAMATAN
- ▬ BATAS KABUPATEN
- ▬ BATAS KECAMATAN
- ▬ JARINGAN JALAN
- ▬ SUNGAI
- ▬ DANAU

**INSERT**



**SKALA**

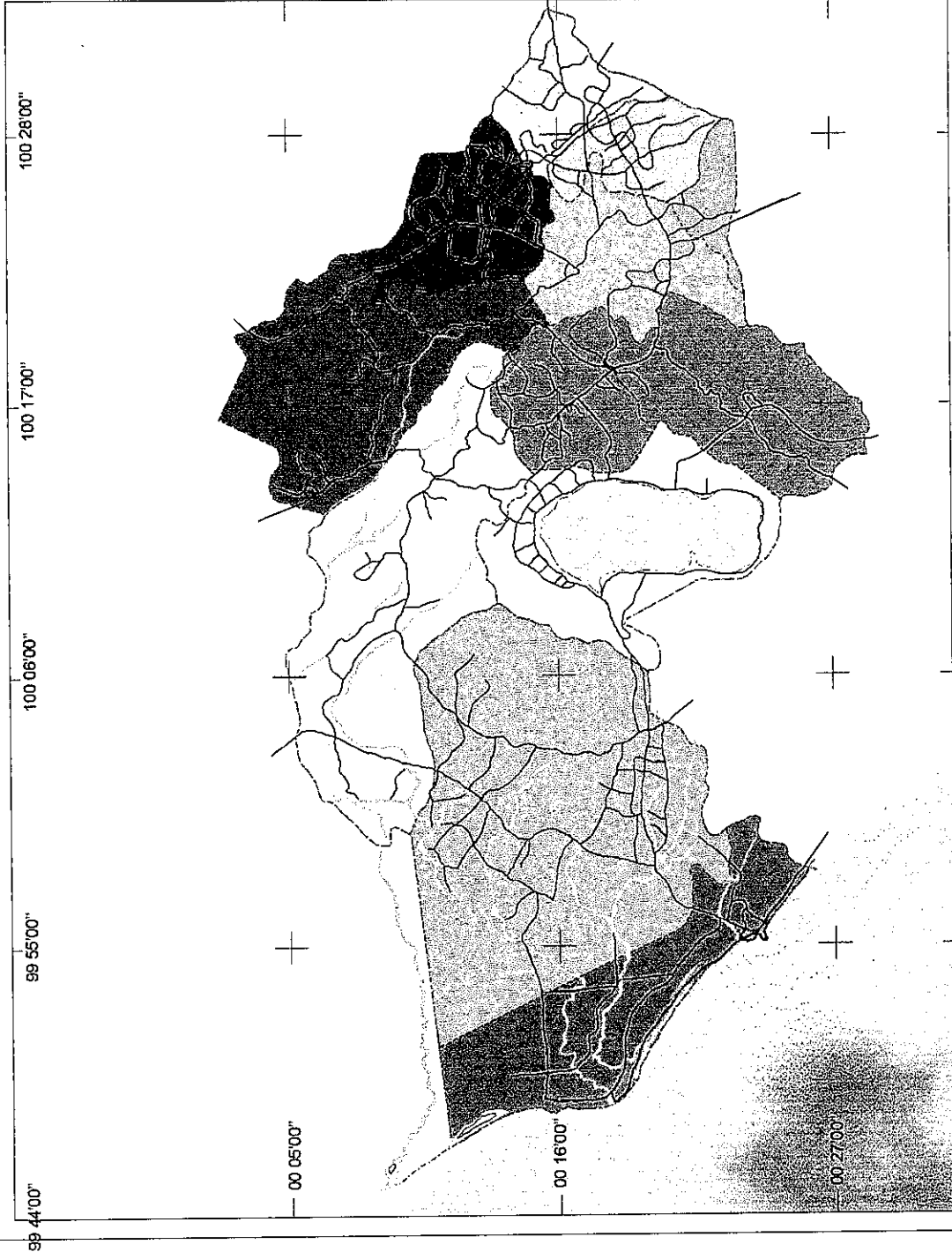
SKALA 1 : 500.000  
0 5 10 15 Km



**NOMOR**

Halaman 15 Gambar 1.2

SUMBER : BAPPEDA KABUPATEN AGAM, 2002  
SK DPRD TINGKAT II KABUPATEN AGAM  
No. 03/SP-DPRD/Ag-1995



# KABUPATEN AGAM

**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

**DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN AGAM**

**PETA PERWILAYAHAN**

**KETERANGAN :**

- IBU KOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KOTAMADYA
- IBUKOTA KECAMATAN
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- ▬ JARINGAN JALAN
- ▬ SUNGAI
- ▬ DANAU

**INSERT**



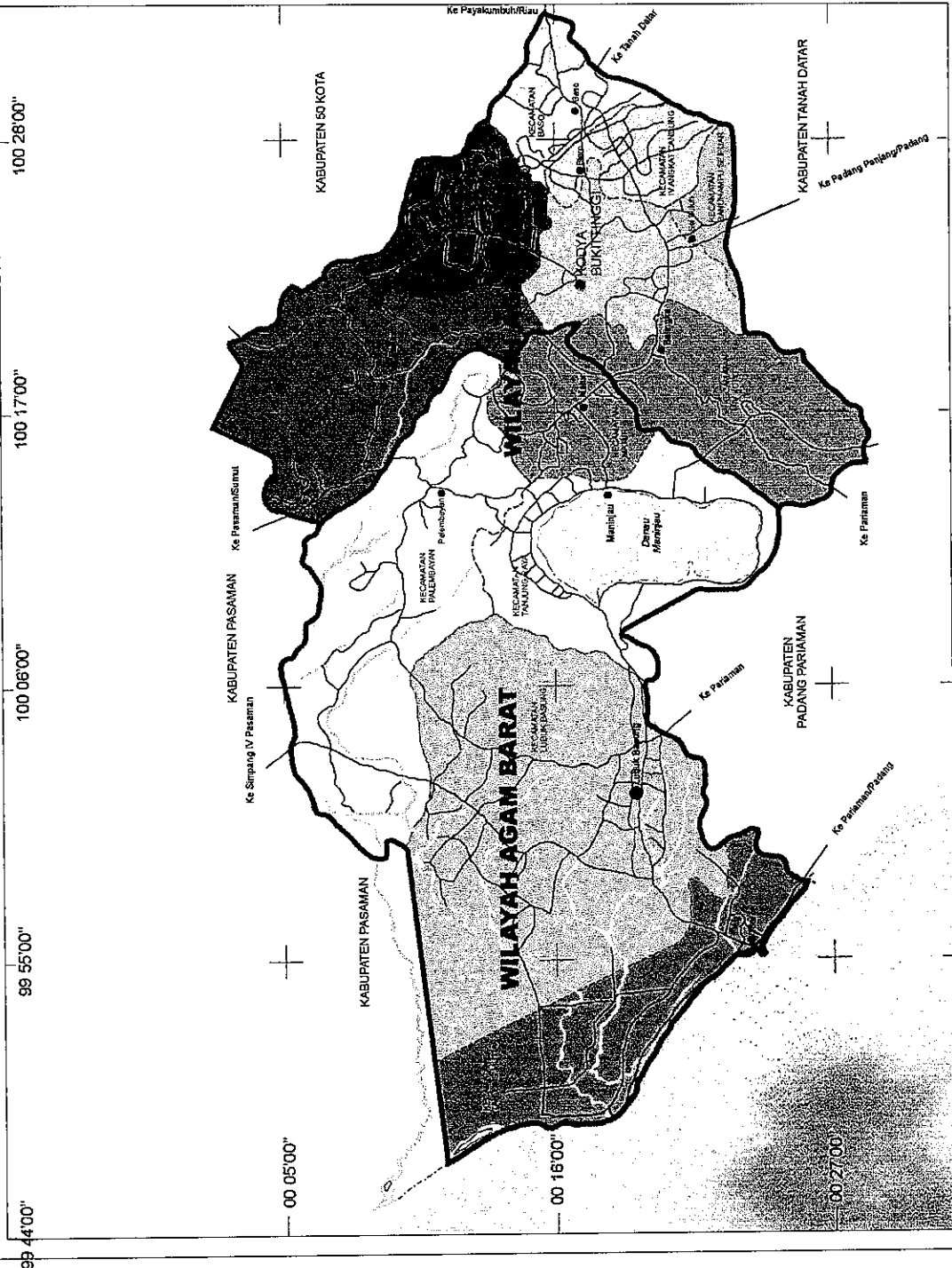
**SKALA**



**NOMOR**

Halaman	Gambar
16	1.3

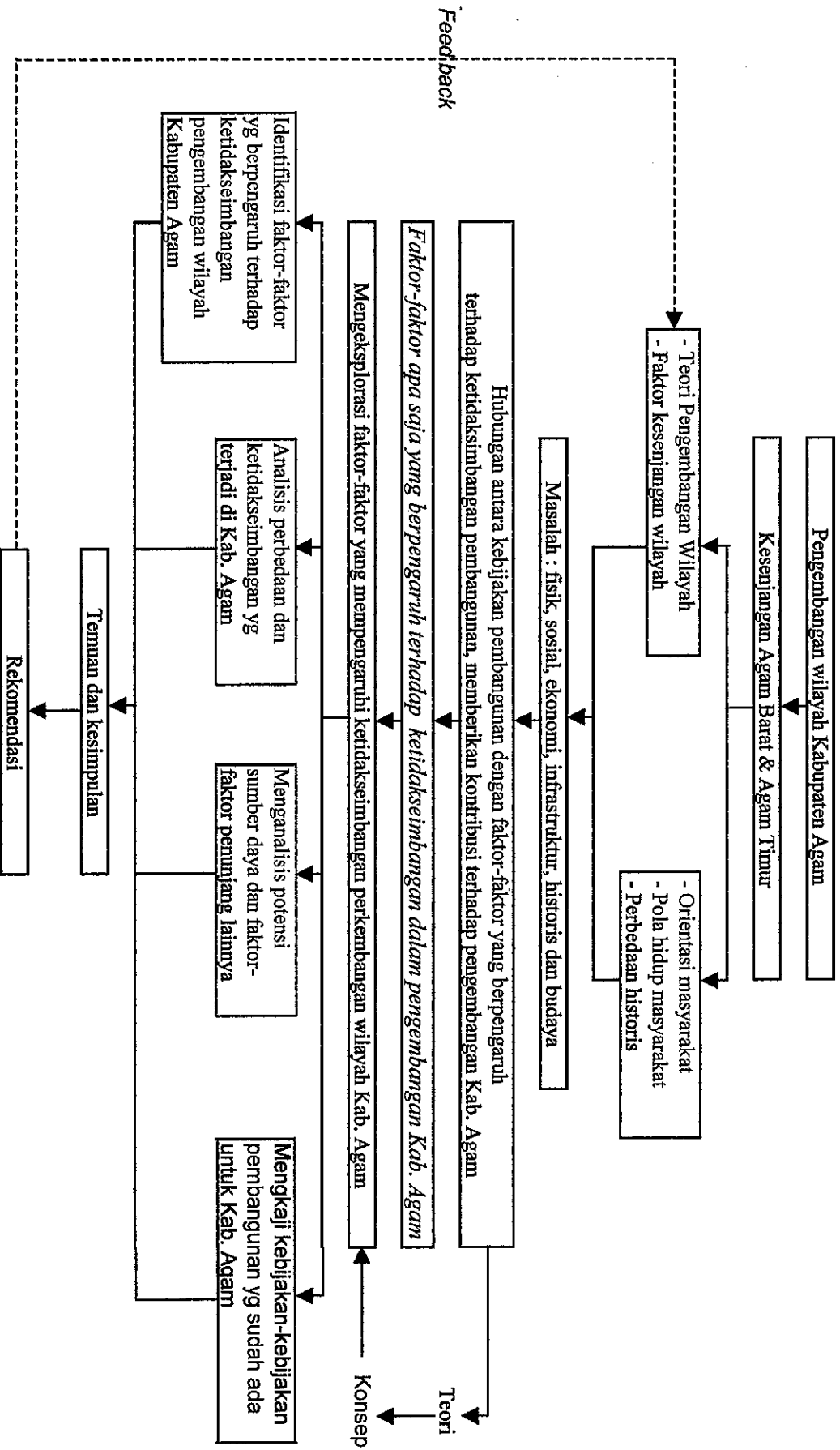
SUMBER : BAPPEDA KABUPATEN AGAM, 2002  
SK DPRD TINGKAT II KABUPATEN AGAM  
No. 03/SP-DPRD/Agam-1995



# KABUPATEN AGAM

# KERANGKA PEMIKIRAN STUDI

Gambar 1.4



## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Metoda penelitian adalah kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian (Nazir, 1988).

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, metoda penelitian yang dipakai adalah gabungan beberapa metoda antara lain penelitian deskriptif, eksploratif dan historikal yang dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.

Penelitian deskriptif dilakukan untuk menjangring informasi secara mendalam dari permasalahan yang ada dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah atau cara memahami fenomena sosial, berupa serangkaian kegiatan, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Metoda kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000), merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu proses yang diamati. Sedangkan metoda kuantitatif menghasilkan data kuantitatif berupa angka-angka statistik. Untuk melengkapi hasil penelitian, metoda kuantitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data instansional di Kabupaten Agam seperti PDRB, penduduk, fasilitas, utilitas dan sebagainya serta AHP (Analitical Hierarchy Process) untuk



menentukan keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan keadaan saat ini. Hasil penelitian dengan metoda kuantitatif diperoleh dari hasil wawancara lisan terhadap masyarakat dan pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan yang sesuai dengan objek penelitian dan pengamatan langsung (observasi) keadaan di lapangan.

### **1.6.2 Kerangka Analisis**

Dalam penelitian ini ditetapkan beberapa metode pendekatan yang akan digunakan sebagai dasar acuan melakukan suatu proses penelitian. Metode pendekatan studi ini mencakup landasan analisis yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pada dasarnya dalam melakukan analisis terhadap wilayah Kabupaten Agam terbagi dalam 5 (lima) sektor yaitu; infrastruktur (jaringan jalan dan alat transportasi), fisik alam (topografi, kemiringan, penggunaan lahan, hidrologi dan jenis tanah), sosial ekonomi (sumber daya manusia dan modal), histories dan budaya (sejarah, dan kehidupan masyarakat) dan kelembagaan (kebijakan dan implementasi pembangunan). Setelah dilakukan analisis terhadap potensi, kendala serta limitasi masing-masing sektor, maka diharapkan dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap ketidakseimbangan pembangunan di Kabupaten Agam.

Kerangka analisis bertujuan untuk mempermudah teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian yang secara diagramatis terdapat dalam Gambar 1.5. Dalam pelaksanaan penelitian di wilayah Kabupaten Agam diperlukan peta studi yang berupa kerangka analisis yang mencakup sektor-sektor terkait yang diasumsikan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakseimbangan



pembangunan di Kabupaten Agam. Dalam kerangka pelaksanaan penelitian ini terdapat 3 (tiga) tahapan utama yaitu tahapan input berupa pemasukan data, tahapan proses yaitu tahapan analisis, serta tahapan output yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakseimbangan pembangunan di Kabupaten Agam.

### 1.6.3 Teknik Analisis

Tahapan awal dalam kerangka pelaksanaan penelitian ini adalah tahapan data berupa data dasar mengenai infrastruktur, fisik alam, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan. Tahap selanjutnya adalah tahapan analisis berupa pengelolaan dan analisis data dasar yang ada untuk mengetahui karakteristik, kendala dan potensi serta keterbatasan tiap sektor. Analisis ini tercakup dalam 5 (lima) tahapan proses kerangka pelaksanaan studi yaitu :

#### a. Analisis aksesibilitas dan sentralitas

- Analisis aksesibilitas dilakukan untuk menentukan tingkat kemudahan dengan melihat kondisi jalan yang ada di tiap-tiap kecamatan. Rumus dasar aksesibilitas adalah :

$$I = \frac{FKT}{D} \quad (1)$$

Di mana :

I = Indeks tingkat aksesibilitas dari masing-masing kecamatan

K = Nilai kondisi jalan

F = Fungsi jalan

T = Faktor pengangkutan

D = Jarak rata-rata dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya

Dari hasil tersebut dapat diperoleh nilai lokasi setiap kecamatan berdasarkan rumus :

$$NI = \frac{10i}{It} \times I \quad (2)$$

NI = Nilai indeks aksesibilitas dari masing-masing kecamatan  
 I = Indeks tingkat aksesibilitas dari masing-masing kecamatan  
 It = Indeks tingkat aksesibilitas terbesar masing-masing kecamatan

Nilai indeks berbanding lurus dengan kemudahan pencapaian bahwa semakin tinggi nilai indeks (NI) suatu daerah, akan semakin mudah untuk dicapai (akses).

- Secara naluriah akan selalu terjadi suatu proses dalam memenuhi kebutuhan. Manusia akan mencari suatu pusat pemenuhan yang paling dekat, mudah dan murah dicapai serta memenuhi seleraanya, Analisis sentralitas dilakukan untuk melihat atau menentukan tingkat keterpusatan suatu lokasi dengan penilaian secara kualitatif dari gambar (peta).
- Analisis wilayah pengaruh, digunakan untuk mengetahui seberapa besar suatu wilayah terpengaruh oleh perkembangan wilayah lain dengan cara mengukur luasan pengaruh wilayah yang direncanakan menggunakan *Reilly's Law of Retail Gravitation* (Blair, 1995). Rumus *Reilly's Law of Retail Gravitation* sebagai berikut :

$$a = \frac{Dab}{\left[ 1 + \sqrt{\frac{Pb}{Pa}} \right]} \quad (3)$$

Di mana :

- $b \curvearrowright$   
 $a \curvearrowleft$  : skope wilayah pengaruh a terhadap b  
 Dab : jarak dari wilayah a ke b, dimana b merupakan kota pesaing terdekat  
 Pa : jumlah penduduk di wilayah a (Pusat)  
 Pb : jumlah penduduk di wilayah b

Pada awalnya model ini hanya cocok diterapkan pada daerah yang relatif datar. Namun karena analisis ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kelancaran aksesibilitas suatu daerah, maka model ini tetap digunakan untuk Kabupaten Agam.

*b. Analisis fungsi lahan*

Analisis fungsi lahan dilakukan untuk meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik alam yang meliputi jenis tanah, topografi (ketinggian), kemiringan, hidrologi dan penggunaan lahan terutama permukiman dengan menggunakan metode super impose/over lay (tumpang tepat). Dari penilaian ini akan dapat dilihat pergeseran fungsi lahan.

*c. Analisis kelengkapan fasilitas sosial dan ekonomi*

Kelengkapan fasilitas sosial dan perekonomian akan menentukan lokasi yang menjadi pusat pengembangan, karena kelengkapan fasilitas ini akan lebih menarik penduduk dalam memenuhi kebutuhannya.

(a) Analisis Skalogram, digunakan untuk mengetahui kelengkapan jenis fasilitas pelayanan di Kabupaten Agam. Metoda ini menggunakan matrik data dasar yang berisikan variabel-variabel fasilitas. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih realistik, dalam analisis ini dapat

dimasukkan variabel lain berupa jumlah penduduk, rencana kebijakan pemerintah dan aksesibilitas dari wilayah yang diteliti. Tahapan analisis ini adalah sebagai berikut :

- Mengelompokkan variabel-variabel yang digunakan seperti fasilitas, jumlah penduduk, kebijakan dan aksesibilitas sesuai dengan keperluan.
- Mengurutkan variabel-variabel yang ditemukan pada frekuensi baris paling atas menjadi faktor penting guna membedakan hirarki masing-masing wilayah.
- Memberikan tanda (1) pada sel yang menyatakan ketersediaan variabel dan tanda (0) pada sel yang tidak memperlihatkan ketersediaan.
- Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi ketersediaan variabel, semakin banyak ketersediaan variabel, maka unit perencanaan tersebut berada pada baris paling atas.
- Mengidentifikasi hirarki yang diinterpretasikan berdasarkan persentase ketersediaan fasilitas pada suatu wilayah. Semakin tinggi persentase, maka semakin tinggi hirarkinya.

(b) Menghitung nilai  $Kr$  (*Koefisien Reprodusibilitas*) yang menunjukkan derajat ketepatan instrumen pengukur untuk pengujian terhadap kelayakan penggunaan analisis skalogram dengan rumus (Rondinelli, 1985):

$$Kr = 1 - \frac{\sum e}{N.K} \quad (4)$$

Keterangan :

~~Koeffisien~~ Koefisien Reprodusibilitas

e = Jumlah kesalahan (error)  
 N = Jumlah observasi  
 K = Jumlah kesalahan yang diharapkan  
 Nilai Kr yang layak adalah > dari 0,9.

*d. Analisis Historis dan Budaya*

Analisis histories dan budaya, dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan histories dan budaya serta cara hidup masyarakat Agam Barat dan Agam Timur.

*e. Analisis kebijakan dan implementasi pembangunan*

- Analisis kualitatif, dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan pembangunan terutama proyek-proyek fisik yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam di wilayah Agam Barat dan wilayah Agam Timur.
- Analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*), yang merupakan salah satu metoda analisis untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahannya (Saaty, 1993). Dalam penelitian ini, AHP digunakan untuk mempertimbangkan pendapat beberapa pihak pengambil keputusan di Kabupaten Agam.

## **1.6.4 Metode Pengumpulan Data**

### **1.6.4.1 Kebutuhan Data**

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara mendalam. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui

tulisan-tulisan, seperti buku laporan, peraturan-peraturan, dokumen dan sebagainya.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam studi ini, disusun gambaran data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada saat melakukan pengumpulan data diharapkan semua data yang dibutuhkan dapat terkumpul dan kegiatan analisis dapat dilakukan dengan baik, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Tabel I.1 berikut ini akan memperlihatkan kebutuhan data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **1.6.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan teknik survai yang merupakan bagian dari metoda penelitian deskriptif, bertujuan untuk mencari kedudukan (status) fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan. Pengertian survai dibatasi pada data yang dikumpulkan dari sampel atas populasi yang mewakili seluruh populasi, mengingat waktu yang sangat terbatas dan materi yang sangat luas. Teknik survei pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang luas dan banyak.

Dalam penelitian ini, survai dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari responden yang dalam hal ini adalah pimpinan-pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Agam, pihak legislatif, eksekutif, pelaku-pelaku ekonomi, pemuka adat, ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai yang mewakili masyarakat. Survai tersebut dilakukan melalui :



**Tabel I.1**  
**TABEL DATA-DATA PENELITIAN**

No	ANALISIS	KEBUTUHAN DATA	MANFAAT	METODE SURVEI	SUMBER DATA
1	Aksesibilitas, sentralitas dan wilayah pengaruh	Infrastruktur : - Jaltrngan jalan - Jarak - Nodal - Jumlah penduduk	Untuk mengetahui ketepatan dan tingkat kemudahan suatu lokasi	- Primer - Sekunder	- Bappeda - Dinas PU - BPS - Masyarakat
2	Penggunaan lahan	Fisk alam : - Topografi - Kemiringan - Penggunaan lahan - Hidrologi - Jenis tanah	Mengetahui penggunaan lahan dan pergeseran fungsi lahan	- Sekunder	- Bappeda - BPN
3	Kelengkapan fasilitas sosial dan ekonomi	Sosial ekonomi : - Jumlah penduduk - Fasilitas sosial - Fasilitas ekonomi	Untuk melihat kelengkapan fasilitas sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan penduduk	- Sekunder	- Bappeda - BPS - Disperindag - DPU
4	Historis dan Budaya	Historis dan budaya - sejarah - budaya - cara hidup	Untuk mengetahui sejarah dan budaya dan cara hidup masyarakat Agam Barat dan Agam Timur	- Primer - Sekunder	- Ninik mamak - Cerdik pandai - Perpustakaan
5	Kebijakan dan implementasi pembangunan	Kelembagaan : - Kebijakan pembangunan - Keuangan daerah - Implementasi pembangunan	Untuk mengetahui kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Kab. Agam	- Primer - Sekunder	- Bupati - Sekda - DPRD - Wali Nagari - Bappeda - Bag. Hukum

- a) Wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan yang ada di Kab. Agam. Teknik ini digunakan secara simultan sebagai cara untuk memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi. Menurut Nazir (1999), teknik wawancara untuk data primer adalah tatap muka dengan narasumber dan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan. Hal yang membedakan dengan wawancara biasa adalah pewawancara selalu bertanya, narasumber selalu menjawab, tidak menjurus ke suatu jawaban (netral) dan mengikuti panduan.
- b) Teknik Sampling, adalah pemilihan sejumlah item tertentu dari seluruh item yang ada dengan tujuan mempelajari sebagian item tersebut untuk mewakili seluruh itemnya. Sebagian item yang dipilih disebut dengan sampel-sampel (*samples*). Sedangkan seluruh item yang ada disebut dengan universe atau populasi (*population*). Dengan meneliti sebagian dari populasi yang ada, diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang dapat menggambarkan seluruh populasi yang bersangkutan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang diambil dan ditentukan disesuaikan berdasarkan tujuan tertentu yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Untuk teknik sampling di Kabupaten Agam ini, sampel-sampel diambil dari pihak-pihak yang terkait langsung dalam pembangunan yang berjalan di Kabupaten Agam seperti pihak legislatif, eksekutif, pelaku-pelaku ekonomi, pemuka adat, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, karang

taruna dan masyarakat umum). Sampel dipilih sedemikian rupa, sehingga satuan elementer mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih.

Sesuai kebutuhan penelitian, maka jumlah sampel yang diambil adalah 20 responden sebagai narasumber penelitian dalam AHP yang dilakukan, yaitu :

1. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam (dua responden),
2. Anggota DPRD Kabupaten Agam (dua responden),
3. Ketua Bappeda Kabupaten Agam (satu responden),
4. Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Agam (satu responden),
5. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Agam (satu responden),
6. Kepala BPN Kabupaten Agam (satu responden),
7. Kepala Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Agam (satu responden),
8. Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Agam (satu responden),
9. Ka. Dinas Pariwisata, Seni & Budaya Kabupaten Agam (satu responden),
10. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Agam (satu responden),
11. Ketua PHRI Kabupaten Agam (satu responden),
12. Pimpinan KADINDA Kabupaten Agam (satu responden),
13. Pimpinan Gapensi Kabupaten Agam (satu responden),
14. Ninik Mamak (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kabupaten Agam)
15. Pegawai Negeri Sipil Pemkab Agam
16. Kepala Nagari di Kabupaten Agam
17. Alim Ulama
18. Cerdik Pandai

19. Karang Taruna

20. Masyarakat umum

- c) Dokumentasi, data-data sekunder untuk mendukung data-data primer, diperoleh dengan cara mempelajari dan mencatat dokumen perencanaan, peraturan yang ada, buku-buku, studi-studi yang telah dilakukan dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan analisis permasalahan.

### **1.6.5 Interpretasi Hasil Penelitian**

Data data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dipilah-pilah sesuai jenis dan kebutuhan dan disusun ke dalam bentuk bentuk tabel-tabel yang disebut kompilasi data. Data-data hasil kompilasi ini berupa sekumpulan data yang siap dianalisis. Dalam metoda kompilasi data, perlu disusun indeks sebagai ukuran gabungan untuk mengukur suatu variabel tertentu dari hasil penelitian di lapangan. Kompilasi data hasil penelitian dengan indeks yang telah disusun, akan memudahkan menginterpretasikan data yang akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam studi ini, maka sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Merupakan landasan berpijak dari studi yang dilakukan yang berisi latar belakang, permasalahan dan perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup spasial dan

substantial, kerangka pembahasan penelitian dan metodologi penelitian yang digunakan

**Bab II : KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KONSEP KETIDAKSEIMBANGAN WILAYAH**

Berisi kajian teori, proposisi dan konsep yang berupaya untuk memperoleh jawaban teoritis atas rumusan masalah serta teori-teori analisis yang digunakan

**Bab III : TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN AGAM**

Berisi data dan informasi wilayah penelitian yang mendukung rumusan masalah secara empiris yang berisikan historis budaya, gambaran fisik, kondisi perekonomian dan keruangan

**Bab IV : ANALISIS**

Berisikan pembahasan terhadap disparitas wilayah di Kab. Agam karena adanya dikotomi wilayah barat dan timur

**Bab V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berupa kesimpulan hasil penulisan dan rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan

## **BAB II**

### **KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KONSEP KETIDAKSEIMBANGAN WILAYAH**

#### **2.1 Pengembangan Wilayah**

Menurut Jayadinata (2000:13), wilayah (*region*) secara geografi merupakan kesatuan alam, yaitu alam yang serba sama atau homogen atau seragam dengan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama yang mempunyai ciri yang khas, sehingga wilayah tersebut dibedakan dari wilayah lain. Wilayah geografi mengandung berbagai pengertian wilayah lainnya seperti wilayah geologi (*geological region*), wilayah tubuh tanah (*soil region*), wilayah ekonomi (*economic region*) dan sebagainya. Batasan dari wilayah geografi ini tidak berhimpit satu dengan yang lainnya sehingga batasnya dapat dibuat dengan tepat. Wilayah geografi ini disebut juga wilayah formal (*formal region*).

Selain wilayah formal terdapat juga wilayah fungsional (*functional region*), yang secara pendefinisian merupakan suatu bagian dari permukaan bumi, di mana beberapa keadaan alam yang berlawanan memungkinkan timbulnya bermacam-macam kegiatan, yang hasilnya berbeda dan saling mengisi dalam keperluan kehidupan penduduk. Wilayah fungsional sering disebut sebagai wilayah organik. Seperti misalnya di suatu lokasi pegunungan, penduduk yang berada di ketinggiannya hidup dari kehutanan, yang berada di lerengnya mengusahakan perkebunan dan pertambangan, yang menetap di kakinya mengolah lahan pertanian dan berternak, dan yang tinggal di dataran hidup dari perdagangan, industri dan pelayanan. Di sini jelas terlihat bahwa masing-masing

penduduk wilayah tersebut dapat saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara konseptual, sejalan dengan garis besar jenis analisis regional, dikenal ada dua pengertian wilayah (Fisher, Prisma 3, 1975), yaitu :

1. *Wilayah homogen*

Suatu wilayah (*region*) yang mempunyai ciri-ciri khas yang kurang lebih sama (*homogen*) dan dengan segera dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lainnya sebagai keperluan perencanaan dan kebijaksanaan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, tanpa menghiraukan perbedaan-perbedaan lokasi masing-masing wilayah tersebut.

2. *Wilayah Nodal*

Suatu wilayah yang mempunyai organisasi tata ruang (*spatial organization*) yang ditunjukkan atau ditekankan pada hubungan antara pusat-pusat (*nodal*) atau sentra-sentra kegiatan dan sumber daya dalam tata ruang yang tersebar. Setiap nodal atau sentra mempunyai daerah belakang (*hinterland*) atau lingkup wilayah pengaruh (*zones of influence*) yang sesuai dengan hirarki di dalam dan di luar wilayah tersebut.

Dalam konsep ini, lokasi nodal atau sentra dan interaksi/ keterkaitan antaranya menjadi sangat penting. Namun dalam kenyataan praktis, para perencana lebih sering menggunakan wilayah administrasi. Dalam pengkajian, analisis maupun perumusan suatu rencana, bentuk pendekatan kedua konsep di atas juga banyak dipakai secara bersama-sama.

Wilayah administrasi sendiri adalah wilayah yang pembentukannya menurut penetapan peraturan negara. Di Indonesia penetapan peraturan tentang wilayah administrasi ini seperti propinsi, kabupaten dan kota. Lebih seringnya wilayah administrasi dipakai dalam perencanaan karena (Sadono Sukirno, 1976) adalah :

1. Dalam melaksanakan atau implementasi rencana akan lebih mudah berdasarkan administrasi pemerintahan yang ada, dalam hal ini mencakup lembaga pemerintahan, pendanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Data-data yang akan dipakai untuk menganalisis telah tersedia menurut sistem satuan administrasi pemerintahan.

Teori *resource endowment* (Perloff, 1960) mengemukakan bahwa perencanaan dan pengembangan suatu wilayah biasanya berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut. Pengembangan ekonomi wilayah tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu, yang dalam jangka pendek merupakan asset untuk memproduksi barang dan jasa.

North (1955), menyebutkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspornya, sedangkan menurut Myrdal (1957), terdapat dua kekuatan yang bekerja pada pertumbuhan ekonomi, yaitu *backwash effect* dan *spread effect*. Kekuatan efek penyebaran (*spread effect*) mencakup penyebaran pasar hasil produksi bagi wilayah yang belum berkembang, kekuatan efek balik negatif (*backwash effect*) biasanya melampaui efek penyebaran dengan



ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari daerah tidak berkembang ke daerah berkembang.

Sebelum melangkah lebih jauh tentang perencanaan wilayah dan konsep-konsep yang ada dalam perencanaan wilayah nantinya, terlebih dahulu kita melihat beberapa pendefinisian wilayah secara konseptual seperti pada Tabel II.1 di bawah ini.

### PENDEFINISIAN WILAYAH SECARA KONSEPSIONAL

	<b>Homogeneous Region</b>	<b>Functional Region</b>	<b>Administrative Region</b>
GRCP/ESCAP p.17. 34 - 35	A region can be determined by the aspect which make it a more or less homogeneous whole	A region can be established on functional grounds; people need functions (in the sense of facilities) and communication from where they live with these function	A region can comprise an area that falls within an administrative border.
Sadono Sukirno p.1 - 2	Suatu region sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi berlaku dan di berbagai pelosok ruang tersebut sifat-sifatnya sama.	Suatu region sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasi oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.	Suatu region sebagai satu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu seperti propinsi, kabupaten kota, dan lain-lain.
John Friedmann (Venezuela) p. 40 - 41	A region is bounded according to the occurrence of one or more features with respect to which the area is homogeneous.	Areas that stand in an active relation to each other, whose future are linked by the flows of people, information, goods, or financial investment among them. There are regions of interdependency.	(regionalization is simply a problem in the spatial aggregation of data). The solution may be satisfactory in the interest of administrative convenience.

Ada dua pendekatan yang umum dipakai dalam pengembangan wilayah. Pendekatan pertama yaitu konsep pengembangan wilayah dari atas (*development from above*) yang bertujuan untuk melakukan pembangunan pada sektor-sektor utama (terpilih) pada lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh bagian wilayah. Konsep pengembangan dari atas paling banyak digunakan, baik secara ekonomis maupun praktek.

Pendekatan yang kedua adalah konsep pengembangan dari bawah (*development from below*) yang merupakan suatu proses pembangunan menyeluruh dari berbagai kesempatan yang ada untuk individu, kelompok sosial dan kelompok masyarakat secara teritorial pada skala menengah dan kecil. Mobilisasi kemampuan dan sumber daya yang ada sepenuhnya untuk memperoleh keuntungan bersama dalam ekonomi, sosial dan politik. Konsep pengembangan dari bawah (*development from below*) ini merupakan kebalikan dari konsep pengembangan dari atas.

## **2.1.1 Konsep-Konsep Pengembangan Wilayah**

### **2.1.1.1 Pusat-Pusat Pertumbuhan**

Berbagai istilah ditemukan dalam berbagai literatur dalam menyebutkan pusat pertumbuhan. Mulai dari kutub pertumbuhan (*growth pole*), titik pertumbuhan (*growth point*), pusat pertumbuhan (*growth center*), kutub pengembangan (*development pole*), sumber pengembangan (*development axes*), zona pertumbuhan (*growth zone*) sampai pada daerah pertumbuhan (*growth area*). Beberapa ahli terutama ahli ekonomi dan ahli perencanaan memberikan konsep dasar, pengembangan dan penyempurnaan dari pusat-pusat pertumbuhan ini.

Konsep-konsep itu dikemukakan antara lain oleh Perroux, Boudeville, Hansen, Hermansen, Hirschman, dan Myrdal. Konsep ini pelengkap dari teori tempat sentral yang merupakan hasil pengamatan atas proses perkembangan ekonomi yang dijabarkan secara induktif.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan merupakan strategi yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang/merata dengan tujuan pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh wilayah. Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan strategi ini paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktek.

Perroux lebih menitikberatkan perkembangan kutub pertumbuhan dalam ruang ekonomi (*economic space*). Hal ini dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterkekangan dimensi-dimensi geografis yang dulunya digunakan dalam teori lokasi.

Friedmann (1966), mengemukakan lima macam wilayah menurut permasalahannya, yaitu :

1. *Core region* (wilayah inti), yaitu kawasan metropolitan dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi.
2. *Upward-transitional areas* (kawasan transisi menaik), yaitu dengan potensi alamiah dan lokasi dekat ke *core region* mendorong kemungkinan pemanfaatan sumber daya secara intensif.

3. *Resource frontier regions* (wilayah frontier sumber daya), kawasan permukiman baru yang berupa kolonisasi pertanian atau eksploitasi sumber daya.
4. *Downward-transitional areas* (kawasan transisi menurun), yaitu wilayah tua yang mapan dengan ekonomi yang mendeg/stagnan atau menurun.
5. *Special areas* (wilayah khusus), yaitu wilayah-wilayah yang membutuhkan pendekatan pembangunan secara khusus, seperti wilayah-wilayah yang berada di sepanjang perbatasan negara.

Pusat wilayah merupakan daerah inti yang mempunyai daya pengikat yang kuat untuk mewujudkan integrasi spasial, sosial, ekonomi dan budaya. Maka selain mampu melaksanakan fungsi pelayanan secara lokal, juga diharapkan mampu mendorong perkembangan daerah sekitarnya.

Dalam apa yang dikemukakan Brookfield (1975) sebagai suatu aspek ruang dalam pembahasan pertumbuhan (*spatial a side to a text of growth*), Hirschman (1958) mengajukan suatu model yang secara struktural hampir sama dengan perkembangan terkutub (*polarised development*). Dengan menyetujui bahwa kesenjangan internasional dan interregional adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan merupakan suatu kondisi atau syarat pertumbuhan, ia mengemukakan istilah "pengutuban" (*polarisation*) dan "penetesan" (*trickle down*). Bila Myrdal menekankan serangkaian peristiwa yang akan menyebabkan kesenjangan ruang, maka Hirschman akan lebih menekankan pada gaya menyeimbangkan (*counter balancing forces*) yang mencakup beberapa elemen bantuan pemerintah yang secara terus menerus akan memperbaiki keseimbangan

antara Utara yang tumbuh, dengan Selatan yang tertinggal. Kutub pertumbuhan kemudian menjadi pusat perkotaan yang kegiatan ekonominya berdampak pada wilayah belakangnya (*hinterland*) dan selanjutnya hampir setiap pusat perkotaan mengalami pertumbuhan (Parr, 1973).

Friedmann dan Alonso (1964) mengemukakan konsep *core periphery* atau *counter periphery* dalam menjelaskan interaksi antara kota dan kawasan sekitarnya. Pusat-pusat yang tumbuh pesat dikatakan lebih berperan sebagai pompa penghisap yang menyedot elemen-elemen yang (lebih) dinamis dari wilayah-wilayah yang (lebih) statis, sementara sisa wilayah lainnya dalam negara menduduki posisi kelas dua dan merupakan wilayah pinggiran (*peripheral*).

Beberapa strategi pengembangan wilayah dengan konsep pusat-pusat pertumbuhan ini (Parr, 1999), yaitu:

1. Membangkitkan kembali daerah terbelakang (*depressed area*),

Daerah terbelakang dianggap sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, kesejahteraan penduduk di bawah rata-rata, serta rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas. Untuk menciptakan struktur ruang wilayah yang lebih kompetitif dilakukan pendekatan dengan mengkombinasikan antara pergerakan modal secara inter-regional. Tujuannya adalah mencegah modal ke luar wilayah, serta mencegah tingginya populasi di daerah tersebut. Hasil yang diharapkan berupa transformasi struktur ruang ekonominya.

2. Mendorong dekonsentrasi wilayah,

Dilakukan guna menekan tingkat konsentrasi wilayah dengan tujuan membentuk struktur ruang yang tepat, khususnya pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan. Artinya, pengembangan yang dilakukan adalah pada wilayah non-metropolitan, untuk menekan perannya yang sudah terlalu besar. Yang perlu diperhatikan adalah mempertimbangkan faktor lokasi pengembangan dimana tidak semua lokasi layak dijadikan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Memodifikasi sistem kota-kota,

Untuk mengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan dilakukan dengan pengaturan sistem perkotaan yang memiliki hierarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.

4. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah,

Struktur ekonomi inter-regional yang kurang memuaskan memunculkan strategi ini dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Beberapa karakteristik dari strategi pusat-pusat pertumbuhan (Parr, 1999) sebagai berikut :

- a. Mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan populasi dalam suatu wilayah pada sebagian lokasi atau pusat yang telah direncanakan pada satu periode tertentu,

- b. Dibutuhkan pembatasan jumlah lokasi-lokasi atau pusat-pusat yang dirancang sebagai pusat,
- c. Diperlukan seleksi/diskriminasi keruangan di antara lokasi-lokasi yang ada,
- d. Modifikasi struktur keruangan terhadap lapangan pekerjaan dan populasi dalam wilayah.

Selanjutnya menurut Parr (1999) terdapat beberapa kerangka batasan dalam pembuatan keputusan dalam kaitannya dengan perencanaan ekonomi wilayah, batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Diagnosis yang harus hati-hati terhadap permasalahan wilayah serta artikulasi yang jernih terhadap konsistensi tujuan berdasarkan perencanaan yang realistis, juga berdasarkan pada keterbatasan yang menyangkut kelayakan ekonomi dan teknis, ketersediaan sumber daya dan penerimaan secara politik,
- b. Mengetahui secara mendalam tentang aktivitas ekonomi dalam wilayah, termasuk mengetahui sejauh mana struktur hubungan antara sektor ekonomi dengan struktur ruang wilayahnya,
- c. Apresiasi terhadap pertumbuhan eksisting sertaantisipasi terhadap penyebaran pertumbuhan, apakah itu di antara wilayah dalam lingkup nasional, antara kawasan dengan wilayah atau dalam suatu sistem kota,
- d. Identifikasi yang memadai terhadap instrumen kebijakan yang ada, termasuk kapasitas dari struktur administrasi,
- e. Penelitian yang hati-hati terhadap resiko dan kemungkinan kesuksesan yang berhubungan dengan aspek sektoral dan keruangan,

- f. Pengertian terhadap operasional dari keterkaitan dan interaksi di antara beberapa elemen yang terkait.

Kemudian ada 3 (tiga) dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan :

- (1) Konsentrasi prasarana kota pada pusat pertumbuhan,

Pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan didefinisikan dalam konteks yang luas yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan tujuan sosial. Dalam konteks belanja publik ada sebuah justifikasi terhadap hal tersebut, yaitu tipe prasarana yang dibatasi pada fasilitas yang memiliki skala pelayanan yang luas. Untuk prasarana transportasi termasuk di dalamnya pembangunan baru dan peningkatan jalan dengan fokus pada pusat pertumbuhan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain yang menghubungkan pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya. Prasarana yang berskala luas ini akan menimbulkan eksternalitas, sehingga akan membuat daerah menjadi lebih atraktif bagi perusahaan dalam konteks lokasi dan menstimulasi masuknya investasi ke dalam pusat pertumbuhan. Untuk melengkapi prasarana tersebut harus didukung oleh kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya.

- (2) Konsentrasi aktivitas perekonomian (*aglomerasi*)

Konsentrasi / aglomerasi aktivitas perekonomian di pusat pertumbuhan terutama industri yang memiliki keterkaitan ke depan (*forwad linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*). Hal ini akan dipengaruhi oleh aliran



investasi yang masuk langsung ke dalam pusat pertumbuhan dan dikaitkan dengan eksploitasi aglomerasi ekonomi. Konsentrasi aktivitas ekonomi ini sangat bergantung pada kelengkapan prasarana kota.

(3) Kutub yang direncanakan berdasarkan keunggulan komperatifnya,

Hal ini terutama didasarkan pada kebijakan spasial untuk mengembangkan pusat pertumbuhan dengan melihat aspek keunggulan komperatif daerah, kependudukan dan kinerja ekonomi daerah. Bagaimanapun juga rasionalitas dari strategi pusat pertumbuhan memunculkan dua pola yang berbeda, pertama adalah struktur ruang wilayah mengalami perubahan yang radikal dengan pertumbuhan pada kutub yang direncanakan yang disertai oleh redistribusi utama dari populasi dan pekerja dengan gaji murah (*low-cost labor*) ke dalam pusat dan dengan menimbulkan efek ke sektor lainnya, yaitu perdagangan dan jasa. Semua itu akan mendorong masuknya investasi ke dalam pusat pertumbuhan dan meningkatkan kinerja ekonomi wilayahnya.

Ada beberapa dasar pertimbangan dalam menerapkan konsep-konsep pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah:

1. Pada dasarnya, konsep ini menjelaskan tentang:
  - a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dimulai dan mencapai puncaknya pada sejumlah pusat pertumbuhan.
  - b. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dijalarkan (disebarkan) dari beberapa pusat pertumbuhan ini secara nasional dari pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah belakangnya (Miller 1974).

Menurut konsep ini, pusat pertumbuhan akan mampu merambatkan perkembangannya ke wilayah belakangnya.

2. Konsep pusat pertumbuhan merupakan konsep yang paling praktis karena dianggap telah mempertimbangkan aspek tata ruang dan dapat diterapkan pada berbagai kondisi, baik pusat-pusat berskala desa atau dapat dikatakan bahwa pusat-pusat pertumbuhan tidak terbatas pada daerah kota saja, tapi daerah perdesaan pun dapat menjadi sektor depan sebagai pendorong perkembangan suatu daerah (Soedjito, 1974). Konsep kutub pertumbuhan ini telah banyak diterima dan juga telah diterapkan sebagai alat pengembangan suatu wilayah baik di negara maju maupun di negara berkembang (Glasson, 1977).
3. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah, konsep ini mempunyai beberapa keuntungan. Suatu perencanaan regional sistem pusat-pusat pertumbuhan yang hierarkis dapat menghindari pemborosan. Sistem yang hierarkis adalah cara yang relatif efisien untuk pengadministrasian dan pengalokasian sumber dana dalam suatu wilayah dan memudahkan terwujudnya manfaat-manfaat sosial yang ditimbulkan oleh keuntungan skala (Glasson 1977). Hal senada juga dikemukakan oleh Richardson dimana pendapatan suatu daerah secara keseluruhan akan meningkat merata dalam arti bahwa pendapatan di daerah pertumbuhan akan mencapai maksimum apabila pembangunan dipusatkan pada titik pertumbuhan daripada disebarakan secara tipis di seluruh daerah (Richardson 1977).
4. Pusat-pusat pertumbuhan tidak hanya merangsang kegiatan pertanian dan perdesaan yang terletak di pusat-pusat metropolitan yang jauh, akan tetapi

juga menciptakan suatu kondisi dimana terjadinya pertumbuhan ekonomi wilayah yang akan dipercepat (*accelerated regional economic growth*) dan sendiri menjadi penarik-tandingan (*counter-attraction*) terhadap metropolitan yang padat (*the congested metropolitan core*).

### **2.1.1.2 Pengembangan Ekonomi Lokal**

Sesuai dengan sejarah perencanaan pembangunan, di mana ada konsep pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara *development from above*, *development from below* dan *selective spatial closure*, konsep *agropolitan* tidak memberikan hasil yang diinginkan dan sulit diimplementasikan. Dari hal tersebut, lahirlah konsep *local economic development*.

Konsep pengembangan ekonomi lokal yang lebih dikenal dengan nama LED ini, berusaha memadukan konsep-konsep tersebut yang ada dengan mengembangkan dan meningkatkan peran elemen-elemen *endogenous development* dalam kehidupan sosial ekonomi lokal dan melihat keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah yang lebih luas (Ma'rif : 2000). Dasar LED adalah pengembangan kewirausahaan lokal serta tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan lokal, kerja sama pemerintah lokal dengan swasta dan lembaga-lembaga lainnya dalam mengelola sumber-sumber yang potensial untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Pada dasarnya LED menganggap pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh tumbuh kembangnya wiraswasta lokal yang ditopang oleh kelembagaan di wilayah tersebut, meliputi industri, universitas, asosiasi kegiatan usaha, pemerintah daerah, pengusaha lokal dan lainnya. Namun permasalahannya

adalah bagaimana memobilisasi potensi-potensi kelembagaan yang ada dan menjadikannya sebagai faktor pendorong pengembangan wilayah. Banyak fungsi-fungsi yang harus diperhatikan dalam LED seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal investasi, skala ekonomis, pasar, situasi ekonomi, kemampuan pemerintah pusat dan daerah, serta situasi yang kondusif.

Secara akademis, perekonomian lokal dibagi menjadi dua sektor perekonomian, yaitu *sektor basis* dan *non basis*. Sektor basis merupakan kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke luar batas wilayah perekonomian, sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan-kegiatan penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam wilayah yang bersangkutan.

Dalam teori basis ekonomi (*economic base theory*) disebutkan bahwa bertambah banyak sektor basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan dari luar daerah ke dalam daerah yang bersangkutan, sehingga akan menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor non basis, demikian pula sebaliknya. Sektor basis berperanan sebagai penggerak utama (*prime mover role*) perekonomian wilayah melalui *efek multiplier*. Dengan demikian suatu daerah dapat berkembang bila mampu mengembangkan sektor basisnya (Glasson, 1977), serta penanaman modal pada industri-industri lokal merupakan investasi sebagai akibat kenaikan pendapatan dari industri-industri sektor basis (Kadariah, 1985).

Daerah yang tidak memiliki sektor basis, akan lambat dalam pertumbuhan ekonominya. Namun kerugiannya, bila suatu daerah tergantung pada satu kegiatan

basis, perekonomian sangat rentan terhadap gejolak. Untuk itu, suatu daerah akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa yang menjadi sektor basisnya. Sebagai model, LED menekankan bagaimana merumuskan *endogeneous development policies* dengan sebanyak mungkin menggunakan aspek lokalitas dalam pembangunan, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan kelembagaan. Indikator yang sering digunakan adalah besarnya kesempatan kerja di daerah tersebut.

Pada intinya LED mengemukakan bagaimana mengembangkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Kemudian melihat sejauh mana industri tersebut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan menumbuhkan perekonomian lokal serta bagaimana keberlanjutannya pada masa yang akan datang. Proses berkembangnya perekonomian lokal pada dasarnya meliputi empat tahap : *pertama*, tumbuhnya kewiraswastaan (*entrepreneurship*) lokal ; *kedua*, lepas landasnya (*take off*) perusahaan-perusahaan lokal ; *ketiga*, berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut keluar lokalitas, dan *keempat*, terbentuknya suatu perekonomian wilayah yang mengakar pada kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan-keunggulan komparatif aktifitas ekonomi lokal tersebut, (*Coffey and Polase dalam Blair, 1985*).

#### **2.1.1.3 Konsep Small Market Town**

*Small market towns* pada dasarnya adalah suatu strategi “pengembangan wilayah terpadu” yang lebih menekankan pada pentingnya pengembangan kaitan perdesaan-perkotaan (*rural-urban linkages*). Dalam hal ini, *small market towns*

berperan sebagai “pusat pertumbuhan perdesaan” yang harus direncanakan dalam “kawasan ekonomi fungsional” dengan meningkatkan kaitan perdesaan-perkotaan melalui investasi infrastruktur dan juga dengan membantu perkembangan berbagai kegiatan ekonomi yang saling berhubungan yang terdiri atas suatu basis kegiatan produksi primer, industri pengolahan dan industri yang men-supply pasar lokal, industri “ekspor” dan sektor tersier/perdagangan (Johnson, 1970).

Konsep ini merupakan strategi pengembangan wilayah terpadu sebagai kebijaksanaan ruang untuk pertumbuhan yang lebih adil. Upaya perencanaan langsung diarahkan pada penyusunan hierarki tiga tingkat pelayanan perkotaan di wilayah yang sebahagian besar perdesaan. Dengan demikian, konsep ini merupakan jembatan penyatu antara daerah *urban* dan daerah *rural* yang terdapat dalam satu wilayah di mana masing-masing daerah masih menampakkan ciri-ciri yang dominan yaitu pertanian di daerah *rural* dan perdagangan, industri dan jasa di daerah *urban*.

Adapun sektor industri yang disebut disini adalah sektor industri yang menghasilkan peralatan pertanian maupun industri yang mengolah hasil pertanian. Disamping itu, juga sektor perdagangan yang memasarkan hasil pertanian maupun hasil industri tersebut di atas dan sektor-sektor jasa yang menunjang kelancaran kegiatan secara keseluruhan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan konsep *small market towns* adalah menciptakan sistem produksi dan pertukaran (*exchange*) yang terpadu. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan ini adalah sebagai berikut:

- Transformasi masyarakat dan kegiatan produktif – evolusi pertanian subsistem menuju komersial. Kegiatan ekonomi yang tersebar menjadi pusat produksi yang terkonsentrasi dan terpadu. Hal ini tidak lagi mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tapi mendorong mereka untuk tetap tinggal di tempat mereka semula.
- Menseimbangkan pendapatan desa dan kota, dan memperkecil perbedaan-perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif, khususnya memadukan kegiatan pertanian dengan kegiatan non pertanian.
- Menggunakan tenaga kerja yang ada secara tepat guna, yaitu dengan membuka lapangan kerja baru seperti pembukaan lahan usaha baru, memperluas kegiatan usaha non pertanian serta pembangunan sarana dan prasarana lainnya.
- Merangkai wilayah *small market towns* menjadi jaringan regional dengan cara membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana perhubungan antar wilayah.
- Menyalurkan pengetahuan dan kepandaian penduduk setempat pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keahliannya melalui penerangan-penerangan dari ahli dan orang-orang yang berkecimpung dalam pembangunan perdesaan.

### **2.1.2 Aspek-Aspek Pengembangan Wilayah**

Perkembangan suatu kota dan wilayah, ditentukan atas empat aspek utama, yaitu ekonomi, sosial budaya, fisik dan lingkungan (Widyaningsih, 2001). Keempat aspek dijadikan dasar kriteria terhadap Analysis Hierarchy Process (AHP) yang dapat dijabarkan lagi menjadi sub-sub kriteria, yaitu :

### 1. Aspek ekonomi:

- *Pendapatan daerah (PAD)*, hal pokok yang diperlukan menuju kemandirian wilayah menyongsong otonomi daerah dan desentralisasi dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan berinovasi mencari sumber lain.
- *Pendapatan masyarakat*. Kemandirian dan kemajuan suatu daerah akan diperlihatkan oleh kemakmuran masyarakatnya (*social welfare*) dan ditandai dengan pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi akan menciptakan sumber pembiayaan pembangunan dari *saving*, *investasi* dan *produktivitas* yang tinggi.
- *Kesempatan kerja*. Tenaga kerja akan tertarik ke daerah maju, karena tingkat upah dan kesempatan kerja yang tinggi.

### 2. Aspek sosial budaya:

- *Kelembagaan*, faktor yang menentukan keberlanjutan pengelolaan daerah, yaitu struktur kelembagaan yang profesional dan kaya fungsi.
- *Pendidikan*, tingkat pendidikan yang tinggi menjadi ciri kemajuan penduduk suatu daerah dan memberi andil terhadap daerahnya secara keseluruhan.

### 3. Aspek fisik:

- *Tata guna lahan*, meliputi pengaturan penggunaan tanah dan ruang. Kepastian penggunaan tata guna lahan merupakan faktor keteraturan struktur fisik dan non fisik suatu wilayah.



- *Ketersediaan prasarana dan sarana*, merupakan faktor penunjang perkembangan daerah dan akan menciptakan kelancaran aksesibilitas serta menarik investasi.
- *Hubungan antar daerah*, keberadaan suatu daerah tergantung pada daerah-daerah lain di sekitarnya. Hubungan komplementer yang saling menguntungkan akan berdampak terhadap kemajuan daerah.

#### 4. Aspek lingkungan:

- Kelestarian lingkungan

### 2.2 Konsep Spasial Dalam Lingkup Wilayah

Konsep yang tidak ada dalam teori ekonomi adalah ruang, yang merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah, sehingga dikatakan analisis ekonomi berada pada alam tanpa ruang (*spaceless world*). Dalam konsep ilmu ekonomi belum menjelaskan “*di mana*” aktivitas produksi dilaksanakan walaupun dalam konteks produksi telah diterangkan tentang “*apa*”, “*berapa*”, “*bagaimana*”, “*untuk siapa*” dan “*bila mana*”.

Konsep spasial atau ruang mempunyai beberapa unsur-unsur, yaitu jarak, lokasi, bentuk dan ukuran yang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dengan segala kekayaannya membutuhkan organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah.

Hartchorne mengemukakan unsur hubungan fungsional diantara fenomena yang melahirkan konsep struktur fungsional tata ruang. Struktur fungsional bersifat subyektif, karena dapat menentukan fungsionalitas berdasarkan kriteria

subyektif. Whittlessey dalam Budiharsono (2001) memformulasikan pengertian tata ruang berdasarkan unit areal konkrit, fungsionalitas di antara fenomena, dan subyektifitas dalam penentuan kriteria.

Konsep jarak mempunyai dua pengertian, yaitu jarak absolut dan jarak relatif yang berkaitan dengan hubungan fungsionalitas diantara fenomena dalam struktur fungsional tata ruang. Dasar dan konsep ruang relatif adalah jarak relatif. Jarak relatif merupakan fungsi dari pandangan atau persepsi terhadap jarak. Dalam konsep ruang absolut, jarak diukur secara fisik, sedangkan dalam konsep ruang relatif, jarak diukur secara fungsional berdasarkan unit ongkos, waktu dan usaha (Hanafiah, 1996). Ide mendasar dari konsep ruang relatif adalah persepsi terhadap dunia nyata, yang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, psikologi dan sebagainya.

### **2.2.1 Pembangunan Ekonomi Berbasis Wilayah**

Rencana pengembangan wilayah yang dilaksanakan selama ini, hampir selalu bersifat *top-down*. Namun seiring perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, rencana pengembangan wilayah mengalami pergeseran ke arah *bottom up* yang berusaha mengakomodir keinginan dan kebutuhan dari wilayah yang direncanakan. Strategi pembangunan berbasis wilayah merupakan sebuah alternatif bagi rencana pengembangan wilayah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Ardani, 1992):

- 1) Strategi dan sistem pemrograman, dibuat fleksibel dengan melakukan proses *feed-back* berkesinambungan yang inheren agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan perekonomian yang selalu berubah.

- 2) Disiapkan untuk melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan pengembangan perekonomian wilayah untuk merumuskan strategi dengan membuat komite strategi yang beranggotakan stakeholder seperti pemerintah daerah, Kadin, perusahaan swasta, lembaga keuangan, koperasi, asosiasi, LSM, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan sebagainya.
- 3) Pembuatan program berdasarkan strategi, dan hasil dari implementasi program dijadikan masukan untuk strategi lebih lanjut yang merupakan bagian dari pelaksanaan mekanisme *self-generate* yang berkesinambungan.
- 4) Penekanan dilakukan pada proses maupun hasil-hasil perencanaan, implementasi dan feed-back.

Sumber daya andalan yang ada di suatu wilayah menjadi dasar strategi pembangunan ekonomi berbasis wilayah. Beberapa sumber daya yang diberi penekanan dalam pendekatan ini, adalah:

- a) Sumber daya pertanian; kehutanan dan perikanan,
- b) Sektor pariwisata; sumber daya alam, kultur, lansekap dan pemandangan kota (*townscape*),
- c) Kebudayaan termasuk status wilayah yang telah ditetapkan,
- d) Sumber daya manusia meliputi lembaga pendidikan dan penelitian.

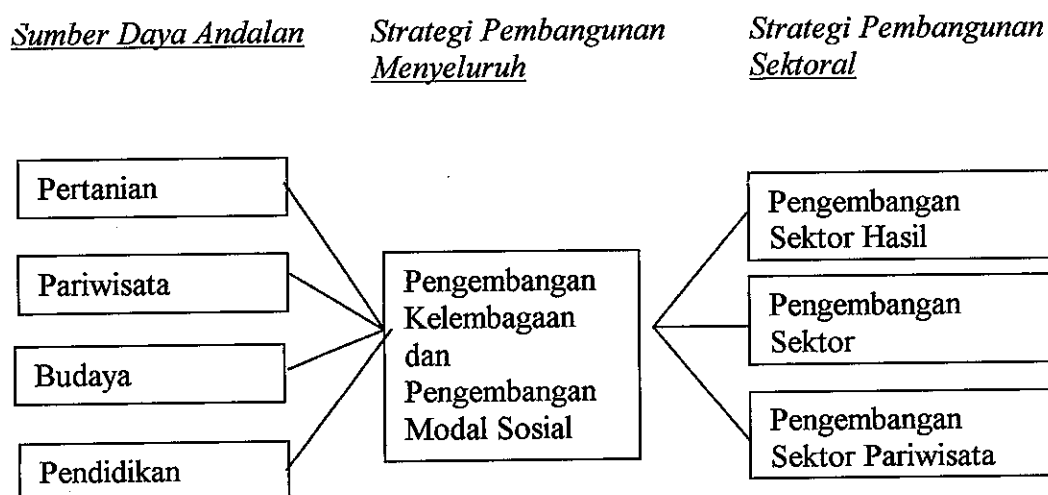
Adapun pedoman umum untuk mengarahkan pembangunan ekonomi berbasis wilayah adalah sebagai berikut :

- a) Penciptaan lapangan kerja untuk mengentaskan kemiskinan,
- b) Kesenambungan sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembangaan,
- c) Pembangunan desa dan kota yang seimbang melalui hubungan timbal balik,

- d) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pengembangan kemampuan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan,
- e) Peningkatan kultur setempat.

Pembangunan juga harus mempertimbangkan preservasi, penataan lansekap, dan pemandangan kota (*townscape*) untuk mempertahankan identitas masing-masing wilayah. Hal ini dimaksudkan mendorong masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan wilayah. Jaringan tipe-tipe modal sosial harus ditetapkan untuk mendukung tipe-tipe kegiatan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, berkaitan dengan alur informasi atau alur pergerakan, alur “horizontal” antar ibukota pada tingkat yang sama semakin penting di samping alur “vertikal” konvensional yang hanya menghubungkan antar ibukota pada level yang berbeda.

**GAMBAR 2.1**  
**STRATEGI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA LOKAL**  
**YANG DIANDALKAN**



Sumber : Ardani, 1992:9

Dalam rangka mengkonsolidasikan kegiatan pembangunan dan mempromosikan wilayahnya di dalam negeri ataupun di luar negeri (*region sales*), setiap wilayah dapat mencari simbol masing-masing yang menarik untuk menggambarkan arah pembangunannya. Secara spesifik strategi pembangunan dan sumber daya lokal yang diandalkan ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

### **2.2.2 Pengembangan Wilayah Berbasis Kompetisi**

Eksistensi suatu wilayah akan ditentukan oleh kemampuan menciptakan basis keunggulan dalam persaingan ekonomi antar wilayah. Paradigma baru dalam strategi pengembangan wilayah adalah memenangkan persaingan antar wilayah. Persaingan antar wilayah merupakan fenomena tersendiri dalam dinamika perekonomian dewasa ini (Alkadri, 1999).

Pengembangan wilayah mempunyai tiga pilar yang merupakan basis untuk memenangkan persaingan antar wilayah, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi. Sementara itu, ada pula tiga fenomena yang berperan penting dalam peningkatan intensitas persaingan antar wilayah, yakni trend perdagangan global (*global trade*), kemajuan teknologi (*technology progress*) dan perubahan dalam sistem kemasyarakatan (*society system*), yang menuntut adanya suatu paradigma baru dalam pengembangan wilayah, jika tidak ingin tersisih dari persaingan.

Pembangunan ekonomi selama ini hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan keunggulan komperatif berupa kekayaan alam yang melimpah dan tenaga kerja yang murah. Keadaan yang seperti ini tidak akan menjamin keberlanjutan wilayah tersebut. Paradigma baru pembangunan harus

dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai daya saing yang tinggi.

Porter dalam Alkadri (1999) menggambarkan bahwa faktor keunggulan komperatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi. Namun, setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus, yaitu *inovasi*. Suatu wilayah bisa meraih keunggulan daya saing melalui empat hal, yaitu :

- Keunggulan faktor produksi
- Keunggulan inovasi
- Kesejahteraan masyarakat dan
- Besarnya investasi.

### 2.2.3 Pengembangan Ruang Terpadu

Jalan tengah antara pendekatan sentralisasi yang menekankan pertumbuhan di wilayah pusat kota (kota utama) dan desentralisasi yang menekankan pada penyebaran investasi pada wilayah belakang (perdesaan) adalah pendekatan terpadu yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan yang dilaksanakan berdasarkan pertumbuhan berimbang. Menurut Rondinelli (1985), pendekatan terpadu dalam lingkup spasial adalah untuk mencari alternatif strategi pendekatan pengembangan dengan tujuan menyebarkan dan mendorong pertumbuhan wilayah belakang dan membawa wilayah tersebut ikut berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan.

Selanjutnya Rondinelli (1985) mengemukakan pendapatnya dalam kaitannya dengan upaya pengembangan wilayah secara merata ini:

- (a) Strategi harus diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh sistem ekonomi dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi pertumbuhan perkonomian

wilayah agar secara langsung dapat meningkatkan produktifitas, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk wilayah belakang.

- (b) Agar wilayah perdesaan memiliki akses seluas-luasnya bagi usaha pengembangannya, maka investasi yang cenderung dipusatkan di kota utama harus didesentralisasikan ke wilayah-wilayah yang mampu berfungsi sebagai pusat-pusat fasilitas pelayanan, pemasaran, distribusi dan transformasi bagi penduduk sekitarnya. Dengan demikian wilayah perkotaan dan perdesaan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi,
- (c) Fungsi dan peran permukiman ditentukan berdasarkan kegiatan pelayanan dan lingkup pelayanannya. Pada prinsipnya, merupakan sistem pusat-pusat pelayanan yang disusun secara hierarkhis berdasarkan karakteristik fungsi dan peranan permukimannya. Dalam kerangka tata ruang regional, permukiman ditempatkan dalam suatu sistem yang secara fungsional saling berkaitan dan terintegrasi.

## **2.3 Dikotomi Dalam Perencanaan**

### **2.3.1 Pertumbuhan vs Kesejahteraan**

Dikotomi pertumbuhan vs kesejahteraan ini merupakan pilihan pasangan antara mencapai tingkat pertumbuhan yang maksimum dengan pendistribusian kembali pendapatan yang diperoleh untuk daerah-daerah yang kurang beruntung, dalam hal ini daerah-daerah yang kurang berkembang. Kebutuhan untuk mempercepat laju pembangunan, harus ada pada daerah-daerah yang tidak/kurang berkembang dan pemerintah harus bisa menstimulasi pembangunan di wilayah ini

dalam jangka waktu tertentu agar wilayah ini mampu mengejar ketertinggalannya dan mencapai tingkat hidup yang sepadan dengan daerah yang lainnya.

Dalam dikotomi ini, diasumsikan bahwa daerah yang tidak berkembang akan mendapat keuntungan secara otomatis dari "*trickle down effect* atau *spread effect*" melalui penyetaraan pendapatan dari keuntungan investasi yang diperoleh wilayah yang lebih tinggi income-nya. Namun belakangan, para ahli ekonomi berpendapat bahwa pendistribusian pendapatan ini pada akhirnya hanya akan menjadikan daerah yang tidak berkembang semakin tertinggal dan sempurnanya penyebaran kemiskinan karena yang harus dilakukan adalah meningkatkan volume total sumber daya yang dimiliki.

Bukti dari kerja otomatis *spread effect* yang gagal dalam pertumbuhan ekonomian adalah semakin lebarnya gap kesejahteraan antara daerah berkembang dengan daerah yang tidak berkembang. Di sisi lain, kecenderungan untuk menabung di daerah tidak berkembang sangat kecil dibandingkan dengan di daerah yang maju dan berkembang.

Pertimbangan terhadap efisiensi perekonomian dan penekanan terhadap program-program pembangunan, membuat pemerintah cenderung melakukan pendistribusian pendapatan dalam jangka pendek. Dengan cara ini, isinya terlihat cukup meyakinkan, tetapi berbagai dilemma yang dihasilkan akan buruk sekali. Dikotomi pertumbuhan vs kesejahteraan ini tampaknya merupakan sebuah pemaksaan komitmen dari satu posisi terhadap posisi lainnya, terutama kebijakan dan program-program yang dilakukan oleh pemerintah.



Sedikitnya ada tiga kesalahan yang dapat dipelajari dari dikotomi ini yaitu:

- i. Penilaian utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan komunitas dan keluarga
- ii. Pemerataan pendapatan dalam masyarakat bukanlah proses yang otomatis, tetapi harus dilakukan dengan tindakan positif dalam jangka waktu tertentu
- iii. Kebijakan yang diterapkan bukanlah suatu pilihan antara pertumbuhan dan kesejahteraan, melainkan seberapa efektif dapat menstimulasi tantangan transformasi ekonomi di wilayah-wilayah pembangunan.

### **2.3.2 Ketidakseimbangan vs Keseimbangan**

Pembangunan yang terpusat pada tingkat pendapatan masyarakat tinggi (daerah inti) dibandingkan dengan usaha-usaha pembangunan yang secara esensial sama pada seluruh bagian ruang perekonomian merupakan dikotomi ketidakseimbangan vs keseimbangan. Konsep tentang dikotomi ini dikristalisasi oleh Albert Hirschman (1958) yang dikenal dengan “ketidakseimbangan yang terkontrol” yang bertujuan menemukan kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi.

Hirschman mengatakan bahwa ketidakseimbangan cenderung akan mengoreksi dirinya sendiri dengan berbagai macam mekanisme pasar dan non pasar. Proses ini sangat banyak membutuhkan sumber daya dan investasi, dibandingkan dengan pertumbuhan yang seimbang. Menurut Hirschman, analisis proyek investasi yang prospektif, yang terpenting harus mencoba mengevaluasi

efek-efeknya terhadap keputusan pembangunan dari pada (secara konvensional) hanya terkonsentrasi pada out-put dan produktivitas sendiri.

Kesulitan utama ketidakseimbangan masih tetap pada bagaimana pembuatan kebijakan dapat mengetahui apakah dia sedang berada pada batas tepi, atau ketidakseimbangan optimal yang ada hanya menjadi efisiensi biasa. Karenanya konsep Hirschman ini tidak bisa diterapkan langsung terhadap masalah-masalah mendesak yang memerlukan keputusan yang pasti. Penekanan terhadap proses perencanaan investasi masa depan dan secara eksplisit dipertimbangkan dalam relevansinya dengan masa sekarang merupakan nilai utamanya.

Keseimbangan hanyalah sebuah parameter bagi kebijakan dengan tujuan utama mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Walaupun demikian, kriteria simplistik mengenai keseimbangan masih belum cukup kuat mengatasi kesamaran. Konsep keseimbangan optimal atau terkontrol menjadi tidak jelas dan akhirnya akan mendatangkan kerancuan.

Kerancuan yang terjadi pertama adalah masalah wilayah. Mempertahankan keseimbangan apapun jenisnya, sulit jika wilayah unit yang dikaji menjadi kecil. Akan tetapi kelompok daerah harus tetap disebutkan jika ingin mengukur tingkat keseimbangannya karena keseimbangan dengan jenis yang sama tidak akan dapat dicapai oleh semua daerah pada waktu yang bersamaan pula. Persoalan yang muncul adalah bagaimana cara mempertahankan keseimbangan dan kelompok mana yang harus diseimbangkan?

Kedua adalah apa yang harus diseimbangkan? Ukuran, waktu dan sektor-sektor yang harus diseimbangkan sangat berbeda dari masing-masing daerah atau wilayah. Sehingga apapun yang menjadi ukuran keseimbangan akan mempunyai implikasi kebijakan dan konsekuensi yang berbeda pula bagi pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah.

Namun, bagaimana pun kerancuan sering terjadi karena kriteria-kriteria keseimbangan yang berbeda-beda. Penting untuk mencari kebijakan-kebijakan pembangunan pengganti efek-efek yang terjadi pada kesejahteraan ekonomi. Perbedaan wilayah juga akan membedakan unsur-unsur politis dalam kebijakan yang akan memunculkan bahaya pada proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi terutama akan memunculkan konflik ketidakseimbangan dan ketidakadilan.

### **2.3.3 Pemusatan vs Penyebaran**

Dikotomi yang ada sebelumnya merupakan hal yang keliru karena tidak memasukkan ruang atau lebih tepatnya wilayah dalam konsep tersebut. Llyod Rodwin menyarankan strategi “desentralisasi terpusat” yang memandang perlunya memasukkan wilayah ke dalam proses pembangunan yang merupakan kriteria bagi kebijakan pembangunan daerah. Rodwin tetap melihat kegagalan perekonomian yang tidak mampu membuat keseimbangan dengan kekuatan dan sumber daya sendiri. Di sisi lain, ia juga menggunakan ketidakseimbangan dalam memperdebatkan pemusatan sumber daya tertentu pada pergerakan daerah inti.

Rodwin berusaha menggabungkan kriteria-kriteria dikotomi yang ada sebelumnya. Pada saat menyarankan pemusatan, Rodwin juga mendukung

ketidakseimbangan ruang perekonomian, mendukung keseimbangan dengan mengajukan desentralisasi tentang program pembangunan untuk daerah inti baru melalui penciptaan hubungan ekonomi secara bersama yang bersifat esensial terhadap proses pertumbuhan seperti kebijakan umum yang biasa berlaku. Namun, ia tidak membedakan wilayah-wilayah pembangunan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kebijakan regional yang efektif sebagai suatu system harus dapat membahas masalah pembangunan daerah inti secara bersamaan dengan wilayah-wilayah batas (*periphery*) dan wilayah pengaruhnya (*hinterland*).

#### **2.3.4 Keseimbangan Ruang Sebagai Model Alternatif**

Ketidakseimbangan terjadi pada masyarakat tradisional sejak awal. Pada masa revolusi industri dan teknologi, ketidakseimbangan menjadi permanen. Perubahan-perubahan permintaan dan kondisi pasokan yang sangat cepat dengan konsekuensi yang juga sangat besar dan tidak bisa dianggap sebagai marjinal. Keseimbangan diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir disparitas yang lebar pada tingkat laba dan pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah.

Akan tetapi, keseimbangan yang disebutkan dalam teori-teori yang ada, pada kenyataannya selalu berantakan. Bahkan industrialisasi dan perkembangan teknologi serta pesatnya pertumbuhan ekonomi yang berlangsung, terus menerus dipenuhi masalah-masalah klasik yang terdefresi dalam teritorial negara mana pun di dunia, yaitu daerah-daerah tidak berkembang/tertinggal/miskin.

Berbagai alasan kegagalan penyesuaian terhadap teori-teori keseimbangan, yang beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Kegagalan mengurangi laba di pusat
2. Kegagalan mempersepsi peluang-peluang investasi di daerah
3. Permintaan ekspor untuk barang-barang dikeluarkan di pusat
4. Koindensi pusat dengan pasar nasional
5. Lokasi empat pelayanan penting (keuangan, pendidikan, riset dan perencanaan) berada di pusat
6. Kemajemukan penduduk
7. Ketidakmampuan daerah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosio-ekonomi yang konstan di pusat

Meskipun pemerintah dapat menggunakan kemungkinan penggunaan teknologi yang ada untuk merubah struktur permintaan agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di daerah, namun hal ini jelas-jelas merupakan masalah perencanaan yang harus dimatangkan dan tidak tergesa-gesa. "Dampak Luas" dari Myrdal menjadi lebih kuat pada pembangunan ekonomi tinggi ketika membentuk "permintaan yang meningkat akan produk-produk dari wilayah belakang".

Secara keseluruhan, kekuatan tak terkendali dari ekonomi pasar yang dinamis akan mengarah ke penggabungan pusat dan daerah dalam mencapai keseimbangan pembangunan dan hasil-hasilnya. Barangkali, dalam kurun waktu yang amat panjang, ketika masyarakat memasuki era kemakmuran dan konsumsi massa (*mass consumption*), ketidakseimbangan dan ketidakadilan terutama secara regional, dapat dikurangi sampai pada tingkatan yang tidak signifikan.

## 2.5 Analisis Kebijakan

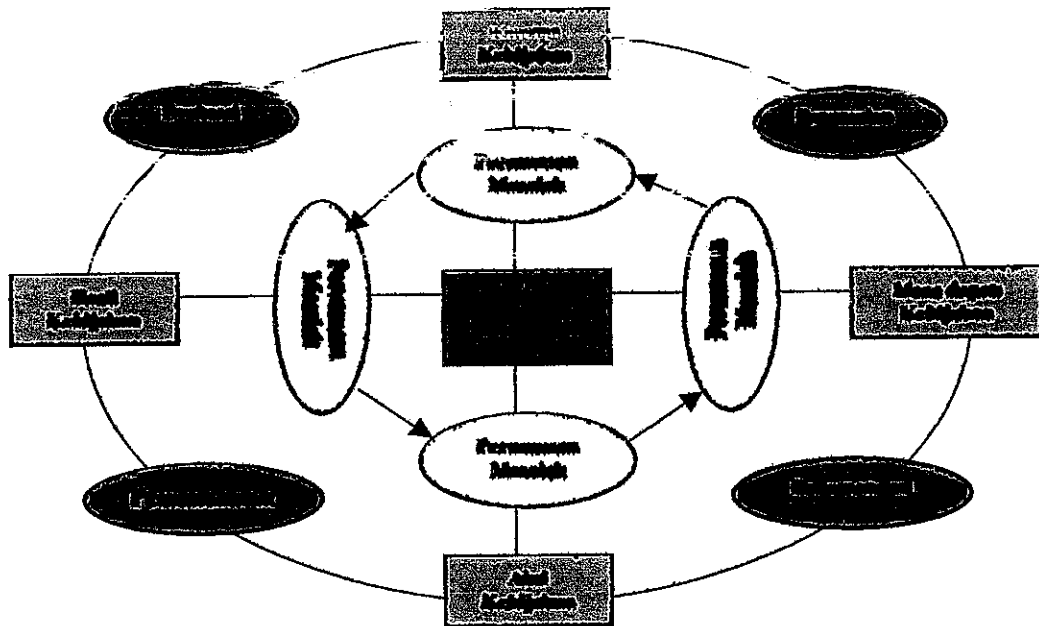
Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Dalam analisis kebijakan terdapat metode yang menggabungkan lima prosedur umum (Dunn, 2000) yaitu:

1. *Perumusan masalah* (definisi), menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. *Peramalan* (prediksi), menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.
3. *Rekomendasi* (preskripsi), menyediakan informasi mengenai nilai atau masalah.
4. *Pemantauan* (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
5. *Evaluasi*, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengentasan masalah.

Lima prosedur analisis kebijakan seperti tersebut di atas disajikan dalam Gambar 2.2.

Memahami metode dan teknik khusus, memungkinkan para analisis menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang masalah-masalah kebijakan, kebijakan dimasa mendatang, aksi-aksi kebijakan, hasil-hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan merupakan prosedur pokok untuk menganalisis kebijakan (Dunn, 2000).

## ANALISIS KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI PADA MASALAH



Sumber : (Dunn, 1999:21)

Menurut Leung (1971), ada tiga unsur penting yang terdapat dalam kebijakan yaitu:

1. Harus merupakan suatu keinginan dari urusan-urusan negara
2. Dilakukan secara sadar dengan maksud-maksud tertentu berupa keputusan dan tindakan
3. Dapat dikenal dan mempunyai hubungan yang erat antara keinginan dan urusan-urusan negara serta hubungan antara keputusan dan tindakan.

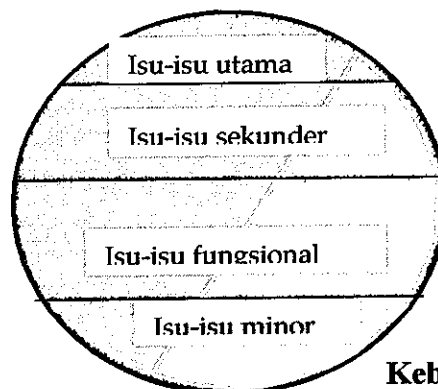
Menurut Dunn (2000), masalah-masalah kebijakan adalah kondisi obyektif yang keberadaannya dapat diciptakan dengan menentukan fakta-fakta apa yang

ada dalam suatu kasus. Sangat naif saat kita memandang ketika kita gagal mengenali fakta yang ada, bahkan diinterpretasikan secara berbeda oleh para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, informasi yang sama dan relevan dengan kebijakan dapat dan sering menghasilkan definisi-definisi dan penjelasan-penjelasan tentang masalah yang saling berbenturan. Hal ini bukan karena “fakta-fakta” tidak konsisten, melainkan para analisis kebijakan, pembuat kebijakan, dan pelaku kebijakan mempunyai asumsi-asumsi serta kepentingan yang sering bertentangan dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Selanjutnya masalah adalah barang abstrak yang timbul dengan mentransformasikan pengalaman kedalam penilaian manusia.

Masalah-masalah kebijakan benar-benar merupakan keseluruhan dari sistem masalah-masalah. Ini berarti bahwa isu-isu kebijakan sama kompleksnya. Kompleksitas isu-isu kebijakan dilihat dengan mempertimbangkan jenjang organisasi dimana isu-isu itu diformulasikan (Dunn, 2000). Untuk lebih jelasnya, kompleksitas isu-isu kebijakan dapat dilihat pada gambar 2.3.

**Gambar 23**  
**HIRARKI KEBIJAKAN**

**Kebijakan Strategis**



**Kebijakan Operasional**

*Sumber : Dunn, 2000:*



Isu-isu kebijakan diklasifikasikan sesuai dengan hirarki dari tipe-tipe yang ada. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Major issues* (Isu-isu utama)

Isu yang berhubungan dengan pertanyaan mengenai misi lembaga yang secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi.

2. *Secondary issues* (Isu-isu sekunder)

Isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program-program pemerintah pusat. Berisi prioritas-prioritas program dan definisi kelompok-kelompok sasaran dan penerima dampak.

3. *Functional issues* (Isu-isu fungsional)

Terletak antara tingkat program dan proyek, dan memasukan pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, keuangan dan usaha untuk memperolehnya.

4. *Minor issues* (Isu-isu minor)

Isu yang ditemukan paling sering terjadi pada tingkat-tingkat proyek spesifik meliputi personal, staff, keuntungan bekerja, waktu liburan, jam kerja, dan petunjuk pelaksanaan serta peraturan.

Bila hirarki isu-isu kebijakan naik, masalah-masalah menjadi saling tergantung, subyektif, artifisial, dan dinamis. Meskipun demikian, beberapa isu memerlukan kebijakan strategis, sementara yang lain meminta kebijakan operasional. Suatu kebijakan yang strategis (*strategic policy*) merupakan salah satu kebijakan yang konsekuensi dan keputusannya secara relatif tidak bisa dibalikkan. Kebijakan operasional (*operational policies*) adalah kebijakan yang merupakan konsekuensi dari keputusan-keputusan secara relatif dapat dibalik

ulang, tidak menimbulkan risiko dan ketidakpastian masa kini pada tingkat yang lebih tinggi (Dunn, 2000).

Masalah kebijakan terbagi dalam tiga kelas, yaitu masalah yang sederhana (*well-structured*), masalah yang agak sederhana (*moderately-structured*) dan masalah yang rumit (*ill-structured*). Struktur masing-masing kelas ini ditentukan oleh tingkat kompleksitasnya untuk melihat derajat seberapa jauh suatu masalah merupakan sistem permasalahan yang saling tergantung.

Masalah yang sederhana atau agak sederhana mengandung urutan pilihan yang transitif. Ini jarang dijumpai dalam lingkungan pemerintahan yang kompleks. Masalah yang rumit adalah masalah keputusan intransitif secara penuh, yaitu suatu masalah yang tidak mungkin untuk memilih alternatif kebijakan tunggal yang disukai oleh semua orang. Masalah yang rumit (*ill-structured problems*) adalah masalah-masalah yang mengikutsertakan banyak pembuat keputusan dan utilitas nilainya tidak diketahui atau tidak mungkin untuk diurutkan secara konsisten (Dunn, 2000).

Untuk memecahkan masalah rumit, analis dituntut berperan aktif dalam mendefinisikan hakekat dari masalah itu sendiri. Dalam mendefinisikan hakekat suatu masalah secara aktif, para analis seharusnya tidak hanya menghadapkan diri pada keadaan problematis, tetapi juga harus membuat penilaian dan pendapat secara kreatif.

## **2.5 Rangkuman Kajian Teori**

Dari begitu banyak teori-teori yang telah dikemukakan di atas, didapat rangkuman sesuai dengan permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian ini,

sehingga secara teoritis dapat menjawab pertanyaan dari penelitian yang akan dilakukan. Konsep-konsep pengembangan wilayah yang dilakukan adalah :

**1. Pusat-pusat pertumbuhan**

Bertujuan untuk membangkitkan daerah yang tidak berkembang atau daerah yang terbelakang, mendorong dekonsentrasi wilayah, memodifikasi sistem kota-kota dan mencapai keseimbangan perkembangan wilayah,

**2. Pengembangan ekonomi lokal**

Pada dasarnya pengembangan ekonomi lokal menganggap bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh kewiraswastaan lokal yang ditopang oleh kelembangaan yang ada di wilayah tersebut, meliputi semua *stakeholder* yang ada,

**3. Pengembangan ekonomi basis**

Mengembangkan sektor-sektor basis yang ada pada wilayah penelitian

**4. Pengembangan wilayah berbasis kompetisi**

Merupakan suatu pendekatan berdasarkan kebutuhan untuk memenangkan persaingan antar wilayah mengacu pada ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi serta inovasi,

**5. Pembangunan ekonomi berbasis wilayah**

Suatu pendekatan yang lebih komprehensif dengan betul-betul berdasarkan sumber daya andalan yang ada pada wilayah tersebut dengan melibatkan semua *stakeholder*,

## 6. Pengembangan ruang terpadu

Bertujuan mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi yang ada dengan keruangannya, terutama wilayah pusat dengan hinterlandnya.

Disamping itu, konsep-konsep tentang analisis kebijakan juga diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan yang telah ada di wilayah penelitian mampu mengakomodir keadaan dan kebutuhan daerah dan masyarakatnya dalam pembangunan pengembangan wilayah.

Dari berbagai teori pengembangan wilayah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah menyangkut aspek-aspek berikut, yaitu *aspek ekonomi, sosial budaya, fisik dan lingkungan* serta *kebijakan*.

### **BAB III**

## **TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN AGAM**

### **3.1 Gambaran Umum Kabupaten Agam**

Agam, sebuah kabupaten di Propinsi Sumatera Barat dengan luas 2.232,30 km<sup>2</sup>, yang berarti 5,29% dari luas Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 km<sup>2</sup> dan terletak antara 99°52' - 100°23' Bujur Timur dan 00°2' - 00°29' Lintang Selatan. Berada di ketinggian 2 – 1.031 meter di atas permukaan laut dengan pantai, gunung, danau, ngarai dan hamparan padang yang luas, menjadikannya sebagai sebuah daerah yang sangat elok. Suhu udaranya berkisar 20° - 30° C dengan kelembaban udara 88,09%, dan kecepatan angin berkisar antara 4 – 20 km/jam, memberikan kesejukan dan kenyamanan cuaca bagi masyarakatnya. Penyinaran matahari rata-rata 58%, memberikan sinar yang cukup baik untuk pertanian di daerah ini terutama untuk pertanian tanaman muda seperti padi dan sayur mayur yang memang menjadi komoditas andalan.

Kabupaten Agam mempunyai dua buah gunung yang berdiri kokoh menjaga daerah ini laksana dua raksasa yang membentenginya, yaitu Gunung Merapi di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dengan ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut dan Gunung Singgalang di Kecamatan IV Koto dengan ketinggian 2.877 meter di atas permukaan laut, serta sebuah danau dengan pemandangan yang indah yaitu Danau Maninjau seluas 9.950 ha dengan kedalaman mencapai 157 meter dan keliling sepanjang 66 km. Sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun, juga terdapat di semua kecamatan dengan

berbagai macam fungsi, mulai dari untuk kebutuhan rumah tangga (MCK), budidaya perikanan (keramba) dan pengairan lahan pertanian.

Daerah yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, 4 (empat) kecamatan perwakilan, dan 73 kenagarian ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota

Kabupaten Agam dalam perencanaannya terbagi menjadi Wilayah Pengembangan Agam Barat (terdiri dari Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Matur) dan Wilayah Pengembangan Agam Timur (Kecamatan IV Angkat Candung, Kecamatan Baso, Kecamatan Tiltang Kamang, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Banuhampu Sei. Puar, dan Kecamatan IV Koto). Wilayah Agam Timur berada di ketinggian 790 – 1.031 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Wilayah Agam Barat yang mempunyai batas langsung dengan Samudera Indonesia berada pada ketinggian 2 – 1.000 meter di atas permukaan laut. Kedua wilayah ini seolah-olah dibatasi oleh bukit-bukit yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya (Maninjau) dengan kelok 44 (empat puluh empat) yang meliuk-liuk di pinggang bukit tersebut sebagai jembatannya.

Untuk lebih jelasnya, Tabel III.1 menampilkan jumlah desa dan nagari yang ada di Kabupaten Agam tahun 2002.

**TABEL III.**  
**JUMLAH NAGARI DAN DESA DI KABUPATEN AGAM MENURUT KECAMATAN**  
**TAHUN 2002**

No	Kecamatan	Ibu. Kecamatan	Kenagarian	Desa		
				Swakarya	Swasembada	Jml
1	Tanjung Mutiara	Tiku	1. Tiku Utara	2	11	13
			2. Tiku Selatan			
2	Lubuk Basung	Lubuk Basung	3. Tiku Limo Jorong	1	30	31
			1. Lubuk Basung			
			2. Kampung Tengah			
			3. III Koto			
			4. Garagahan			
			5. Sitalang			
3	Tanjung Raya	Maninjau	6. Kampung Pinang	1	15	16
			7. Manggopoh			
			1. Bayur			
			2. Maninjau			
			3. III Koto			
			4. Koto Kaciak			
			5. II Koto			
4	Matur	Matur	6. Sungai Batang	1	13	14
			7. Tanjung Sani			
			1. Matur Mudik			
			2. Matur Hilir			
			3. Parit Panjang			
			4. Pantar Pauh			
5	IV Koto	Balingka	5. Lawang	-	20	20
			6. Tigo Balai			
			1. Koto Tuo			
			2. Koto Panjang			
			3. Sungai Landai			
			4. Balingka			
			5. Malalak			
6	Banuhampu Sei Puar	Sei Buluh	6. Guguk Tabek Sarajo	-	22	22
			7. Koto Gadang			
			8. Sianok			
			1. Sarik			
			2. Sungai Puar			
			3. Batu Palano			
			4. Padang Lawas			
			5. Ladang Lawas			

No	Kecamatan	Ibu Kecamatan	Kenagarian	Desa		
				Swakarya	Swasembada	Jml
			7. Padang Luar			
			8. Pakan Sinayan			
			9. Kubang Putih			
			10. Taluk			
			11. Cingkaring			
7	IV Angkat Candung	Biaro	1. Lambah	-	30	30
			2. Panampung			
			3. Ampang Gadang			
			4. Batu Taba			
			5. Balai Gurah			
			6. Biaro Gadang			
			7. Candung Koto Lawas			
			8. Lasi			
			9. Bukit Batabuh			
8	Baso	Baso	10. Pasir			
			1. Bungo Koto Tuo	-	17	17
			2. Simarasap			
			3. Padang Tarok			
			4. Koto Tinggi			
9	Tilatang Kamang	Pekan Kamis	5. Tabek Panjang			
			1. Koto Tengah	-	32	32
			2. Kapau			
			3. Gadut			
			4. Kamang Mudik			
			5. Kamang Hilir			
10	Palembayan	Palembayan	6. Magek			
			1. Baringin	3	14	17
			2. Sipinang			
			3. Sungai Puar			
			4. IV Koto Palembang			
			5. III Koto Silungkang			
11	Palupuh	Palupuh	6. Selaras Air			
			1. Koto Rantang	3	9	12
			2. Pasir Lawas			
			3. Pagadis			
			4. Nan Tujuh			
	<b>Jumlah</b>			11	213	224

Sumber : Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari, Kabupaten Agam, Tahun 2003



### **3.2 Karakteristik Pemanfaatan Ruang**

#### **3.2.1 Luas dan Penggunaan Lahan**

Pada dasarnya penggunaan ruang merupakan hasil akhir usaha manusia untuk menempati ruang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga penilaian suatu penggunaan tanah tidak dapat dijelaskan dengan kegiatan manusia (Muchtarram, "Analisa Pola Land Use dan Jaringan Jalan," dikutip dari *Perencanaan Pembangunan Desa*, Departemen Planologi ITB, 1976, halaman 1).

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Agam didominasi oleh perkebunan seluas 40.916,43 ha (22,474%) yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 26.082,81 ha (14,326%) dan perkebunan besar dengan luas 14.833,62 ha (8,148%) dan sawah seluas 37.211,38 ha (20,439%) yang terbagi pada sawah irigasi sebesar 5,25% atau 9.558,60 ha serta sawah tadah hujan 15,189% atau 27.652,78 ha. Penggunaan lahan yang cukup luas juga terlihat untuk permukiman yaitu 25.305,70 ha (13,90%) dan hutan seluas 24.085 ha atau 13,229%.

Luas pola penggunaan lahan lebih jelasnya ditunjukkan oleh Gambar 3.1. Tabel III.2 yang akan memperlihatkan penggunaan lahan per kecamatan dan Tabel III.3 menunjukkan luas penggunaan tanah menurut jenisnya pada kawasan budidaya dan kawasan lindung di Kabupaten Agam.

#### **3.2.2 Penyebaran Permukiman**

Penyebaran permukiman di Kabupaten Agam tidak merata. Pada umumnya berorientasi pada tempat di mana penduduk melakukan kegiatan usaha,

**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

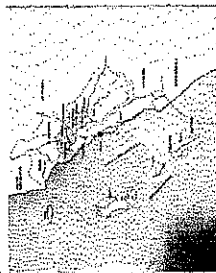
DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSIMPANGAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN AGAM

**PETA TATA GUNA LAHAN**

**KETERANGAN :**

-  IBU KOTA KABUPATEN
-  IBU KOTA KOTAMADYA
-  IBUKOTA KECAMATAN
-  BATAS KABUPATEN
-  BATAS KECAMATAN
-  JARINGAN JALAN
-  SUNGAI
-  DANAU
-  KEBUN
-  KEBUN CAMPURAN
-  SAWAH DAN PEKARANGAN
-  TEGALAN
-  HUTAN

**INSERT**



**SKALA**

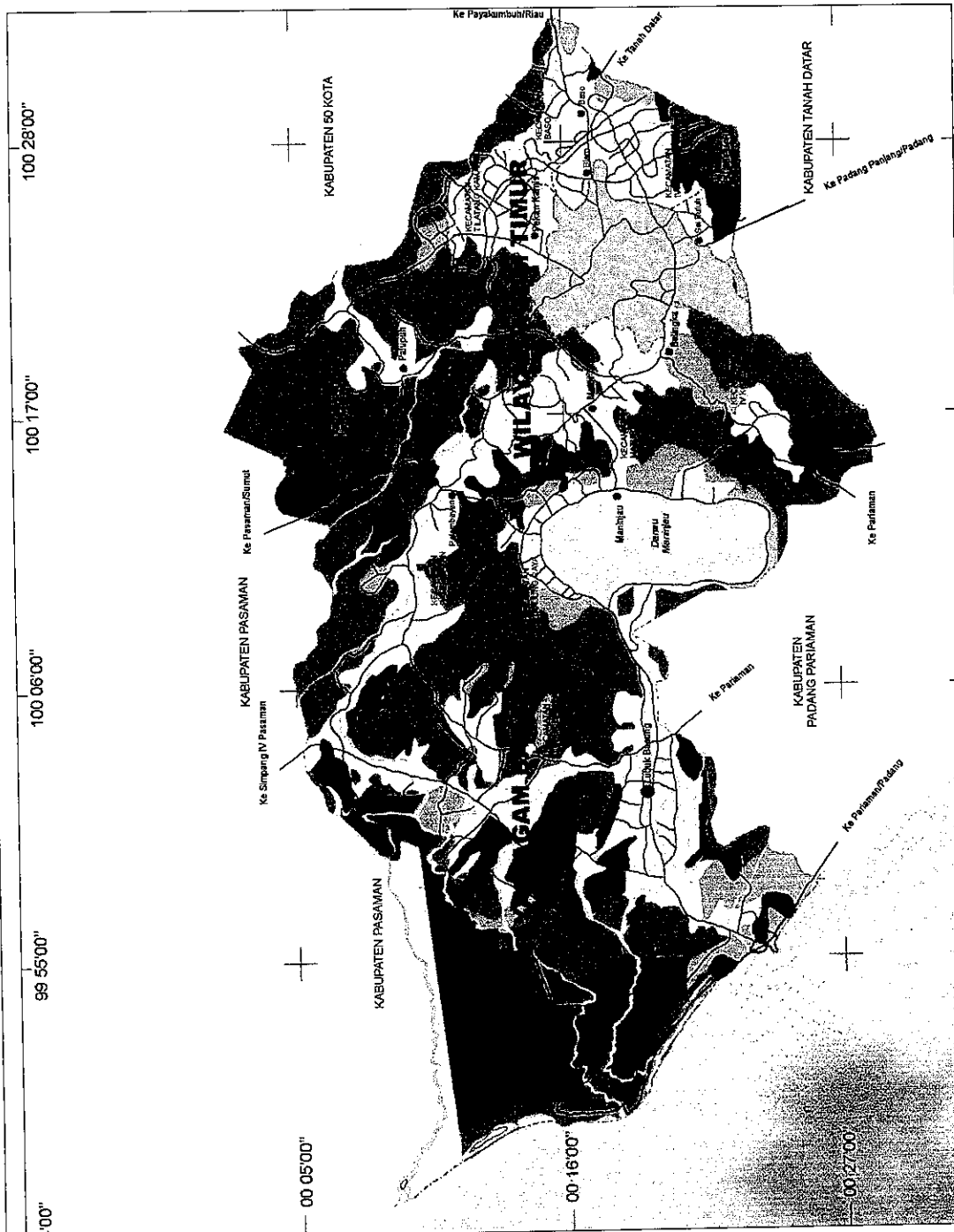
SKALA 1 : 500.000  
0 5 10 15 Km



**NOMOR**

Halaman	76
Gambar	3.1

SUMBER : BAPPEDA KABUPATEN AGAM, 2002  
SK DPRD TINGKAT II KABUPATEN AGAM  
No. 03/SP-DRPD/Ag-1995



# KABUPATEN AGAM

**TABEL III.2**  
**LUAS PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN AGAM MENURUT KECAMATAN (Ha)**  
**TAHUN 2001**

No	Kecamatan	Permukiman	Sawah		Tegalari	Kebun Campuran	Perkebunan		Hutan	Senyuk Belukar	Tanah Rusak	Irigasi	Padang Rumpit	Jumlah
			Irigasi	Tadah Hiri			Rakyat	Besar						
1	Tanjung Mutiara	1.346,24	677,00	2031,19	-	1.584,57	5.290,00	7.825,00	395,00	434,00	330,00	250,00	410,00	20.573,00
2	Lubuk Basung	6.944,80	1487,00	4464,20	-	3.706,00	9.659,00	2.163,62	4.290,00	1.767,00	-	-	755,00	35.236,62
3	Tanjung Raya	2.161,74	1413,00	4238,74	-	3.533,52	-	-	1.899,00	385,00	-	10.772,00	-	24.403,00
4	Matur	1.657,04	517,00	1552,22	556,00	789,74	1.230,00	175,00	2.355,00	370,00	17,00	-	155,00	9.374,00
5	IV Koto	770,84	456,50	1369,36	1.250,00	1.704,30	4.514,00	-	5.968,00	819,00	-	-	469,00	17.321,00
6	Banuhampu Sei Puar	1.417,44	596,50	1775,52	280,00	515,54	1.086,00	-	1.064,00	247,00	292,00	-	-	7.274,00
7	IV Angkat Candung	2.509,74	907,40	2718,95	-	422,10	726,81	-	790,00	175,00	45,00	-	-	8.295,00
8	Baso	1.203,14	414,00	229,16	352,00	2.250,00	42,00	-	1.203,00	144,00	47,00	-	144,90	6.029,20
9	Tilatang Kantang	5.558,34	1006,00	3019,10	432,75	747,41	-	-	3.600,00	2.609,00	-	-	594,00	17.566,60
10	Palenbayan	1.215,04	1357,00	4071,88	710,00	2.097,08	2.100,00	4.670,00	1.077,00	4.435,00	-	-	3.550,00	25.283,00
11	Palupuh	521,34	727,20	2182,46	48,00	414,00	1.435,00	-	1.444,00	3.180,00	-	-	755,00	10.707,00
	Jumlah Tahun 2001	25.305,70	9.558,60	27.652,78	3.628,75	17.764,26	26.082,81	14.833,62	24.085,00	14.565,00	731,00	11.022,00	6.832,90	182.062,42
	Tahun 2000	23.281,00	9.560,20	28.666,98	3.628,75	17.694,36	25.522,81	34.306,00	46.884,00	15.105,00	731,00	11.022,00	6.827,00	223.229,10
	Tahun 1999	23.258,82	9.560,20	28.679,75	3.628,75	17.631,78	25.052,81	34.306,00	47.104,00	15.426,00	731,00	11.022,00	6.827,00	223.228,11
	Tahun 1998	23.187,24	9.560,20	28.675,62	3.628,80	17.699,43	22.203,81	34.306,00	48.688,00	16.650,00	731,00	11.022,00	6.827,90	223.220,00
	Tahun 1997	23.183,39	9.560,20	29.685,80	3.628,80	17.703,91	22.203,00	34.106,00	48.688,00	16.890,00	731,00	11.022,00	6.827,90	224.230,00

Sumber : Agam Dalam Angka , BPS Kabupaten Agam, 2001

yang dalam hal ini didominasi oleh kegiatan pertanian, perkebunan, perdagangan/ jasa dan industri kecil/kerajinan. Di samping itu, penyebaran permukiman juga berorientasi pada infrastruktur yang ada.

**TABEL III.3**  
**LUAS PENGGUNAAN TANAH MENURUT JENISNYA**  
**PADA KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA**  
**DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2001 (Ha)**

No	Jenis Penggunaan Tanah	Kawasa Lindung	Kawasan Budidaya	Jumlah
1	Perumahan, jasa dan industri	930.85	22,350.15	23,281.00
2	Sawah Irigasi	1,790.00	7,770.20	9,560.20
3	Sawah Tadah Hujan	3,809.32	24,857.66	28,666.98
4	Tegalan/ Ladang	1,110.00	2,578.75	3,688.75
5	Kebun Campuran	9,505.52	8,188.84	17,694.36
6	Perkebunan Rakyat	9,564.81	15,958.00	25,522.81
7	Perkebunan Besar	24,595.00	9,711.00	34,306.00
8	Hutan	46,884.00	-	46,884.00
9	Semak Belukar/ Alang-alang	2,255.00	12,850.00	15,105.00
10	Tanah Kosong	-	-	-
11	Tanah Tandus	41.00	690.00	731.00
12	Perairan Darat	-	11,022.00	11,022.00
13	Sawah Pasang Surut	-	-	-
14	Padang Rumput	160.00	6,667.90	6,827.90
15	Tanah Rusak	-	-	-
16	Galian C	-	-	-
17	Lain-lain	-	-	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>100,645.50</b>	<b>122,644.50</b>	<b>223,290.00</b>
	Tahun 2000	100,645.50	122,584.50	223,230.00
	Tahun 1999	100,865.50	122,304.50	223,170.00
	Tahun 1998	100,865.50	122,364.50	223,230.00
	Tahun 1997	100,865.50	122,364.50	223,230.00

Sumber : BPN Kabupaten Agam, Tahun 2001

**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

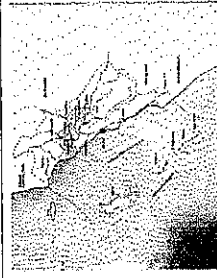
DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN AGAM

**PETA PENYEBARAN PERMUKIMAN**

**KETERANGAN :**

- IBU KOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KOTAMADYA
- IBUKOTA KECAMATAN
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- JARINGAN JALAN
- SUNGAI
- DANAU
- ▨ KEPADATAN TINGGI
- ▩ KEPADATAN SEDANG
- KEPADATAN RENDAH

**INSERT**



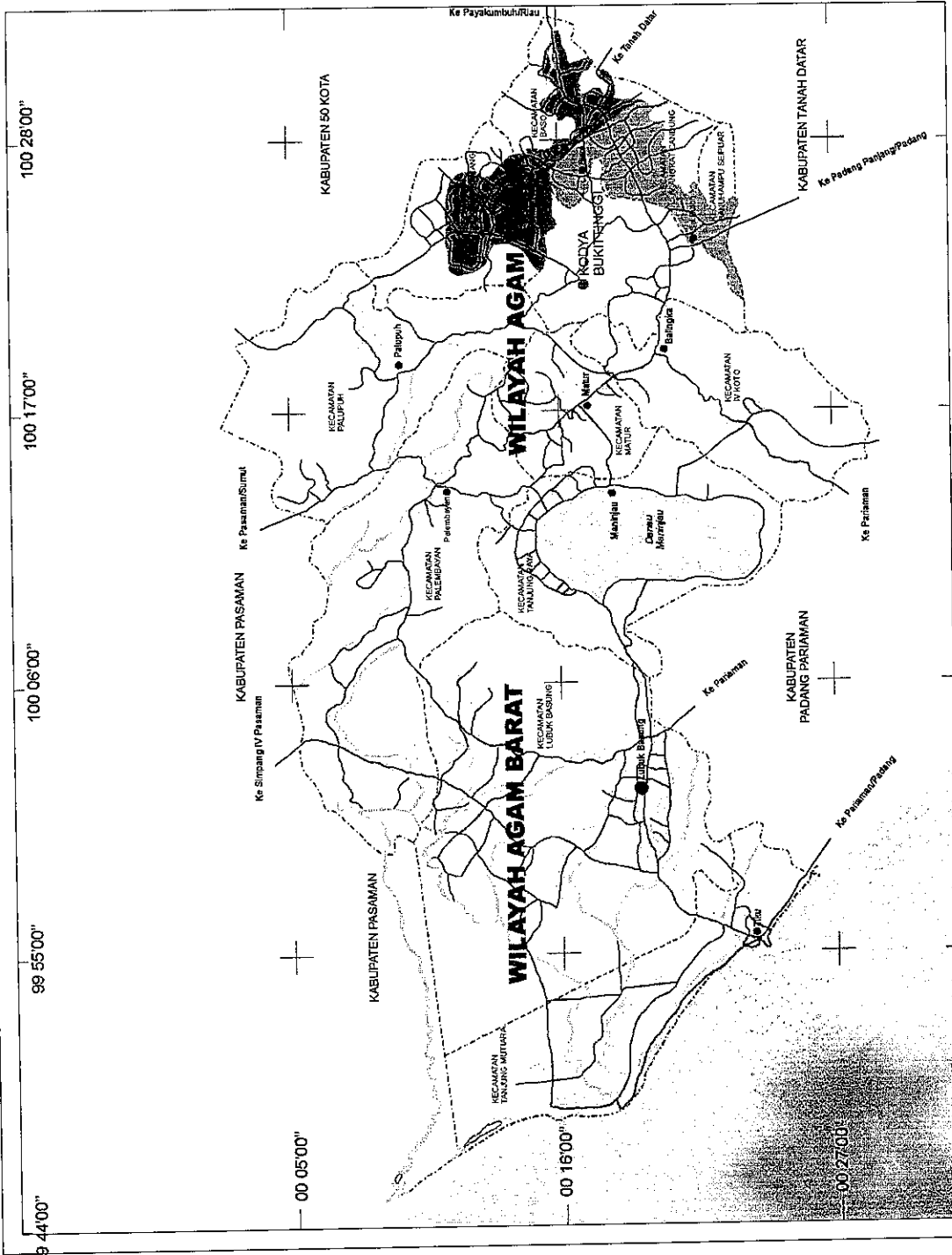
**SKALA**



**NOMOR**

Halaman 79  
Gambar 3.2

SUMBER : BAPPEDA KABUPATEN AGAM, 2002  
SK DPRD TINGKAT II KABUPATEN AGAM  
No. 03/SP-DPRD/Ag-1995



# KABUPATEN AGAM

Dari Gambar 3.2 diperlihatkan penyebaran permukiman yang ada di kabupaten ini. Pola penyebaran tersebut pada umumnya mendekati tempat-tempat di mana mereka melakukan kegiatan usahanya. Konsentrasi permukiman penduduk cenderung mendekati tempat-tempat kegiatan yang merupakan basis perekonomiannya (R.J. Green, *Country Planning, The Future of The Rural Regions*, Manchester University Press, 1971, halaman 41). Sedangkan menurut Whitby dan kawan-kawan bahwa pola penyebaran permukiman akan mengambil lokasi yang efisien, mempunyai tingkat kemudahan yang tinggi ke tempat-tempat bekerja (M.C. Whitby et al., *Rural Resource Development*, London, Methuan & Co Ltd., 1974, halaman 162).

### 3.2.3 Jaringan Jalan

Jaringan merupakan prasarana perhubungan yang merupakan salah satu panunjang terjadinya pergerakan. Pola jaringan jalan yang baik adalah yang dapat menghubungkan berbagai kegiatan. Dalam hal ini, jaringan jalan berfungsi untuk :

- memperlancar hubungan dalam proses pengumpulan dan interaksi kegiatan-kegiatan produksi
- memperlancar hubungan proses penyebaran kebutuhan manusia
- memperlancar hubungan dalam memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat.

Kelancaran hubungan tersebut di atas menyangkut pergerakan orang dan barang.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan di sektor perhubungan, maka kondisi jalan yang ada harus ditingkatkan karena akan menentukan tingkat kemudahan

bagi daerahnya (Poernomosidhi Hadjisarosa, *Teori dan Strategi Pengembangan Wilayah*, ITB, halaman 13).

Jaringan jalan yang sudah ada di Kabupaten Agam belum tersebar dengan merata, terutama di Wilayah Agam Barat. Tingkat kondisi jalan pun belum semuanya baik. Beberapa kecamatan dilalui oleh jalan negara yang menghubungkan kabupaten tersebut dengan kabupaten atau propinsi lainnya.

Panjang jalan di Kabupaten Agam didominasi oleh jalan kabupaten sepanjang 1.219,9 km (85,826%), jalan propinsi sepanjang 124,97 km (8,792%) dan jalan negara sepanjang 76,5 km (5,382%). Tabel III.4 memperlihatkan panjang jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten yang terdapat di Kabupaten Agam tahun 2001. Tabel III.5 memberikan gambaran tentang jenis dan kualitas jalan pada tahun 2001 yang sebagian besar sudah berkualitas baik dengan konstruksi aspal (55,59%). Jalan dengan konstruksi tanah masih cukup besar (24,73%), dan jalan dengan konstruksi kerikil (19,68%).

**TABEL III.4**  
**PANJANG JALAN NEGARA, PROPINSI DAN KABUPATEN MENURUT**  
**KECAMATAN DI KABUPATEN AGAM**  
**TAHUN 2001**

No.	Kecamatan	Panjang Jalan (km)			Jumlah (km)
		Negara	Propinsi	Kabupaten	
1.	Tanjung Mutiara	-	12,60	89,80	102,40
2.	Lubuk Basung	-	46,15	233,20	279,35
3.	Tanjung Raya	-	22,50	94,20	116,70
4.	Matur	-	14,00	107,90	121,90
5.	IV Koto	-	8,72	115,20	123,92
6.	B. Sei. Puar	14,50	3,88	54,00	71,50
7.	IV A. Candung	7,00	-	125,20	132,20
8.	Baso	11,50	8,50	53,00	73,00
9.	Tilatang Kamang	8,00	-	144,60	152,60
10.	Palembayan	-	9,50	122,10	131,60
11.	Palupuh	35,50	-	80,70	113,20
	J U M L A H	76,50	124,97	1.219,90	1.421,37

Sumber : Dinas PU Kabupaten Agam, 2002

**TABEL III.5**  
**PANJANG JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN**  
**DI KABUPATEN AGAM**  
**TAHUN 2001**

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan (km)			Jumlah (km)
		Aspal	Kerikil	Tanah	
1.	Tanjung Mutiara	47,90	28,30	33,60	109,80
2.	Lubuk Basung	97,10	60,10	88,00	245,20
3.	Tanjung Raya	66,00	25,20	3,30	94,50
4.	Matur	52,50	25,70	32,70	110,90
5.	IV Koto	76,40	25,30	14,50	116,20
6.	Banuhampu S. Puar	59,07	7,50	10,20	76,77
7.	IV Angkat Candung	97,00	29,90	24,10	151,00
8.	Baso	66,00	2,10	17,70	85,80
9.	Tilatang Kamang	105,30	21,30	78,80	205,40
10.	Palembayan	97,80	16,20	21,10	135,10
11.	Palupuh	21,70	37,00	32,00	90,70
<b>J U M L A H</b>		<b>786,77</b>	<b>278,60</b>	<b>356,00</b>	<b>1.421,37</b>

Sumber : Dinas PU Kabupaten Agam, 2002

Lebih jelasnya mengenai jaringan jalan di Kabupaten Agam dapat dilihat pada Gambar 3.3.

### 3.3 Perkembangan Sosial Ekonomi

#### 3.3.1 Kependudukan

##### 3.3.1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam tahun 2001, penduduk Kabupaten Agam tahun 2001 berjumlah 418.837 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 200.369 jiwa dan 318.468 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten ini berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 dan tahun 2000 adalah sebesar 0,18%.

Kecamatan Lubuk Basung merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 78.749 jiwa, tapi bukan yang terpadat. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Banuhampu Sungai Puar yang mencapai 733 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Palupuh merupakan kecamatan yang paling



**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

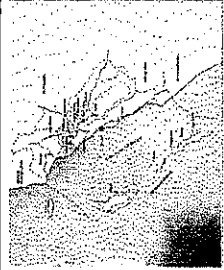
**DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN AGAM**

**PETA JARINGAN JALAN**

**KETERANGAN :**

- IBU KOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KOTAMADYA
- IBUKOTA KECAMATAN
- ▬ BATAS KABUPATEN
- ▬ BATAS KECAMATAN
- ▬ JARINGAN JALAN
- ▬ SUNGAI
- ▭ DANAU

**INSERT**



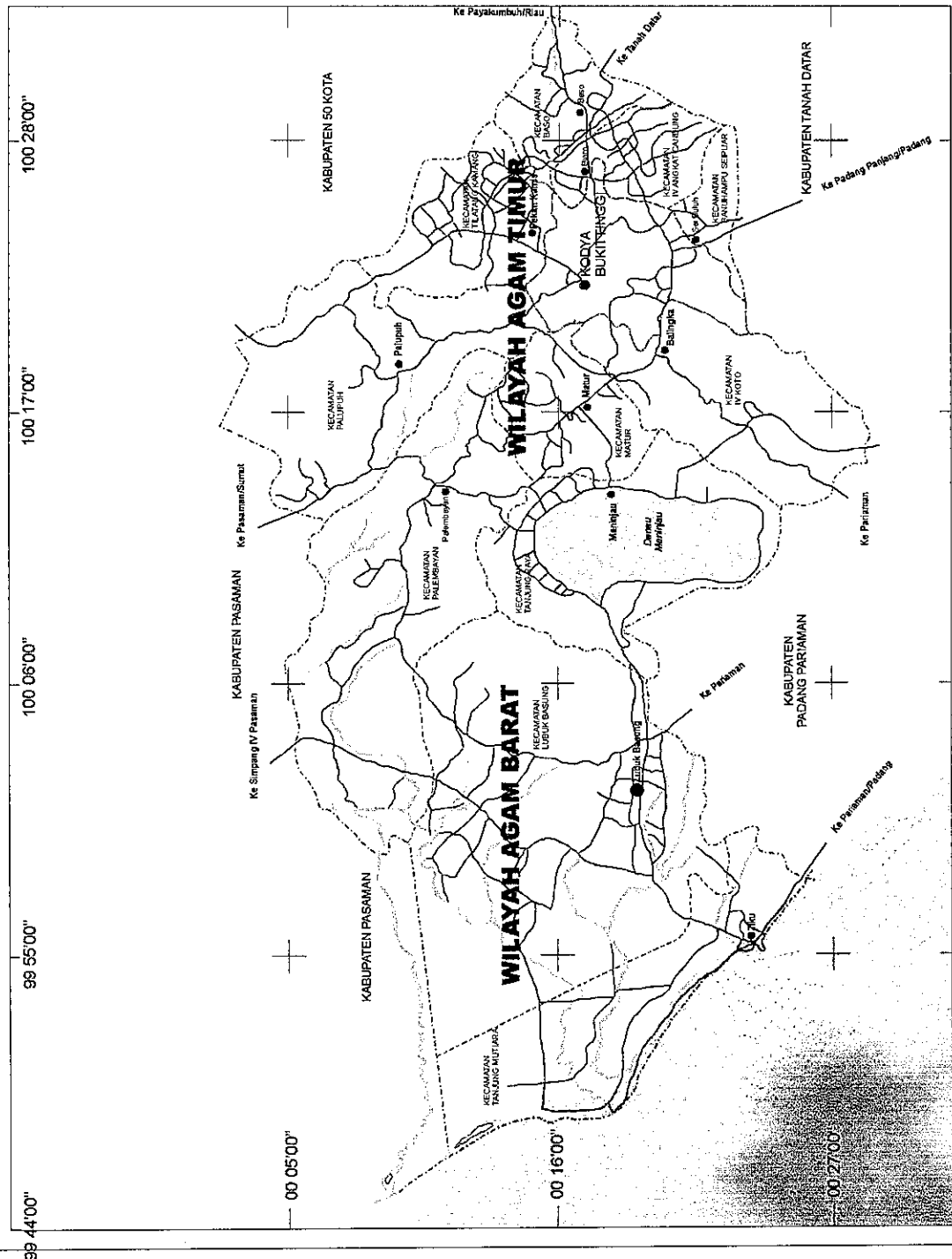
**SKALA**



**NOMOR**

Halaman	Gambar
83	3.3

SUMBER : BAPPEDA KABUPATEN AGAM, 2002  
SK DPRD TINGKAT II KABUPATEN AGAM  
No. 03/SP-DPRD/Agas-1995



# KABUPATEN AGAM

sedikit penduduknya yaitu sebesar 12.734 jiwa dan sekaligus terjarang atau kepadatan penduduknya paling rendah yang hanya 54 jiwa/km<sup>2</sup>. Mengenai jumlah dan kepadatan penduduk serta luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Agam tahun 2001 dapat dilihat pada Tabel III.6.

**TABEL III.6**  
**LUAS WILAYAH, RUMAH TANGGA,**  
**JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK**  
**DI KABUPATEN AGAM**  
**TAHUN 2001**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Rumah Tangga	Penduduk			Kepadatan Per km <sup>2</sup>
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Tj. Mutiara	250,73	5.157	12.281	12.566	24.847	120,77
2.	Lubuk Basung	547,09	18.749	38.683	40.066	78.749	143,94
3.	Tanjung Raya	244,03	7.292	14.237	15.426	29.663	121,55
4.	Matur	93,69	4.688	8.606	9.594	18.200	194,26
5.	IV Koto	173,21	4.810	15.220	17.620	32.840	189,60
6.	Bnh.Sei. Puar	72,74	11.231	24.833	28.504	53.337	733,26
7.	IV. A. Cndng	82,95	13.763	26.510	29.807	56.317	678,93
8.	Baso	70,30	8.680	15.361	16.788	32.149	457,31
9.	Til. Kamang	155,67	12.930	23.707	26.932	50.639	325,30
10.	Palembayan	349,81	7.309	14.562	14.800	29.362	83,94
11.	Palupuh	237,08	3.121	6.369	6.365	12.734	53,71
	<b>J U M L A H</b>	<b>2.232,30</b>	<b>97.730</b>	<b>200.369</b>	<b>218.468</b>	<b>418.837</b>	<b>187,63</b>

Sumber : *Badan Pusat Statistik, Kabupaten Agam, 2002*

Penyebaran penduduk di Kabupaten Agam tidak merata di tiap kecamatan dan cenderung beraglomerasi ke pusat-pusat perumbuhan atau pusat kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk yang besar pada umumnya adalah kecamatan yang berada di sekitar Kota Bukittinggi atau yang berada di Wilayah Agam Timur seperti Kecamatan IV Angkat Candung, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan dan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Tabel III.7 akan memperlihatkan presentase penyebaran penduduk yang dirinci menurut kecamatan dalam kurun sepuluh tahun terakhir.

**TABEL III -  
PRESENTASE PENYEBARAN PENDUDUK PER KECAMATAN  
DI KABUPATEN AGAM  
TAHUN 1992 - 2001**

No.	Kecamatan	Tahun								
		1992	1993	1994	1995	1996	1998	1999	2000	2001
1.	Tj. Mutiara	5.21	5.23	5.23	5.23	5.17	5.20	5.21	5.95	5.93
2.	Lb. Basung	18.07	18.16	17.86	18.16	17.57	17.66	17.6	18.85	18.66
3.	Tj. Raya	7.81	7.84	8.02	7.84	7.66	7.61	7.57	7.12	7.08
4.	Matur	4.81	4.83	4.78	4.83	4.85	4.77	4.64	4.29	4.34
5.	IV Koto	8.61	8.65	8.70	8.65	8.60	8.68	8.62	7.81	7.84
6.	Bnh. S. Puar	11.81	11.87	11.87	11.87	12.04	12.12	12.19	12.77	12.73
7.	IV.A. Cndng	13.32	13.39	13.61	13.39	13.53	13.36	13.42	13.45	13.48
8.	Baso	7.62	7.66	7.67	7.66	7.53	7.64	7.68	7.62	7.69
9.	Til. Kamang	12.51	12.57	12.49	12.57	12.63	12.88	12.99	12.06	12.21
10.	Palembayan	6.72	6.76	6.73	6.76	6.65	6.64	6.61	7.04	7.01
11.	Palupuh	3.04	3.04	3.04	3.04	3.30	3.44	3.47	3.05	3.04
	JUMLAH	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Agam, 2002

### 3.3.1.2 Struktur Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Banyaknya pencari kerja yang belum berpengalaman menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan belum ditempatkan tahun 2001 sebanyak 6.475 orang yang terdiri dari 258 orang tamatan SD/SLTP, 3.784 orang lulusan SLTA dan lulusan akademi/universitas sebanyak 2.473 orang. Tenaga kerja yang terdaftar tahun ini berjumlah 2.642 orang serta jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun ini sebanyak 111 orang.

Dari hasil Susenas tahun 2000, presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 63,05%, masih mencari pekerjaan sebesar 3,04%, bersekolah sebesar 11,91% dan mengurus rumah tangga, pensiun, cacat dan lainnya sebesar 22,00%. Tabel III.8 berikut ini akan memperlihatkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan utamanya.

**Tabel III.8**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas**  
**Menurut Jenis Kegiatan Utama**  
**Tahun 2001**

No.	Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
A.	Angkatan Kerja	101.422	82.365	183.787
	1. Bekerja	96.838	78.488	175.326
	2. Mencari pekerjaan	4.584	3.877	8.461
B.	Bukan Angkatan Kerja	27.074	67.209	94.283
	1. Sekolah	15.089	18.017	33.106
	2. Mengurus rumah tangga, pensiun, cacat dan lainnya	11.985	49.192	61.177
	Jumlah	128.496	149.574	278.070

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Agam, 2002

### 3.3.1.3 Sejarah dan Budaya Masyarakat Kabupaten Agam

Dari sisi sejarahnya, masyarakat yang bermukim di wilayah Agam Timur merupakan penduduk asli masyarakat Minangkabau. Secara tradisional daerah asli ini disebut *Daerah Darek* (daerah darat) yang terdiri dari *Luhak Nan Tigo* (luhak yang tiga), karena terdiri dari tiga luhak. Adapun ketiga luhak itu adalah Luhak Tanah Data, Luhak Agam dan Luhak Limo Puluah Koto. Dari ketiga luhak inilah orang Minangkabau kemudian berpencar, sehingga mendiami wilayah bagian tengah Pulau Sumatera. Oleh karena itu Luhak Nan Tigo atau Daerah Darek ini disebut juga dengan daerah inti Alam Minangkabau. Adapun daerah di sekeliling darek yang terletak di pantai barat dan Timur bagian tengah pulau Sumatera, disebut dengan *Daerah Rantau* (M. D. Mansoer, 1970 dan A. A. Navis, 1984).

Daerah Darek pada masa sekarang, identik dengan tiga kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Barat yaitu :

- *Kabupaten Tanah Datar dengan Ibukota Batusangkar*

(Awalnya adalah Luhak Tanah Data yang dikenal sebagai Nagari Pariangan dimana terdapat pusat Kerajaan Minangkabau yang bernama Kerajaan Pagaruyuang).

- *Kabupaten Agam dengan Ibukota Lubuk Basung*

(Pada awalnya, Ibukota Kabupaten Agam adalah Bukittinggi yang disebut juga sebagai Nagari Kurai. Bukittinggi sangat identik dengan Agam, begitu juga sebaliknya Agam sangat identik Bukittinggi sehingga terkenal dengan istilah Bukittinggi Koto Rang Agam).

- *Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Ibukota Payakumbuh*

(Awalnya adalah Luhak Limo Puluah Koto)

Kabupaten Agam yang sekarang ini wilayahnya lebih luas daripada luas Luhak Agam pada jaman dahulu. Luas wilayah Agam sekarang sudah bertambah dengan masuknya beberapa daerah rantau yang disebut juga *Ikua Darek Kapalo Rantau* yang sekarang merupakan bagian wilayah Agam Barat. Perbedaan asal – usul wilayah Agam Barat dan Agam Timur, juga menimbulkan perbedaan adat istiadat (budaya) serta cara hidup masyarakat dari kedua wilayah ini.

Dari hasil pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pemuka adat, adat beberapa perbedaan budaya (adat istiadat) dan cara hidup masyarakat di wilayah Agam Barat dan Agam Timur. Perbedaan budaya dan cara hidup masyarakat di kedua wilayah ini adalah sebagai berikut :

## 1. Agam Barat

### ➤ *Sistim Japutan*

Sistim japutan adalah sistim perkawinan dimana pada saat pernikahan keluarga *Anak Daro* (pengantin wanita) memberikan sejumlah uang pengganti kepada keluarga *Marapulai* (pengantin pria). Uang pengganti ini secara simbolik dianggap sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua mempelai pria untuk membesarkan dan menyekolahkan anaknya yang besarnya tergantung kepada tingkat pendidikan dan pekerjaan dari pengantin pria. Semakin tinggi pendidikan dan semakin bagus pekerjaan pengantin pria, semakin mahal uang pengganti yang harus dibayar oleh keluarga pengantin perempuan. Uang japutan ini secara tidak langsung juga merupakan symbol keberadaan atau kekayaan dari pihak mempelai wanita.

### ➤ *Anak Daro Bajalan Malam*

Anak daro bajalan malam (pengantin perempuan berjalan malam) maksudnya adalah pengantin wanita datang ke rumah pengantin pria pada saat berlangsungnya pesta pernikahan di waktu malam hari, setelah waktu magrib. Malahan tidak jarang kedatangan ini menjelang waktu tengah malam.

### ➤ *Bareknyo baban minntu baru ma antakan pabukoan ka sado jurainyo*

Ma antakan pabukoan (mengantarkan perbukaan) adalah kegiatan yang dilakukan pada waktu bulan puasa (Ramadhan), dimana para mantu (para istri) terutama penganten baru, mengantarkan makanan (lauk pauk dan

kolak) untuk berbuka puasa kepada keluarga mertua (pihak suami). Di wilayah Agam Barat, mengantar pabukoan ini dilakukan tidak hanya ke rumah mertua dan saudara dekat (saudara perempuan suami), tetapi juga ke seluruh jurai (keluarga sepersukuan) dari pihak suami.

➤ *Pemimpin kurang memperhatikan syara'*

Para pemimpin di wilayah Agam Barat, kurang memperhatikan syara' atau agama sesuai dengan pedoman kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau yang harus mengacu kepada agama yang tertuang dalam falsafah Minangkabau yaitu "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" (adat bersendikan agama, agama bersendikan kitabullah).

➤ *Mata pencaharian berorientasi pada laut dan perkebunan*

Kondisi geografis yang berada di daerah pantai, menjadikan mata pencaharian masyarakat wilayah ini berorientasi ke sektor kelautan dan sektor perkebunan.

➤ *Kehidupan masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan materi dan kurang memperhatikan pendidikan*

Masyarakat Agam Barat masih menganggap bahwa materi merupakan symbol kehormatan dan penghargaan dibandingkan dengan pendidikan. Masyarakat di wilayah ini akan lebih menghormati dan menghargai orang yang kaya dalam hal materi, dibandingkan orang yang berilmu tapi tidak mempunyai kekayaan yang cukup banyak.

- *Kurang memahami kepentingan bersama/umum terutama dalam pelaksanaan pembangunan*

Pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Agam Barat ini sering mengalami kendala terutama apabila menyangkut penggunaan lahan (tanah pribadi maupun tanah ulayat) untuk kepentingan umum seperti pengadaan fasilitas dan utilitas umum. Pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan seringkali mengalami hambatan dari para pemilik tanah karena persoalan materi dan harga diri dari kaum pemilik tanah tersebut.

## 2. Agam Timur

- *Tidak mengenal sistim japutan*

Di wilayah Agam Timur yang merupakan daerah asli minangkabau, tidak mengenal sistim japutan karena dianggap akan menghina keluarga besar pihak pengantin pria. Malahan sebaliknya, pihak pengantin pria sebelum dilangsungkannya pesta pernikahan, memberikan sejumlah uang kepada pihak mempelai wanita yang pada masa sekarang besarnya tidak boleh lebih dari tiga ratus ribu rupiah yang disebut sebagai *pitih balanjo samba* (uang belanja lauk pauk). Uang belanja ini merupakan symbol tanggung jawab pengantin pria sebagai kepala rumah tangga kelak.

- *Anak daro bajalan siang*

Pada saat berlangsungnya pesta pernikahan, keluarga pihak mempelai pria datang secara adat menjemput pengantin wanita untuk dibawa ke rumah pengantin pria yang sedang atau akan melaksanakan pesta pernikahan juga. Kedatangan pihak mempelai pria ini biasanya pagi hari sehingga



pengantin wanita keluar dari rumahnya pada siang hari (anak daro bajalan siang).

➤ *Minantu baru ma antakan pabukoan ka nan ta batang*

Mantu baru (para istri) mengantarkan makanan (lauk pauk dan kolak) berbuka puasa hanya untuk keluarga mertua (pihak suami) saja.

➤ *Pemimpin berpedoman pada syarak*

Kehidupan keagamaan sangat kental melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Agam Timur. Masalah kehidupan dalam masyarakat pun diselesaikan berdasarkan syariat agama Islam. Maka tidak heran jika para pemimpin masyarakat sangat berpedoman pada syarak dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kehidupan yang berpedoman pada syarak ini juga terlihat dengan masih banyaknya pendidikan terutama untuk masyarakat golongan muda berorientasi pada surau/mesjid dimana semua kegiatan keremajaan berpusat di surau. Menurut Sidi Ibrahim Buchari (1981), surau pada awalnya sebelum berdirinya lembaga pendidikan Barat (sekolah) di Minangkabau telah dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam. Pendidikan surau terbagi atas dua tingkat. Pertama, tingkat pendidikan membaca Al-Quran dan dasar-dasar ajaran Islam dan surau seperti ini terdapat di tiap kampung atau nagari. Kedua, tingkat pengajian kitab, yaitu pendalaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang merupakan lanjutan dari pendidikan surau pertama dan keberadaannya tidak di setiap surau karena akan tergantung kepada kedalaman ilmu gurunya (Hamka, 1984).

➤ *Mata pencaharian berorientasi pada pertanian dan perdagangan*

Sesuai dengan kondisi geografis daerahnya yang berbukit dan berhawa sejuk, mata pencaharian utama masyarakat Agam Timur adalah pada sector pertanian disamping juga sector perdagangan yang memang sudah sejak zaman Belanda (Bukittinggi sudah menjadi pusat perdagangan sejak zaman kolonial Belanda).

➤ *Kehidupan masyarakat sangat mementingkan pendidikan*

Pendidikan, terutama pendidikan keagamaan sangat mendapat perhatian dari masyarakat di wilayah ini. Tidak heran kalau pada zaman sebelum kemerdekaan, wilayah Agam Timur mempunyai orang-orang yang berpendidikan tinggi yang sanggup berbicara di forum internasional. Mereka antara lain adalah H. Agus Salim, M. Hatta dan Hamka. Kehidupan masyarakat yang mementingkan pendidikan, juga didukung oleh adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda membutuhkan pegawai rendahan dalam birokrasi pemerintahannya. Akan tetapi penduduk tidak ada yang dapat menulis dan membaca huruf latin serta berhitung. Mereka hanya bisa membaca dan menulis huruf Arab yang diajarkan guru-guru mereka di surau-surau (Steinmentz, 1924). Pada tahun 1843 didirikan sebuah sekolah di Agam Timur, tepatnya di Bukittinggi dengan nama Sekolah Melayu (*Malaische – School*) yang merupakan sekolah pertama yang berdiri di daerah ini. Akan tetapi, sekolah ini kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena para orang tua beranggapan bahwa sekolah Belanda itu

akan mendidik anak-anak mereka menjadi Kristen atau serdadu Belanda (Rusli Amran, 1985). Namun Belanda dengan politiknya tidak kekurangan akal, berdasarkan Besluit van Gouverneur Generaal, No. 13 tanggal 1 April 1856, didirikanlah "*Kweekschool*" atau "*Normalschool*" (Sekolah Guru) di Bukittinggi. "*Kweekschool*" Bukittinggi ini merupakan Sekolah Guru yang pertama didirikan di luar Jawa. Berturut-turut "*Kweekschool*" yang didirikan di Hindia Belanda adalah "*Kweekschool*" Surakarta (1852), Bukittinggi (1856), Bandung (1866), Tondano (1873), Ambon (1874), Probolinggo (1875), Banjarmasin (1875) dan Padang Sidempuan (1879) (Rusli Amran, 1985).

➤ *Memahami kepentingan bersama terutama terutama dalam pelaksanaan pembangunan*

Pelaksanaan pembangunan terutama proyek-proyek fisik yang menyangkut pengadaan fasilitas dan utilitas untuk masyarakat umum, selalu disambut dengan antusias oleh masyarakat Agam Timur. Toleransi masyarakat yang tinggi antara satu dengan lainnya, membuat mereka tidak berkeberatan untuk melepaskan hak atas tanah pribadi maupun tanah ulayat untuk kepentingan umum. Bahkan tidak jarang masyarakatnya di suatu kampung/desa, melaksanakan pembangunan fasilitas umum dengan cara swadaya, swadana dan swakarya, yaitu dengan cara melaksanakan sendiri pembangunan suatu fasilitas umum (gotong royong), di atas tanah yang sudah diwakafkan untuk kepentingan bersama dan dengan dana yang murni berasal dari masyarakat kampung/desa mereka sendiri.

Perbedaan-perbedaan budaya dan pola hidup masyarakat Agam Barat dan Agam Timur dapat terjadi karena beberapa hal :

a. Pengaruh adat budaya wilayah tetangga yang berdekatan

Adat budaya masyarakat Agam Barat lebih dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat Pesisiran Pariaman dan Pasaman.

b. Pengaruh ekonomi

Adanya sistim japutan

c. Pengaruh waktu

*Wakatu nan ba pidik-pidik* (waktu yang sempit) sehingga perlu dilakukan saling pengertian.

d. Pengaruh jarak

Jarak dan waktu akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Waktu dan jarak yang relatif pendek seperti yang terdapat di daerah-daerah yang ada di wilayah Agam Timur, mengharuskan pengambilan keputusan dalam hal apapun dilakukan secara cepat dan tepat dengan pola pikir yang matang dan berbasis.

e. Pengaruh agama

Agama yang dijadikan pedoman hidup sesuai dengan tuntutan (terutama ajaran Agama Islam) sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kabupaten Agam terutama menyangkut masalah-masalah kepentingan bersama yang dipecahkan bersama berdasarkan tuntutan syara' (syariat Islam).

f. Pengaruh pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan serta tingkat pendidikan penduduk yang lebih tinggi, membuat terbukanya kesempatan masyarakat untuk dapat menerima informasi untuk lebih memajukan daerahnya.

### 3.3.2 Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi

Penyebaran fasilitas sosial ekonomi juga merupakan faktor penunjang yang sangat penting bagi terlaksananya pembangunan daerah. Penyebaran fasilitas pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) sudah merata. Jumlah TK sebanyak 173 unit dan SD sebanyak 469 unit. Untuk fasilitas lainnya terutama SMU/ sederajat telah tersebar di setiap kecamatan.

**Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Agam  
Tahun 2001**

No	Kecamatan	TK	SD	MIS/MDA	SLTP	MTsN/S	SITA	MAREP
1.	Tj. Mutiara	3	31	7	3	2	2	-
2.	Lubuk Basung	23	87	24	9	7	7	1
3.	Tanjung Raya	24	43	36	5	5	3	4
4.	Matur	6	25	16	3	2	1	1
5.	IV Koto	14	41	23	3	3	1	-
6.	Bnh. Sungai Puar	21	44	35	5	6	2	6
7.	IV A. Candung	29	52	15	5	10	2	5
8.	Baso	18	33	25	4	2	1	-
9.	Tilatang Kamang	22	54	38	7	8	3	7
10.	Palembayan	9	41	15	4	3	1	-
11.	Palupuh	4	18	13	2	1	1	-
	Jumlah	173	469	247	50	49	24	24

Sumber : Kantor Dinas Dikbud & Kantor Departemen Agama Kabupaten Agam, 2002

Untuk meningkatkan kondisi kesehatan penduduk, maka penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan harus memadai secara kualitas maupun kuantitas. Pada tahun 2001, jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Agam berjumlah 134 unit, terdiri dari 113 unit Puskesmas Pembantu dan 21 unit Puskesmas Keliling.

**TABEL III.10**  
**JUMLAH DAN JENIS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN**  
**DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2003**

NO	KECAMATAN	RSU	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Posyandu	Dokter	Bidan	Perawat	Lain-Lain	Jumlah
1	Tanjung Mutiara	-	1,00	7,00	1,00	67,00	4,00	5,00	7,00	11,00	103,00
2	Lubuk Basung	1,00	3,00	18,00	3,00	205,00	10,00	24,00	21,00	36,00	321,00
3	Tanjung Raya	-	2,00	12,00	2,00	95,00	6,00	7,00	12,00	16,00	152,00
4	Matur	-	1,00	8,00	1,00	78,00	-	2,00	7,00	8,00	105,00
5	IV Koto	-	2,00	10,00	2,00	103,00	5,00	9,00	11,00	13,00	155,00
6	Baruhampu Sei Puar	-	2,00	11,00	2,00	152,00	5,00	9,00	14,00	19,00	214,00
7	IV Angkat Candung	-	2,00	13,00	2,00	173,00	6,00	10,00	9,00	21,00	236,00
8	Baso	-	2,00	9,00	2,00	94,00	4,00	10,00	7,00	7,00	135,00
9	Tilatang Kamang	-	3,00	11,00	3,00	188,00	5,00	6,00	19,00	29,00	264,00
10	Palembayan	-	2,00	8,00	2,00	102,00	4,00	11,00	11,00	13,00	153,00
11	Palupuh	-	1,00	6,00	1,00	71,00	4,00	2,00	5,00	4,00	94,00
	<b>JUMLAH</b>	1,00	21,00	113,00	21,00	1.328,00	53,00	95,00	123,00	177,00	1.932,00

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Agam, 2003

Tabel III.9 memperlihatkan jumlah fasilitas pendidikan dan Tabel III.10 menunjukkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Agam.

### **3.4 Tinjauan Terhadap Perekonomian Daerah**

#### **3.4.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi**

Sektor pertanian masih merupakan sektor andalan dalam pembentukan nilai tambah Kabupaten Agam. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan sektor pertanian yang besar bagi PDRB Kabupaten Agam. Pada tahun 2000, produktivitas perekonomian Kabupaten Agam mengalami kenaikan pertumbuhan dibandingkan tahun 1999. Nilai PDRB Atas Harga Konstan 1993, naik menjadi Rp.676,76 milyar tahun 2000 dari Rp. 652,08 milyar pada tahun 1999. Dengan kata lain, Kabupaten Agam mengalami pertumbuhan sebesar 3,78%.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 1.795,45 milyar dari Rp. 1.645,96 milyar pada tahun 1999. Peningkatan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ini umumnya disebabkan oleh meningkatnya harga barang-barang dan jasa pada tahun 2000 tersebut, bukan disebabkan oleh peningkatan produktivitas ekonomi Kabupaten Agam. Tabel III.11 dan Tabel III.12 memperlihatkan nilai PDRB Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan 1993 dan Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 1998 – 2000.

#### **3.4.2 Keuangan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah pada tahun anggaran 2001 mengalami kenaikan sebesar 29,41% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, yaitu naik dari Rp 1.108.528 juta pada tahun anggaran 2000 menjadi Rp. 1.434.496 juta pada tahun anggaran 2001.

**Tabel III.1.**  
**PDRB Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan 1993**  
**Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 1998 – 2000**

No.	Lapangan Usaha	1998	1999	2000
1.	<b>Pertanian</b>	<b>191,049.14</b>	<b>195,547.33</b>	<b>202,585.82</b>
	a. Tanaman Pangan dan Holtikultura	135,016.03	139,454.22	143,416.26
	b. Tanaman Perkebunan	27,897.22	29,070.46	30,944.43
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	15,612.53	15,704.38	16,525.69
	d. Kehutanan	6,199.92	5,393.64	5,293.72
	e. Perikanan	6,323.44	5,924.63	6,405.72
2.	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>31,435.29</b>	<b>31,578.38</b>	<b>32,055.21</b>
	a. Pertambangan	-	-	-
	b. Penggalian	31,435.29	31,578.38	32,055.21
3.	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>117,526.83</b>	<b>119,192.86</b>	<b>124,139.36</b>
4.	<b>Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	<b>10,066.41</b>	<b>10,892.62</b>	<b>12,729.44</b>
	a. Listrik	9,776.26	10,586.23	12,397.25
	b. Air Bersih	290.15	306.39	332.19
5.	<b>Bangunan</b>	<b>30,530.80</b>	<b>27,615.11</b>	<b>28,109.42</b>
6.	<b>Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	<b>119,015.03</b>	<b>121,937.75</b>	<b>125,238.88</b>
	a. Perdagangan Besar & Eceran	114,660.89	117,601.29	120,815.45
	b. Hotel	998.00	1,013.05	1,067.81
	c. Restoran	3,356.14	3,323.41	3,355.62
7.	<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>26,211.82</b>	<b>26,991.75</b>	<b>29,847.41</b>
	a. Angkutan Darat	24,457.96	25,171.24	27,916.11
	b. Angkutan Air	90.87	93.38	94.70
	c. Angkutan Udara	-	-	-
	d. Jasa Penunjang Angkutan	270.06	279.34	285.22
	e. Komunikasi	1,392.93	1,447.79	1,551.38
8.	<b>Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan</b>	<b>21,434.09</b>	<b>21,079.96</b>	<b>21,424.95</b>
	a. Bank	3,88.20	3,304.19	3,389.05
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan Non Bank	2,514.66	2,485.87	2,544.78
	c. Sewa Bangunan	14,933.75	15,192.09	15,392.63
	d. Jasa Perusahaan	97.48	97.81	98.49
9.	<b>Jasa-jasa</b>	<b>95,313.18</b>	<b>97,240.42</b>	<b>100,626.32</b>
	a. Pemerintahan Umum dan Pertahanan/Keamanan	81,750.09	82,897.43	85,708.66
	b. Swasta	13,563.09	14,342.99	14,917.66
	1. Sosial Masyarakat	2,460.86	2,703.20	2,821.65
	2. Hiburan Dan Rekreasi	243.15	214.37	219.77
	3. Perorangan & Rmh Tangga	10,859.08	11,425.42	11,876.24
	<b>J U M L A H</b>	<b>642,582.59</b>	<b>652,076.18</b>	<b>676,756.81</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2001



**Tabel III.12**  
**PDRB Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 1998 – 2000**

No.	Lapangan Usaha	1998	1999	2000
1.	<b>Pertanian</b>	<b>402,327.38</b>	<b>493,958.98</b>	<b>548,954.62</b>
	a. Tanaman Pangan dan Holtikultura	267,484.74	327,822.01	363,976.13
	b. Tanaman Perkebunan	69,898.25	89,621.32	100,931.45
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	37,529.11	46,697.47	51,370.11
	d. Kehutanan	13,049.41	13,943.70	14,713.37
	e. Perikanan	14,365.87	15,874.48	17,963.56
2.	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>56,419.79</b>	<b>70,108.63</b>	<b>74,896.99</b>
	a. Pertambangan	-	-	-
	b. Penggalian	56,419.79	70,108.63	74,896.99
3.	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>242,276.47</b>	<b>254,250.29</b>	<b>277,650.09</b>
4.	<b>Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	<b>12,863.02</b>	<b>15,159.13</b>	<b>18,533.90</b>
	a. Listrik	12,244.25	14,390.92	17,663.60
	b. Air Bersih	618.77	768.21	870.30
5.	<b>Bangunan</b>	<b>79,317.37</b>	<b>81,909.18</b>	<b>87,704.20</b>
6.	<b>Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	<b>260,850.68</b>	<b>296,454.36</b>	<b>320,634.20</b>
	a. Perdagangan Besar & Eceran	248,784.22	282,995.74	306,134.27
	b. Hotel	1,854.06	2,082.83	2,324.94
	c. Restoran	10,212.40	11,375.79	12,174.99
7.	<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>55,192.88</b>	<b>67,183.60</b>	<b>76,615.15</b>
	a. Angkutan Darat	50,660.10	61,667.02	70,508.22
	b. Angkutan Air	178.34	216.76	224.81
	c. Angkutan Udara	-	-	-
	d. Jasa Penunjang Angkutan	570.03	696.72	727.66
	e. Komunikasi	3,783.41	4,603.10	5,154.46
8.	<b>Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan</b>	<b>52,914.78</b>	<b>59,713.41</b>	<b>63,290.68</b>
	a. Bank	13,998.14	14,891.32	16,261.34
	b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan Non Bank	6,027.30	7,037.66	7,523.95
	c. Sewa Bangunan	32,693.75	37,538.78	39,250.87
	d. Jasa Perusahaan	195.59	245.65	254.52
9.	<b>Jasa-jasa</b>	<b>242,801.04</b>	<b>307,222.34</b>	<b>327,171.60</b>
	a. Pemerintahan Umum dan Pertahanan/ Keamanan	216,989.26	275,358.22	292,753.41
	b. Swasta	25,811.78	31,864.12	34,418.19
	1. Sosial Kemasyarakatan	4,298.5	5,749.76	6,204.19
	2. Hiburan Dan Rekreasi	513.73	542.51	592.24
	3. Perorangan & Rmh Tangga	20,999.55	25,571.85	27,621.76
	<b>J U M L A H</b>	<b>1,405,560.41</b>	<b>1,645,959.92</b>	<b>1,795,451.43</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2001

Sedangkan besarnya pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi dan penerimaan lainnya pada tahun anggaran 2001 juga mengalami kenaikan dari Rp. 734,00 juta pada tahun anggaran 2000 menjadi Rp 1.173 juta pada tahun anggaran 2001, atau naik dengan presentase yang cukup besar yaitu sebesar 59,81%.

Pada tahun 200 realisasi anggaran sebesar Rp. 73.273,53 juta, pada tahun anggaran 2001 mengalami kenaikan yang cukup mengejutkan yaitu sebesar 122,79%, menjadi Rp. 163.242,46 juta. Kenaikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Agam pada tahun anggaran 2001 ini, diikuti dengan naiknya rencana anggaran dari Rp. 91.687,66 juta pada tahun 2000 menjadi Rp. 117.418,84 juta pada tahun 2001 (naik sebesar 28,1%).

### **3.4.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Agam**

Kondisi perekonomian Kabupaten Agam tahun 2002 menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2001. Dengan naiknya PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp. 2.025,37 milyar tahun 2001 menjadi 2.300,18 milyar tahun 2002 belum mencerminkan adanya perbaikan produktivitas ekonomi secara riil karena kenaikan tersebut masih dipengaruhi oleh inflasi. Untuk mengetahui produktivitas Kabupaten Agam secara riil dimana unsur inflasi tidak ada di dalamnya, dapat dilihat pada PDRB atas harga konstan tahun 1993 yang naik dari Rp. 698,18 milyar tahun 2001 menjadi Rp 728,76 milyar tahun 2002.

Sebagai daerah yang masih agraris, struktur perekonomian Kabupaten Agam masih didominasi oleh sektor pertanian. Dari PDRB atas dasar harga berlaku terlihat bahwa sumbangan sektor ini tahun 2002 sebesar 31,53%, disusul

sektor-sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa sebesar 17,39%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,15% serta sektor industri pengolahan sebesar 14,75%. Sedangkan lima sektor lainnya, angkanya masih dibawah 5%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam tahun 2002 sebesar 4,38% terbentuk dari pertumbuhan setiap sektor ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian sebesar 5,66%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2,74%, sektor industri pengolahan sebesar 15,13%, sektor bangunan sebesar 2,83%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 3,49%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,75%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,22% dan sektor jasa-jasa sebesar 3,14%.

#### **3.4.4 Peranan Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan**

Karakteristik perekonomian Kabupaten Agam masih didominasi oleh sektor pertanian yang terlihat dari kontribusi sektor pertanian merupakan yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Agam. Kontribusi sektor pertanian untuk PDRB Kabupaten Agam berdasarkan harga konstan menunjukkan kenaikan tiap tahunnya yang pada tahun 1998 sebesar 29,73% menjadi 30,27% pada tahun 2002.

Untuk sektor-sektornya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Agam adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan resotran, dan sektor jasa-jasa. Masing-masing sektor tersebut berada pada posisi yang cukup stabil karena tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya, kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Agam dapat dilihat dari Tabel III.13 berikut ini.

**TABEL III.13**  
**KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB KABUPATEN AGAM**  
**TAHUN 1998-2002**

NO	SEKTOR	Kontribusi Sektoral PDRB (%)									
		Harga Berlaku					Harga Konstan				
		1998	1999	2000	2001	2002	1998	1999	2000	2001	2002
1	Pertanian	28.62	30.01	30.57	31.38	31.53	29.73	29.99	30.00	29.91	30.27
2	Pertambangan dan Penggalian	4.01	4.26	4.17	4.15	4.42	4.89	4.84	4.78	4.68	4.60
3	Industri Pengolahan	17.24	15.45	15.46	15.28	14.75	18.29	18.28	18.38	18.43	18.20
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0.92	0.92	1.03	1.09	1.29	1.57	1.67	1.86	2.03	2.24
5	Bangunan	5.69	4.98	4.88	4.97	4.91	4.75	4.23	4.16	4.12	4.06
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18.56	18.01	17.86	17.47	17.15	18.52	18.70	18.55	18.46	18.33
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3.93	4.08	4.27	4.31	4.68	4.08	4.14	4.34	4.40	4.45
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.76	3.63	3.53	3.66	3.88	3.34	3.23	3.16	3.26	3.32
9	Jasa-jasa	17.27	18.66	18.23	17.69	17.39	14.83	14.92	14.77	14.71	14.53
	TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : PDRB Kabupaten Agam Menurut Lapangan Usaha 1998-2002, BPS Kabupaten Agam, 2003

### 3.4.5 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang berasal dari hasil penghitungan antara total PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, angka ini menunjukkan nilai rata-rata PDRB perorang pertahun. Tetapi angka ini tidak bisa digunakan sebagai suatu ukuran/indikator kemakmuran penduduk suatu daerah, kenyataannya tidak seluruh penduduk secara merata menerima pendapatan tersebut.

Di samping PDRB perkapita terdapat indikator lain yang lebih menggambarkan pendapatan masyarakat yaitu Pendapatan Regional Perkapita, karena Pendapatan Regional Perkapita ini merupakan PDRB yang sudah dikurangi dengan penyusutan dan pajak tak langsung netto serta ditambah transfer netto kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Agam tahun 2002 berdasarkan harga konstan 1,625

juta rupiah, sedangkan berdasarkan harga berlaku adalah sebesar 5,252 juta rupiah.

Dari Tabel III.14 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Agam tahun 2002 berdasarkan harga konstan dari 1,7 juta rupiah menjadi 1,57 juta rupiah pada tahun 1999. Sedangkan berdasarkan harga berlaku PDRB perkapita pada tahun 2002 sebesar 5,38 juta rupiah yang meningkat dibanding tahun 1999 yang hanya 3,96 juta rupiah.

**TABEL III.14**  
**PDRB PERKAPITA DAN PENDAPATAN REGIONAL PERKAPITA**  
**TAHUN 1999-2002 (JUTA)**

Uraian	Tahun	Nilai Nominal	
		Harga Berlaku	Harga Konstan
PDRB Perkapita	1999	3,965	1,570
	2000	4,297	1,616
	2001	4,805	1,656
	2002	5,379	1,704
Pendapatan Regional Perkapita	1999	3,867	1,501
	2000	4,189	1,543
	2001	4,686	1,579
	2002	5,250	1,625

Sumber : Laporan PDRB Kabupaten Agam, Tahun 2003

#### 3.4.6 Perkembangan Kelompok Sektor PDRB

Berikut disajikan PDRB Kabupaten Agam yang dibagi menurut kelompok sektor. Kelompok sektor perekonomian dibagi atas tiga kelompok yang didasarkan atas input dan output serta asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing produsen. Kelompok sektor perekonomian dibagi atas tiga yaitu Kelompok Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier.

Kelompok sektor primer meliputi kegiatan yang outputnya masih merupakan proses tingkat dasar yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan. Selanjutnya sektor yang sebahagian besar inputnya berasal dari sektor primer dikelompokkan kedalam kelompok sekunder yang meliputi sektor industri, sektor Listrik, gas dan air bersih, serta sektor bangunan. Sisanya yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan bangunan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa, dikelompokkan ke dalam sektor tersier.

Sampai tahun 2002, PDRB kelompok sektor di Kabupaten Agam didominasi oleh kelompok sektor tersier, walaupun dominasinya menunjukkan sedikit penurunan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel III.15, yaitu dari 40,98% pada tahun 1999 menjadi 40,63% pada tahun 2002 berdasarkan harga konstan, meskipun secara nominal naik sebesar 28,81 milyar rupiah.

**TABEL III. 15**  
**NILAI TAMBAH DAN KONTRIBUSI KELOMPOK SEKTOR**  
**PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993**  
**TAHUN 1999-2002**

Kelompok Sektor	Nilai Tambah ( <i>Juta Rupiah</i> )		Kontribusi (%)	
	1999	2002	1999	2002
Primer	227125,71	254171,21	34,83	34,87
Sekunder	157700,59	178525,53	24,19	24,50
Tersier	267249,88	296059,92	40,98	40,63
<b>Total</b>	<b>652076,18</b>	<b>728756,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Laporan PDRB Kabupaten Agam, Tahun 2003*

Kelompok sektor primer berada pada urutan kedua dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Agam dengan peningkatan sebesar 0,04% yaitu dari 34,83% pada tahun 1999 menjadi 34,87% pada tahun 2002 dan secara nominal mengalami peningkatan sebesar 27,045 milyar rupiah. Sedangkan kelompok sekunder pada tahun 2002 memberikan kontribusi sebesar 24,50% yang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 1999 yang hanya 24,19%.

#### **3.4.7 Posisi Perekonomian Kabupaten Agam terhadap Sumatera Barat**

PDRB Kabupaten Agam pada tahun 2001 hanya memberikan kontribusi sebesar 4,43% terhadap PDRB Sumatera Barat. Bila dilihat secara sektoral, maka sektor yang paling dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB Sumatera Barat adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 41,32%, diikuti oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 13,35% dan sektor bangunan sebesar 10,42%, sedangkan sektor-sektor lain relatif kecil peranannya.

Kontribusi PDRB Kabupaten Agam yang kecil (4,43%) terhadap PDRB Sumatera Barat merupakan suatu hal yang bisa menjadi tanda tanya terutama jika dilihat secara keseluruhan. Sektor-sektor yang potensial dan menjadi andalan di Kabupaten Agam (khususnya Agam Timur) seperti pertanian dan perdagangan hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil (pertanian 2,18% dan perdagangan 2,67%) apabila dihitung secara keseluruhan.

Untuk lebih jelasnya, posisi perekonomian Kabupaten Agam terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel III.16.

**TABEL III.16**  
**POSISI PEREKONOMIAN KABUPATEN AGAM TERHADAP**  
**PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT TAHUN 2001**

<b>NO</b>	<b>SEKTOR</b>	<b>PDRB Harga Berlaku Sumbar</b>	<b>PDRB Harga Berlaku Kab. Agam</b>	<b>Peranan (%)</b>
1	Pertanian	5,096.12	111.13	2.18
2	Pertambangan dan Penggalian	800.03	106.83	13.35
3	Industri Pengolahan	2,944.09	109.20	3.71
4	Listrik, Gas & Air Bersih	295.86	122.26	41.32
5	Bangunan	1,027.38	107.07	10.42
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,043.96	108.16	2.67
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,020.01	114.04	3.78
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	1,098.87	105.99	9.65
9	Jasa	4,041.49	106.49	2.63
	<b>TOTAL</b>	22,367.81	991.17	4.43

*Sumber : Laporan PDRB Kabupaten Agam, 2001*



## **BAB IV**

### **ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN AGAM**

#### **4.1 Identifikasi Faktor-faktor Yang Menjadikan Ketidakseimbangan Pengembangan Wilayah Kabupaten Agam**

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi atau menggali lebih dalam faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan Wilayah Kabupaten Agam. Berbagai kesenjangan pembangunan yang terjadi selama ini di wilayah Kabupaten Agam, menjadi persoalan yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan. Keadaan yang telah berlarut-larut sekian lama apabila tidak ditangani sesegera mungkin, akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perkembangan wilayah Kabupaten Agam sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan identifikasi sektor-sektor potensial pada masing-masing wilayah Agam Barat dan Agam Timur yang menyebabkan ketidakseimbangan pengembangan Kabupaten Agam.

Disamping itu, faktor-faktor yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan kabupaten ini juga perlu diidentifikasi dan dikaji. Untuk memacu pertumbuhan pembangunan di wilayah Kabupaten Agam, perlu dilakukan penyelerasan atau mengkaitkannya dengan perencanaan wilayah Kota Bukittinggi. Hal ini dimungkinkan karena Kabupaten Agam merupakan periphery atau wilayah pinggir Kota Bukittinggi terutama wilayah Agam Timur yang juga berfungsi sebagai Sub Pusat Wilayah Pembangunan I bagi Kabupaten Agam.

Dalam kaitannya dengan penataan ruang wilayah, salah satu alternatif adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sebagai awal pertumbuhan

yang akan menjalarkan pertumbuhannya ke pusat pengembangan lainnya (*hinterland*). Adapun faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan pengembangan wilayah Kabupaten Agam yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan disimpulkan dari latar belakang dan permasalahan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Agam adalah:

- Secara fisik terdapat perbedaan antara wilayah Agam Barat yang umumnya terdiri dari dataran rendah dan pesisir dengan wilayah Agam Timur yang pada umumnya terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan.
- Dari segi aksesibilitas, wilayah Agam Timur mempunyai aksesibilitas yang cukup bagus sehingga mempunyai posisi yang lebih strategis daripada wilayah Agam Barat dan terjadi pemusatan kegiatan di wilayah Agam Timur.
- Dari segi latar belakang sejarah, Ibukota Kabupaten Agam sebelumnya terdapat di Kota Bukittinggi sehingga pemusatan kegiatan di wilayah Agam Timur telah terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
- Terjadinya ketimpangan tersedianya sarana dan prasarana antara Agam Barat dengan Agam Timur karena pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Agam Timur lebih banyak dibandingkan dengan di Agam Barat.
- Terjadinya pemusatan pada pusat wilayah pengembangan terutama di Agam Barat (Lubuk Basung), sehingga pelayanan terhadap daerah-daerah yang berada jauh dari pusat-pusat tersebut menjadi berkurang.
- Rendahnya kemampuan tenaga kerja/ skill sehingga pengolahan sumber daya yang ada dirasakan belum optimal.

- Dilihat dari fungsi wilayah, Kabupaten Agam (terutama Agam Timur) berfungsi sebagai wilayah pinggir (*periphery*) dari Kota Bukittinggi yang merupakan pusat (*core periphery*).

Sehubungan dengan adanya perluasan Kota Bukittinggi terhadap beberapa kecamatan yang sebelumnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam, dapat dijadikan sebagai faktor pemacu pertumbuhan Kabupaten Agam dimana perkembangan yang terjadi di Kota Bukittinggi diharapkan akan memberikan dampak positif dan efek menetes (*trickling down effect*) terhadap percepatan pembangunan dan perkembangan Kabupaten Agam.

#### **4.2 Analisis Perbedaan Ketidakseimbangan di Kabupaten Agam**

Berdasarkan pada identifikasi faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan pengembangan wilayah Kabupaten Agam, maka dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap ketidakseimbangan dalam pengembangan Kabupaten Agam sehingga manfaat penelitian ini diharapkan dapat terwujud sebagai masukan yang fundamental bagi strategi pengembangan wilayah Kabupaten Agam di masa mendatang, terutama dalam penerapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu pendekatan pembangunan daerah yang biasa digunakan adalah melalui pendekatan sistem perwilayahan. Pendekatan sistem perwilayahan dimaksudkan untuk “Mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan dan keseimbangan antar wilayah dalam hal sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional yang dijelaskan secara struktur wilayah, antar daerah dalam satu kerangka nasional.” (Ditjen Cipta Karya, April 1984).

Ketidakseimbangan wilayah menurut Myrdal (1957) merupakan akibat dari perkembangan ekonomi yang tumbuh pada suatu tempat yang tepat dan akan terus tumbuh melalui proses sirkuler dan kumulatif yang tepat sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan wilayah. Keseimbangan ruang dalam system perwilayahan menurut Friedmann (1966) dapat dicapai apabila “Pengalokasian sumber daya dapat dicapai secara optimal jika faktor-faktor produksi yang saling berkaitan dapat terdistribusi yang selanjutnya terjadi pergeseran antara penggunaannya dengan lokasi yang tidak memungkinkan tanpa mengurangi produksi nasional.”

#### **4.2.1 Analisis Infrastruktur**

##### *a. Analisis Aksesibilitas*

Analisis aksesibilitas dilakukan untuk menentukan tingkat kemudahan dengan melihat kondisi jalan yang ada di tiap-tiap kecamatan. Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai indeks aksesibilitas masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Agam yang dapat dilihat pada Tabel IV.1 dan Lampiran A .

Hasil analisis menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah Agam Timur mempunyai Nilai Indeks (NI) yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Agam Barat. Kecamatan-kecamatan dengan NI yang besar ini pada umumnya mempunyai jalan negara dan sebagian besar daerahnya berada di jalur lalu lintas yang dilalui oleh angkutan antar propinsi. Kecamatan IV Angkat Candung dengan NI 41,02 sebagian besar daerahnya berada pada jalur antar

**TABEL IV.1**  
**NILAI INDEKS AKSESIBILITAS MASING-MASING KECAMATAN**  
**DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2003**

NO	KECAMATAN	Fungsi Jalan (F)	Kondisi Jalan (K)	Alat Angkut (T)	Rata-rata Jarak (D)	FKT	Indeks (I)	Nilai Indeks (NI)
1	Tanjung Mutiara	115.00	233.90	3.00	38.00	80,695.50	2,123.57	5.60
2	Lubuk Basung	325.50	499.50	6.00	25.73	975,523.50	37,913.86	100.00
3	Tanjung Raya	139.20	251.70	3.00	19.36	105,109.92	5,429.23	14.32
4	Matur	135.90	240.60	3.00	17.45	98,092.62	5,621.35	14.83
5	IV Koto	132.64	239.30	3.00	16.82	95,222.26	5,661.25	14.93
6	Banuhampu Sei Puar	103.50	202.41	6.00	17.27	125,696.61	7,278.32	19.20
7	IV Angkat Candung	146.20	373.90	6.00	21.09	327,985.08	15,551.69	41.02
8	Baso	104.50	218.90	6.00	25.18	137,250.30	5,450.77	14.38
9	Tilatang Kamang	168.60	436.30	6.00	23.27	441,361.08	18,966.96	50.03
10	Palembayan	141.10	345.90	3.00	33.73	146,419.47	4,340.93	11.45
11	Palupuh	187.20	171.10	6.00	26.09	192,179.52	7,366.02	19.43

Sumber: Hasil Analisis

propinsi yang menuju Propinsi Riau. Kecamatan Tilatang Kamang yang mempunyai NI 50,03 terletak pada dua jalur antar propinsi yaitu menuju Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Utara. Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dengan NI 19,20 merupakan pintu masuk ke Kota Bukittinggi dari arah Ibukota Sumatera Barat (Kota Padang) dan Kecamatan Palupuh juga mempunyai akses yang baik karena dengan NI 19,43 karena juga dilalui oleh jalur lalu lintas antar propinsi menuju Sumatera Utara.

Kecamatan yang mempunyai akses terendah adalah Kecamatan Tanjung Mutiara dengan NI 5,6. Kecamatan yang terletak di pantai Barat Sumatera ini tidak mempunyai jalan negara dan tidak dilalui oleh kendaraan angkut antar propinsi serta berjarak sangat jauh dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Agam. Jarak ke ibukota kabupaten yang cukup besar yaitu 15 km, merupakan jarak terdekat Kecamatan Tanjung Mutiara dengan daerah lainnya.

*b. Analisis Sentralitas*

Secara naluriah akan selalu terjadi suatu proses dalam memenuhi kebutuhan. Manusia akan mencari suatu pusat pemenuhan yang paling dekat, mudah dan murah dicapai serta memenuhi selera. Analisis sentralitas dilakukan untuk melihat atau menentukan tingkat keterpusatan suatu lokasi dengan penilaian secara kualitatif dari peta. Dari gambar tersebut didapat tingkat keterpusatan seperti yang terlihat dalam Tabel IV.2, menunjukkan hasil bahwa wilayah Agam Timur menjadi pusat dari kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Agam.

*c. Analisis Wilayah Pengaruh*

Analisis wilayah pengaruh, digunakan untuk mengetahui seberapa besar suatu wilayah terpengaruh oleh perkembangan wilayah lain dengan cara mengukur luasan pengaruh wilayah yang direncanakan menggunakan *Reilly's Law of Retail Gravitation* (Blair, 1995).

Berdasarkan hasil perhitungan yang juga mempertimbangkan tingkat aksesibilitas dan sentralitas wilayah, Agam Timur lebih berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Agam secara keseluruhan Analisis wilayah pengaruh dan hasilnya dapat dilihat pada Lampiran B.

#### **4.2.2 Analisis Fisik Alam**

Analisis fisik alam yang dilaksanakan untuk wilayah Kabupaten Agam ini, dilakukan dengan menganalisis penggunaan lahan menggunakan teknik overlay/super impose.

➤ Topografi

Tingkat ketinggian di Kabupaten Agam sangat bervariasi yang berkisar antara 0 – 1031 meter di atas permukaan laut. Kecamatan dengan ketinggian terendah adalah Kecamatan Tanjung Mutiara yang berkisar antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut, sedangkan kecamatan Matur dan Kecamatan IV Koto merupakan kecamatan yang memiliki ketinggian besar mulai dari 1000 meter di atas permukaan laut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.1.

➤ Kemiringan

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Agam didominasi oleh daerah datar dengan kemiringan 0 – 8 % seluas 815,16 km<sup>2</sup>, sedangkan untuk daerah dengan kemiringan curam atau besar dari 15 % adalah seluas 616,02 km<sup>2</sup>. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2.

➤ Hidrologi

Sungai-sungai yang berada di Kabupaten Agam berair sepanjang tahun sehingga sebagian besar daerah-daerah pertanian dapat dialiri dengan baik. Lebih jelas mengenai hidrologi dapat dilihat pada Gambar 4.3.

➤ Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Agam didominasi oleh tanah organosol dan glei humus yang terdapat di sebagian Kecamatan Tanjung Mutiara dan Lubuk Basung, Litosol dari batuan beku tersebar di Kecamatan Palembayan, Palupuh dan Tanjung Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Dari keempat faktor di atas, melalui teknik super impose/over lay, didapat penggunaan lahan dengan kesesuaian tanaman seperti terlihat pada Gambar 4.5, bahwa Kabupaten Agam terbagi atas beberapa wilayah penggunaan lahan dengan kesesuaian tanaman sebagai berikut:

- Penggunaan lahan untuk sawah yang sesuai, terdapat di Kecamatan Tanjung Mutiara dan kecamatan Lubuk Basung
- Penggunaan lahan untuk palawija yang sesuai terdapat di Kecamatan Tilatang Kamang, IV Angkat Candung, Banuhampu Sungai Puar dan sebagian Baso.
- Penggunaan lahan untuk perkebunan tanaman keras yang sesuai terdapat di Kecamatan Matur, IV Koto, Palupuh serta sebagian Baso, Banuhampu, Tilatang Kamang IV Angkat Candung, Lubuk Basung dan Palembayan.
- Penggunaan lahan untuk hutan lindung yang sesuai berada di Kecamatan Tanjung Raya, Palembang, Tilatang Kamang, Matur serta Kecamatan Palupuh.

(Karena keterbatasan data yang ada, proses analisis super impose ini dilakukan pada peta dengan skala 1 : 500000).

Penggunaan lahan dan kesesuaian tanaman ini menunjukkan bahwa pertanian (sawah dan palawija), mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Agam. Wilayah Agam Timur yang didominasi oleh tanaman palawija sampai saat ini masih menjadi pemasok utama palawija (sayur mayur, kentang, bawang dan cabe) untuk Propinsi Riau disamping juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam khususnya dan daerah-daerah tetangga yang ada di Propinsi Sumatera Barat.



**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

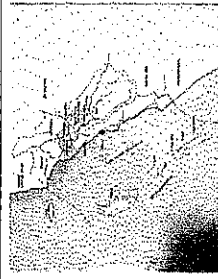
DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN AGAM

**PETA TOPOGRAFI**

**KETERANGAN :**

-  IBU KOTA KABUPATEN
-  IBU KOTA KOTAMADYA
-  IBU KOTA KECAMATAN
-  BATAS KABUPATEN
-  BATAS KECAMATAN
-  JARINGAN JALAN
-  SUNGAI
-  DANAU
-  0 - 500 M
-  500 - 1000 M
-  > 1000 M

**INSERT**



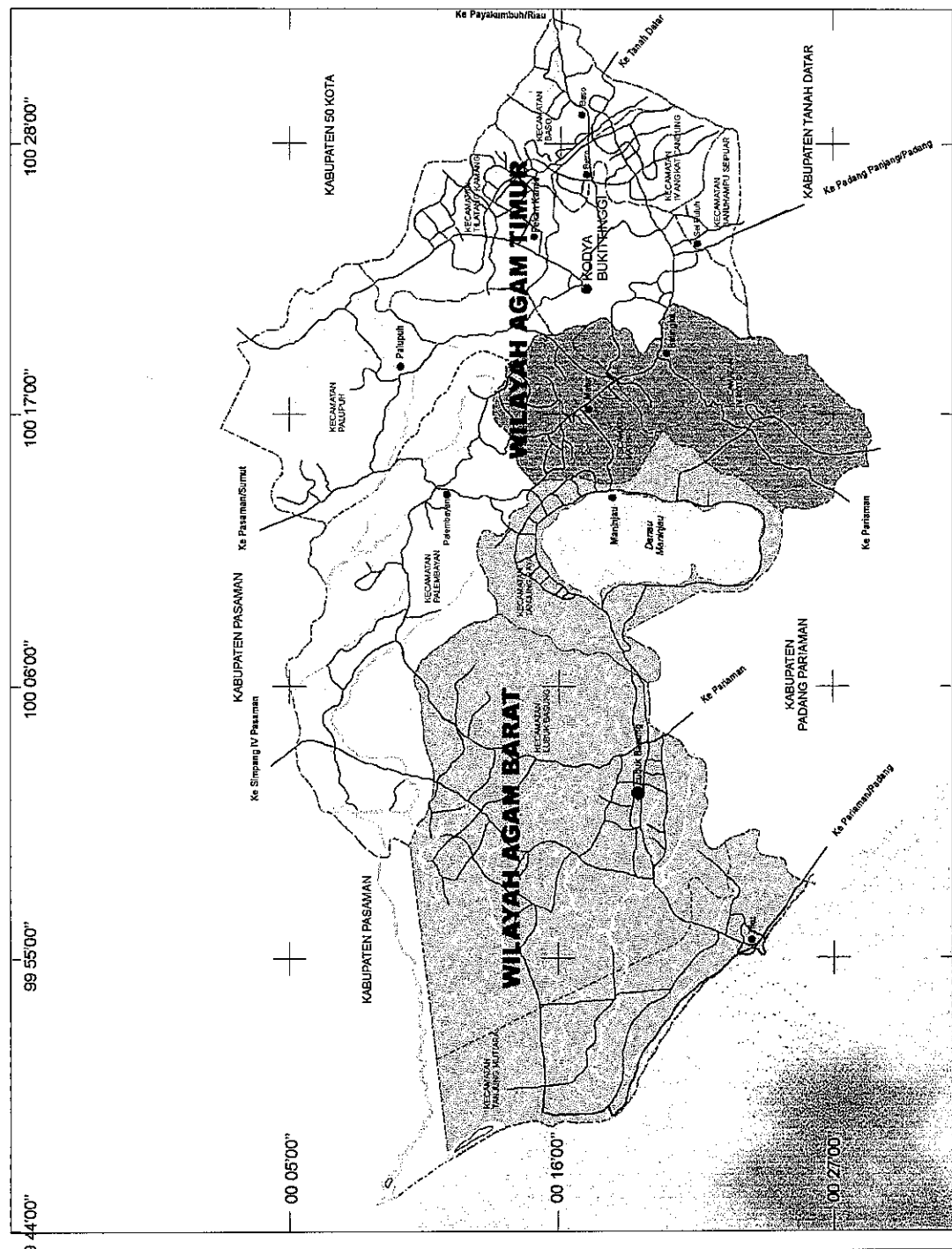
**SKALA**



**NOMOR**

Halaman	Gambar
115	4.1

SUMBER : BAPPEDA KABUPATEN AGAM, 2002  
SK DPRD TINGKAT II KABUPATEN AGAM  
No. 03/SP-DPRD/Agg-1995



# KABUPATEN AGAM

**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

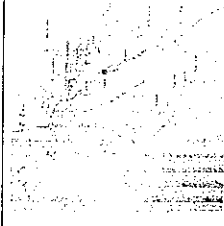
**DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN AGAM**

**PETA KEMIRINGAN**

**KETERANGAN:**

- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- JARINGAN JALAN
- IBU KOTA KABUPATEN
- IBU KOTA KECAMATAN
- SUNGAI
- DANAU
- 0 - 2 %
- 2 - 15 %
- 15 - 40 %
- > 40 %

**INSERT**



**SKALA**

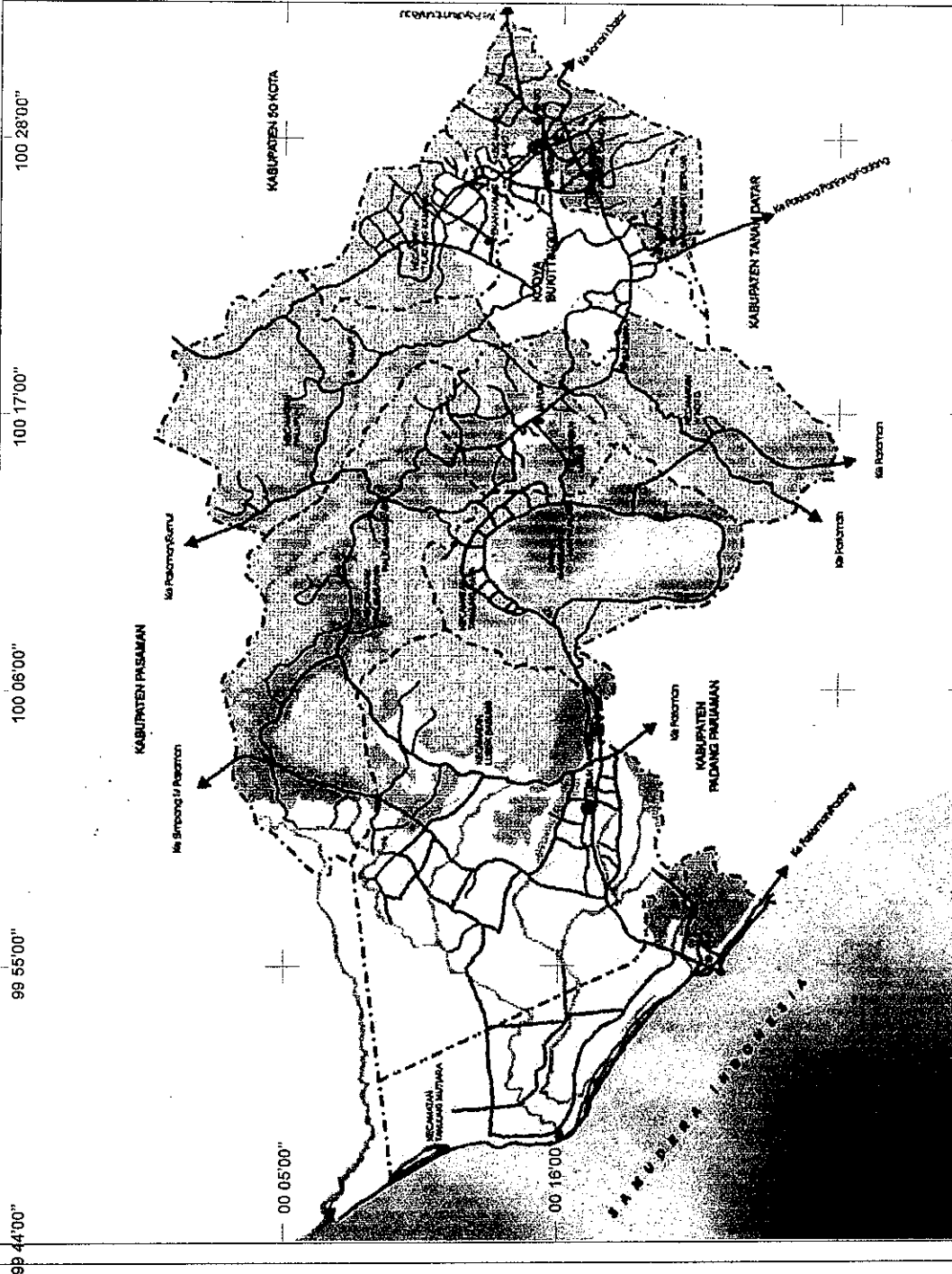
SKALA 1 : 500.000  
0 5 10 15 Km



**NOMOR**

Halaman  
Gambar

SUMBER : BAPPEDA KABUPATEN AGAM, 2002  
SK DPRD TINGKAT II KABUPATEN AGAM  
No. 03/SP-DPRD/Agm-1995



# KABUPATEN AGAM

**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

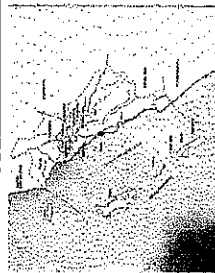
**DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN AGAM**

**PETA HIDROLOGI**

**KETERANGAN :**

- IBU KOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KOTAMADYA
- IBUKOTA KECAMATAN
- ▭ BATAS KABUPATEN
- ▭ BATAS KECAMATAN
- ▭ JARINGAN JALAN
- ▭ SUNGAI
- ▭ DANAU

**INSERT**



**SKALA**

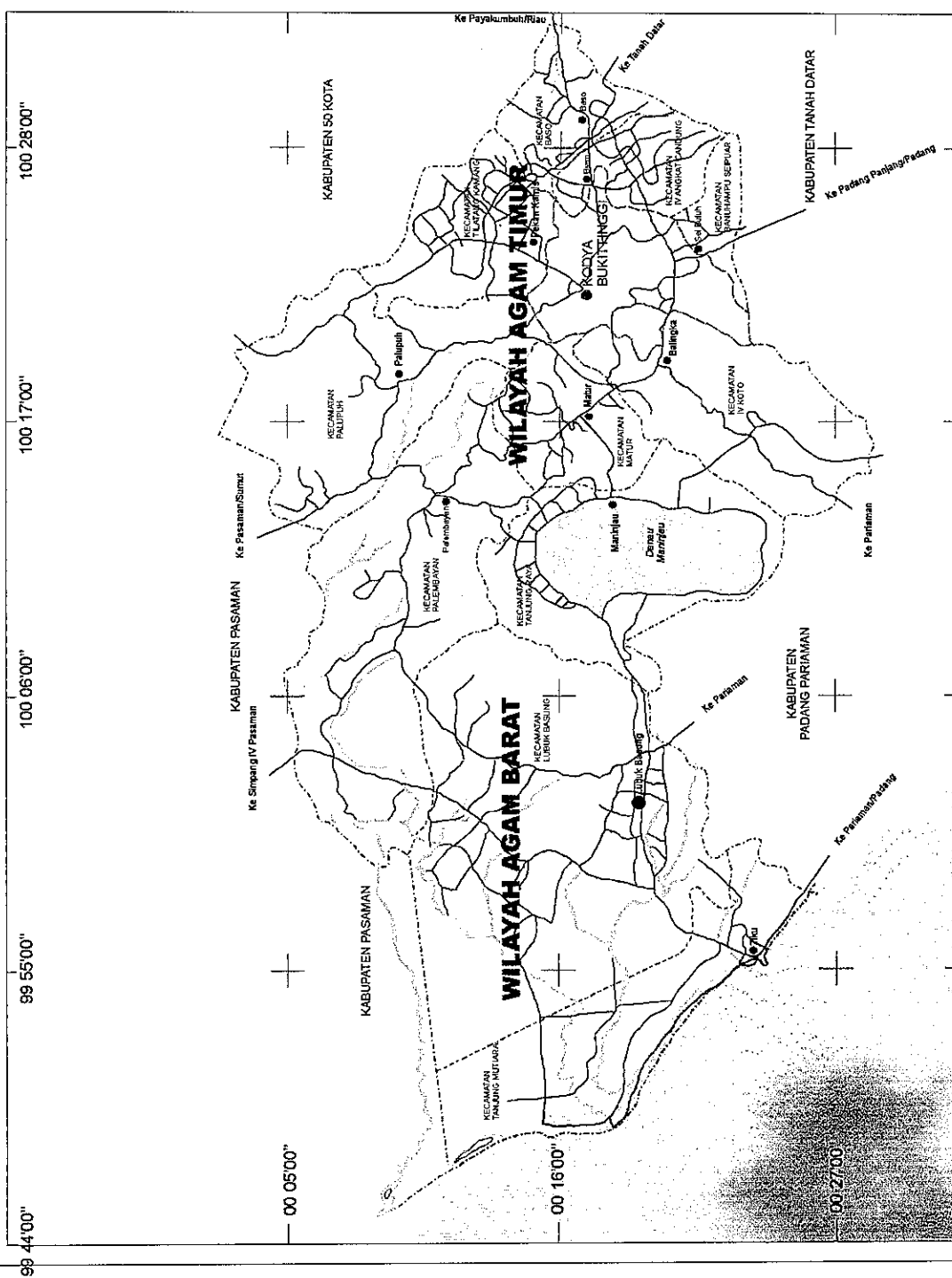
SKALA 1 : 500.000  
0 5 10 15 Km



**NOMOR**

Halaman 117  
Gambar 1-3

SUMBER : BAPPEDA KABUPATEN AGAM, 2002  
SK DPRD TINGKAT II KABUPATEN AGAM  
No. 03/SP-DPRD/Ag-1995



# KABUPATEN AGAM

**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSAMBANGAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN AGAM

**PETA PENGGUNAAN LAHAN DENGAN  
KESESUAIAN TANAMAN**

KETERANGAN :

- IBU KOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KOTAMADYA
- IBUKOTA KECAMATAN
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- JARINGAN JALAN
- SUNGAI
- DANAU
- WKU I AGAM BARAT
- WKU II AGAM BARAT
- WKU I AGAM TIMUR
- WKU II AGAM TIMUR
- WKU III AGAM TIMUR

**INSERT**



**SKALA**

SKALA 1 : 500.000  
0 5 10 15 km



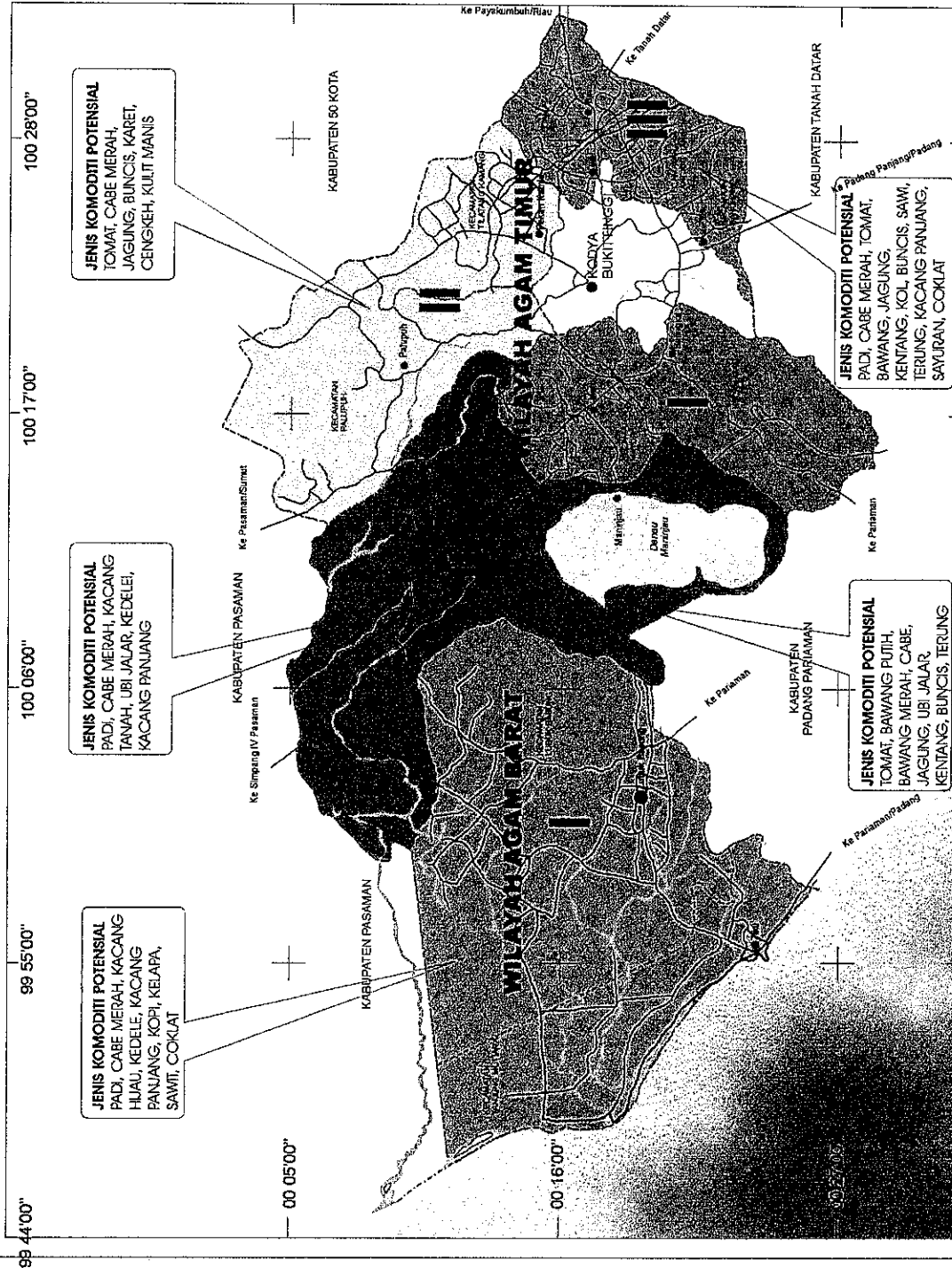
**NOMOR**

Halaman

Gambar

SUMBER : BAPPEDA KABUPATEN AGAM, 2002

SK DPRD TINGKAT II KABUPATEN AGAM  
No. 03/SP-DPRD/Agam-1995



# KABUPATEN AGAM

### 4.2.3 Analisis Ekonomi dan Sosial

Analisis sosial dan ekonomi lebih dititikberatkan kepada analisis kelengkapan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi yang ada di Kabupaten Agam sehingga dapat diketahui kelengkapannya sesuai kebutuhan penduduk

#### *a. Analisis kelengkapan fasilitas ekonomi*

Kelengkapan fasilitas perekonomian akan ikut menentukan lokasi suatu pusat pengembangan karena kelengkapan fasilitas ekonomi ini akan lebih menarik penduduk dalam memenuhi kebutuhannya. Yang dimaksud dengan fasilitas di sini adalah toko-toko, warung-warung dan pasar-pasar.

Adapun penilaian kelengkapan fasilitas tersebut melalui penilaian keanekaragaman jenis fasilitas perekonomian yang dipunyai masing-masing kecamatan (data dan perhitungan pada Lampiran C). Hasil pengelompokannya dapat dilihat dari Tabel IV.2.

#### *b. Analisis kelengkapan fasilitas sosial*

Begitu juga dengan fasilitas sosial, cara penilaiannya sama dengan penilaian untuk fasilitas perekonomian. Adapun jenis fasilitas yang diamati adalah fasilitas pendidikan, kesehatan dan rekreasi. Hasil penilaian dapat dilihat pada Tabel IV.2 (data dan perhitungan pada Lampiran C).

#### *c. Analisis skalogram*

Kelengkapan fasilitas sosial dan perekonomian akan menentukan lokasi yang menjadi pusat pengembangan, karena kelengkapan fasilitas ini akan lebih menarik penduduk dalam memenuhi kebutuhannya. Analisis Skalogram digunakan untuk mengetahui kelengkapan jenis fasilitas pelayanan

**TABEL IV.2**  
**TINGKAT KETERPUSATAN, DAYA HUBUNG,**  
**KELENGKAPAN FASILITAS EKONOMI DAN FASILITAS SOSIAL**  
**DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2003**

NO	KECAMATAN	Tingkat Keterpusatan	Daya Hubung	Fasilitas Ekonomi	Fasilitas Sosial	Kesimpulan
1	Tanjung Mutiara	*	*	*	*	*
2	Lubuk Basung	***	***	***	***	***
3	Tanjung Raya	**	**	**	***	**
4	Matur	*	*	*	*	*
5	IV Koto	**	**	***	**	**
6	Banuhampu Sei Puar	***	***	***	***	***
7	IV Angkat Candung	***	***	***	***	***
8	Baso	**	***	**	**	**
9	Tilatang Kamang	***	***	***	***	***
10	Palembayan	**	**	**	**	**
11	Palupuh	**	***	*	*	*

*Sumber : Hasil Analisis*

*Keterangan :*

\* = Rendah

\*\* = Sedang

\*\*\* = Tinggi

di Kabupaten Agam. Metoda ini menggunakan matrik data dasar yang berisikan variabel-variabel fasilitas. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih realisistis, dalam analisis ini dapat dimasukkan variabel lain berupa jumlah penduduk, dan aksesibilitas dari wilayah yang diteliti ataupun dengan memasukkan variabel rencana kebijakan pemerintah. Hasil penilaian serta data-data mengenai skalogram ini dapat dilihat pada Lampiran D.

Dari hasil analisis skalogram terlihat daerah-daerah yang dapat dijadikan pusat-pusat pengembangan terletak di wilayah Agam Timur karena mempunyai kelengkapan fasilitas pendukung kegiatan yang menjadi daya tarik penduduk untuk berusaha maupun bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Tiga kecamatan dari enam kecamatan yang ada di wilayah Agam Timur yang dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan (Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, Kecamatan IV Angkat Candung dan Kecamatan Tilatang Kamang). Sedangkan di wilayah Agam Barat, hanya Kecamatan Lubuk Basung saja yang bisa dijadikan pusat pengembangan pada saat ini.

#### **4.2.4 Analisis Sejarah dan Budaya**

Analisis sejarah dan budaya, dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan latar belakang sejarah, adat istiadat (budaya) serta cara hidup masyarakat Agam Barat dan Agam Timur. Analisis ini dilakukan berdasarkan studi literature, observasi langsung ke lapangan, serta wawancara dengan tokoh masyarakat terutama dengan pemuka-pemuka adat pengurus Lembaga Kerapatan Adat Nagari Minangkabau (LKANM) yang ada di Kabupaten Agam.

Latar belakang sejarah Agam Barat dan Agam Timur yang berbeda menjadikan adat istiadat dan cara hidup yang berbeda pula. Hal ini juga menyebabkan perbedaan pola pikir dan orientasi ke masa depan dari kedua wilayah ini. Masyarakat wilayah Agam Barat yang masih memegang adat pesisiran dan kurang memperhatikan pendidikan, mempunyai pola pikir yang lebih sederhana untuk pengembangan diri, masyarakat dan daerahnya di masa depan, dibandingkan dengan masyarakat Agam Timur yang lebih mementingkan agama dan pendidikan sehingga mempunyai berorientasi dan pola pikir jauh lebih maju tentang pengembangan diri, masyarakat dan wilayahnya di masa datang.

Pembangunan yang dilakukan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak lebih mudah dilakukan di Agam Timur karena keterbukaan masyarakat dan keinginan untuk maju telah tertanam sejak dulu. Tanah ulayat dengan mudah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk umum tanpa prosedur yang sulit dan berbelit-belit dari ulayat (kaum/suku) pemilik tanah. Sedangkan di wilayah Agam Barat yang masih berpatokan bahwa tanah adalah simbol atau patokan terhadap keberadaan suatu kaum, sangat sulit untuk memberikan pengertian kepada masyarakatnya agar mau memberikan ataupun melepas hak atas tanah (dengan kompensasi ganti rugi) agar dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan umum.

#### **4.2.5 Analisis Kelembagaan**

##### *a. Analisis kebijakan pembangunan*

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Agam pada saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Kabupaten Agam Tahun 2001 – 2005. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk masa lima tahun ke depan yaitu 2001 – 2005 (Pemda Kabupaten Agam, 2002).

Analisis kebijakan pembangunan ini juga akan dilihat dengan menggunakan metoda AHP (*Analytical Hierarchy Process*), yang merupakan salah satu metoda analisis untuk membuat keputusan dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahannya (Saaty, 1993). Dalam



penelitian ini, AHP digunakan untuk mempertimbangkan pendapat beberapa pihak pengambil keputusan di Kabupaten Agam. Hasil analisis dan perhitungan AHP ini dapat dilihat pada Lampiran E.

*b. Analisis keuangan*

Analisis keuangan yang dilakukan disini hanya untuk melihat perbandingan pembiayaan proyek-proyek yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Agam terutama proyek-proyek fisik (dari Dinas PU) pada wilayah Agam Barat dan Agam Timur. Untuk lebih jelasnya, data dan perhitungan dapat dilihat pada Lampiran F.

Tahun 2000, proyek fisik yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam berjumlah 18 proyek. Dilihat dari segi jumlah, proyek yang dilaksanakan di wilayah Agam Timur (10 proyek) lebih banyak dari yang dilaksanakan di wilayah Agam Barat (8 proyek). Pendanaan proyek hampir berimbang untuk kedua wilayah, namun wilayah Agam Barat memperoleh porsi yang sedikit lebih banyak (Rp. 1.148.772.000,00 atau 50,59%) dari pada dana proyek yang diperoleh Agam Timur (Rp. 1.121.827.000,00 atau 49,41%). Pada tahun 2003, terjadi kenaikan yang cukup besar pada proyek fisik yang dilaksanakan di Kabupaten Agam yaitu sebanyak 84 proyek. Dari jumlah ini, wilayah Agam Timur dilaksanakan 60 proyek (71,43%) dengan dana Rp. 19.924.180.380,00 (72,67%) dan di wilayah Agam Barat dilaksanakan 24 proyek (28,57%) dengan dana sebesar Rp. 7.493.162.015,00 (27,33%). Lebih jelasnya, perbandingan jumlah proyek serta pendanaannya di Kabupaten Agam, dapat dilihat pada Tabel IV.3 dibawah ini.

**TABEL. IV.3**  
**PERBANDINGAN JUMLAH PROYEK FISIK DAN JUMLAH DANA PROYEK**  
**DI KABUPATEN AGAM**  
**TAHUN 2000 – 2003**

NO	Tahun	Agam Barat				Agam Timur			
		Proyek	Persen (%)	Dana	Persen (%)	Proyek	Persen (%)	Dana	Persen (%)
1	2000	8	44.44	1,148,772,000.00	50.59	10	55.56	1,121,827,000.00	49.41
2	2001	54	42.86	12,684,758,407.00	43.49	72	57.14	16,485,072,275.96	56.51
3	2002	23	35.38	13,643,053,340.00	58.49	42	64.62	9,682,589,227.00	41.51
4	2003	24	28.57	7,493,162,015.00	27.33	60	71.43	19,924,180,380.00	72.67

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil analisis, tampak jelas bahwa pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kabupaten Agam pada tiga tahun terakhir (2000 – 2002) berimbang antara wilayah Agam Barat dan Agam Timur. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Agam sudah mengarah pada pelaksanaan pembangunan wilayah yang berimbang. Akan tetapi pada tahun terakhir (2003) terjadi lonjakan pembangunan fisik yang sangat besar di wilayah Timur (72,67%) dibandingkan dengan wilayah Barat (28,57%). Pelaksanaan pembangunan yang lebih mengarah pada wilayah Agam Timur di tahun 2003 ini lebih disebabkan karena banyaknya kendala atau permasalahan pembangunan yang terdapat di wilayah Agam Barat, sehingga proyek-proyek pembangunan dialihkan ke wilayah Agam Timur karena dana proyek yang diusulkan (ke Pemerintah Pusat) telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Agam.

c. *Analisis implementasi pembangunan*

Analisis Implementasi pembangunan dilakukan untuk melihat sejauh mana proyek-proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan di Kabupaten Agam

(terutama oleh Dinas Pekerjaan Umum) dapat menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk daerah-daerah dengan tingkat aksesibilitas dan tingkat keterpusatan yang masih rendah. Untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan ini, dilakukan analisis kualitatif dengan membandingkan pelaksanaan proyek-proyek oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam dari tahun 2000 – 2003. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel IV.3 (data-data pada Lampiran F).

Dari hasil analisis, pembangunan di wilayah Agam Barat pada tahun 2000, 50% dilakukan di Kecamatan Lubuk Basung, 30% di Kecamatan Tanjung Mutiara dan 20% di Kecamatan Matur. Sedangkan dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Tanjung Raya sama sekali tidak memperoleh bagian pembangun fisik. Tahun 2001 dan 2002, pelaksanaan pembangunan sudah mulai menyebar di semua kecamatan yang ada, walaupun masih didominasi oleh Kecamatan Lubuk Basung sebesar 33,33% tahun 2001 dan 29,63% untuk tahun 2002. Sedangkan tahun 2003, kembali 50% pembangunan fisik di wilayah Agam Barat dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Basung. Lebih jelasnya, persentase pelaksanaan pembangunan di wilayah Agam Barat ini dapat dilihat pada Tabel IV.4.

Untuk wilayah Agam Timur, pelaksanaan pembangunan lebih merata di setiap kecamatan dibandingkan di wilayah Agam Barat. Pembangunan di Agam Timur dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kecamatan sehingga hampir tidak ada dominasi yang mencolok dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing kecamatan tersebut. Persentase

pelaksanaan pembangunan di wilayah Agam Timur dapat dilihat pada Tabel IV.5 berikut ini.

**TABEL. IV.4**  
**PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**  
**DI WILAYAH AGAM BARAT – KABUPATEN AGAM**  
**TAHUN 2000 – 2003**

NO	Kecamatan :	2000	2001	2002	2003
1	Tanjung Raya	0,00 %	7,58 %	18,52 %	19,23 %
2	Lubuk Basung	50,00 %	33,33 %	29,63 %	50,00 %
3	Tanjung Mutiara	30,00 %	19,70 %	22,22 %	15,38 %
4	Palembayan	0,00 %	24,24 %	14,81 %	7,69 %
5	Matur	20,00 %	15,15 %	14,81 %	7,69 %

*Sumber : Hasil Analisis*

**TABEL. IV.5**  
**PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**  
**DI WILAYAH AGAM TIMUR – KABUPATEN AGAM**  
**TAHUN 2000 – 2003**

NO	Kecamatan	2000	2001	2002	2003
1	IV Koto	12,50 %	26,98 %	5,26 %	5,17 %
2	Banuhampu Sei. Puar	0,00 %	12,70 %	21,05 %	17,24 %
3	IV Angkat Candung	37,50 %	19,05 %	36,84 %	36,21 %
4	Baso	0,00 %	6,35 %	15,79 %	13,79 %
5	Tilalang Kamang	12,50 %	15,80 %	13,16 %	22,41 %
6	Palembayan	37,50 %	19,05%	7,89 %	5,17 %

*Sumber : Hasil Analisis*

#### 4.3 Analisis Potensi Sumberdaya Kabupaten Agam

Potensi sumberdaya yang ada di Kabupaten Agam lebih banyak merupakan potensi sumberdaya alam berupa lahan yang subur untuk pertanian dan perkebunan, perairan yang luas (danau dan laut) yang potensial untuk perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut. Potensi sumber daya alam

terutama lahan, telah di analisis pada sub bab sebelumnya (analisis fisik alam) dengan menggunakan metode over lay yang menghasilkan penggunaan lahan dan kesesuaian tanaman di wilayah Kabupaten Agam.

Disamping sumberdaya alam, letak geografis yang berada pada posisi lintas memberikan aksesibilitas yang sangat menunjang keberadaan Kabupaten Agam bagi daerah-daerah sekitarnya (perhitungan dan hasil analisis pada Lampiran A). Usaha kecil dan menengah yang sudah ada sejak turun temurun (tenunan songket, bordiran, konveksi dan kerajinan perak) juga merupakan potensi yang cukup baik karena selama ini sudah mampu menembus pasar ekspor (Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam dan Hongkong) untuk dikembangkan agar mampu bersaing dengan dengan produk sejenis dari daerah lain.

#### **4.4 Analisis Kebijakan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Agam**

Analisis kebijakan pembangunan untuk wilayah Kabupaten Agam meliputi kebijakan, keuangan dan implementasi pembangunan. Analisis kebijakan ini masing-masing sebelumnya telah dilaksanakan pada sub bab 4.2.5 (tentang Analisis Kelembagaan). Hasil dari Analisis Kebijakan ini juga telah terdapat pada Tabel IV.3, IV.4, dan IV.5.

#### **4.5 Analisis Ketidakseimbangan Pengembangan di Wilayah Kabupaten Agam**

Analisis ketidakseimbangan pengembangan di Kabupaten Agam ini lebih pada sintesa dari hasil-hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis ini dilakukan secara kualitatif untuk melihat keterkaitan faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan pengembangan di Kabupaten Agam antara satu dengan yang

lainnya yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebelumnya untuk mengetahui apakah faktor yang satu dengan yang lainnya akan saling mempengaruhi. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel IV.6.

**TABEL IV.6**  
**KETERKAITAN ANTAR FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB**  
**KETIDAKSEIMBANGAN PENGEMBANGAN WILAYAH**  
**DI KABUPATEN AGAM**

Faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan	Infrastruktur	Fisik Alam	Fasilitas ekonomi dan sosial	Sejarah dan Budaya	Kelembagaan
Infrastruktur	X	X	X	V	V
Fisik Alam	X	X	X	X	X
Fasilitas ekonomi dan sosial	V	X	X	V	V
Sejarah dan Budaya	X	V	X	X	X
Kelembagaan	X	X	X	X	X

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

v = ada hubungan saling mempengaruhi

x = tidak ada hubungan saling mempengaruhi

Hasil analisis memperlihatkan bahwa keterkaitan dan saling mempengaruhi ketidakseimbangan pengembangan di wilayah Kabupaten tidak terjadi pada semua faktor-faktor penyebab yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebelumnya. Faktor infrastruktur, berpengaruh terhadap fasilitas sosial ekonomi yang ada di wilayah ini. Begitu juga faktor fisik alam, berpengaruh terhadap sejarah dan budaya masyarakat di Kabupaten Agam. Sedangkan faktor sejarah dan budaya sendiri, mempengaruhi pengadaan infrastruktur dan fasilitas ekonomi dan sosial. Dan yang juga tak kalah penting pengaruhnya adalah faktor kelembagaan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta fasilitas ekonomi dan

sosial karena sangat terkait akan kebijakan, keuangan dan implementasi pembangunan untuk wilayah Kabupaten Agam.

Keterkaitan dari masing-masing penyebab ketidakseimbangan pengembangan wilayah di Kabupaten Agam ini dianalisis lagi secara kualitatif dengan hasil sebagai berikut:

a. Fisik alam mempengaruhi sejarah dan budaya

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa fisik alam terutama topografi, sangat mempengaruhi sejarah dan budaya masyarakat di Kabupaten Agam yang juga menjadi salah satu penyebab ketidakseimbangan pengembangan yang terjadi antara wilayah Agam Barat dengan Agam Timur.

b. Sejarah dan budaya mempengaruhi penyediaan infrastruktur, fasilitas ekonomi dan sosial

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk umum dipengaruhi oleh sejarah dan budaya masyarakat. Di wilayah Agam Timur yang masyarakatnya sudah mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dan pola pikir yang lebih maju dari masyarakat Agam Barat, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya berlangsung tanpa prosedur yang sulit dan berbelit-belit dari ulayat (kaum/suku) pemilik tanah. Sedangkan di wilayah Agam Barat yang masih berpatokan bahwa tanah adalah simbol atau patokan terhadap keberadaan suatu kaum, sangat sulit untuk memberikan pengertian kepada masyarakatnya agar mau memberikan ataupun melepas hak atas tanah (dengan kompensasi ganti rugi) agar dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan umum.

- c. Kelembagaan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, fasilitas ekonomi dan sosial

Kelembagaan dalam hal ini pemerintah daerah, memang sangat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur serta fasilitas ekonomi dan sosial karena hal ini akan terkait dengan kebijakan, keuangan dan implementasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Agam. Kebijakan dan implementasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Agam pada saat ini, terkesan masih berpihak pada wilayah Agam Timur.

- d. Infrastruktur berpengaruh terhadap fasilitas ekonomi dan sosial

Infrastruktur yang menjadi penentu utama aksesibilitas dan sentralitas suatu daerah, sangat berpengaruh terhadap pengadaan fasilitas ekonomi dan sosial yang akan menunjang kegiatan perekonomian dan sosial di daerah tersebut. Di wilayah Kabupaten Agam, infrastruktur yang lebih baik terdapat di wilayah Agam Timur dan ini menjadikan aksesibilitas serta sentralitas wilayah Agam Timur lebih tinggi dibandingkan dengan Agam Barat. Aksesibilitas yang tinggi ini juga mempengaruhi penyediaan fasilitas ekonomi dan sosial yang lebih banyak karena lebih cepat dijangkau oleh masyarakat dengan jarak dan waktu tempuh yang relatif singkat.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis, penulis merujuk kembali pada landasan teori yang ada pada Bab II untuk melihat apakah analisis yang dilakukan menghasilkan temuan-temuan yang sesuai dengan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan teori-teori dikotomi dalam perencanaan, dikotomi yang terjadi di Kabupaten Agam (Dikotomi Agam Timur - Agam Barat) menyangkut pada hampir semua teori dikotomi yang ada.

Dikotomi pertumbuhan vs kesejahteraan terdapat di wilayah Kabupaten Agam karena terjadi penekanan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan, membuat pemerintah cenderung melakukan pendistribusian pendapatan dalam jangka pendek. Bukti dari dikotomi ini adalah terjadinya gap kesejahteraan antara daerah yang berkembang/maju (yang dalam hal ini Agam Timur) dengan daerah yang tidak berkembang (Agam Barat) yang terlihat dengan jelas pada pelaksanaan pembangunan yang cenderung dilaksanakan lebih banyak di wilayah Agam Timur. Dikotomi ini tampaknya merupakan sebuah pemaksaan komitmen dari satu posisi ke posisi lainnya terutama kebijakan dan program-program yang dilakukan pemerintah. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa kebijakan yang diterapkan bukanlah suatu pilihan antara pertumbuhan dan kesejahteraan, melainkan seberapa efektif dapat menstimulasi tantangan transformasi ekonomi di wilayah-wilayah pembangun.

Teori dikotomi lainnya tentang ketidakseimbangan vs keseimbangan serta dikotomi pemusatan vs penyebaran juga terjadi di wilayah ini. Namun teori-teori dikotomi yang ada, lebih cenderung memandang suatu permasalahan berdasarkan pada kebijakan-kebijakan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah.

Yang menarik untuk wilayah Kabupaten Agam, selain hal-hal yang terjadi seperti yang terdapat dalam teori-teori dikotomi, ada dikotomi lain yang terjadi secara alamiah yang menjadikan ketidakseimbangan di wilayah ini. Dikotomi Barat – Timur yang terjadi di Kabupaten Agam, bukan hanya menunjukkan pembagian wilayah, tetapi secara alamiah hal ini menunjukkan keadaan fisik serta sejarah dan budaya. Perbedaan fisik alamiah antara Agam Timur dengan Agam Barat serta perbedaan sejarah dan budaya seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Selanjutnya, ketidakseimbangan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Agam tidak hanya disebabkan oleh keadaan fisik dan sejarah budaya saja. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lain yang menjadi penyebab ketidakseimbangan pengembangan di wilayah Kabupaten Agam walaupun tidak semua faktor saling berkait atau saling mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang saling mempengaruhi adalah sebagai berikut :

- ❖ Fisik alam mempengaruhi sejarah dan budaya
- ❖ Sejarah dan budaya mempengaruhi penyediaan infrastruktur, fasilitas ekonomi dan sosial
- ❖ Kelembagaan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, fasilitas ekonomi dan sosial
- ❖ Infrastruktur berpengaruh terhadap fasilitas ekonomi dan sosial

Berdasarkan hasil analisis dan sintesa dari teori dikotomi yang digunakan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada ketidakseimbangan perkembangan Kabupaten Agam, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor fisik alam, sejarah dan budaya menjadi faktor yang sangat dominan disamping faktor infrastruktur, fasilitas ekonomi dan sosial, serta kelembagaan yang mempengaruhi ketidakseimbangan perkembangan Kabupaten Agam.
2. Dikotomi Wilayah Barat – Timur yang terjadi di Kabupaten Agam merupakan suatu kenyataan dan hal yang spesifik karena lebih banyak disebabkan oleh faktor fisik alam dan sejarah budaya yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya terutama kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, bukan hanya isu, desas-desus ataupun omongan kosong belaka dari sekelompok orang atau masyarakat yang selama ini dianggap kurang berkenan dengan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Agam yang lebih berpihak pada satu wilayah saja (Agam Timur) sangat berkaitan

erat dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakseimbangan pengembangan pembangunan yang terjadi di wilayah Agam Barat dan wilayah Agam Timur.

## 5.2 Rekomendasi

Ketidakseimbangan perkembangan Kabupaten Agam yang terjadi karena adanya dikotomi wilayah Agam Barat – Timur membutuhkan penanganan yang tepat sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ketidakseimbangan perkembangan ini apabila dilakukan dengan terburu-buru akan menghasilkan keadaan yang dapat memicu isu-isu perpecahan atau pemisahan yang telah berkembang di masyarakat pada saat ini.

Beberapa saran atau rekomendasi yang dapat penulis sampaikan pada saat ini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Agam hendaknya cepat tanggap terhadap isu-isu pembangunan yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga dikotomi wilayah Barat – Timur yang terjadi di wilayah ini tidak semakin memperlebar gap ketidakseimbangan perkembangan yang dapat memicu perpecahan atau pemisahan, akan tetapi dapat menjadi faktor pendukung pembangunan yang spesifik dan menjadi ciri khas daerah yang membedakannya dengan daerah lain.
2. Kebijakan tentang pemerataan pembangunan hendaknya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Agam dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya masing-masing wilayah baik sumber daya alam maupun sumber

daya manusianya, agar dapat mendukung perkembangan pembangunan di wilayah Agam Barat dan wilayah Agam Timur.

3. Hendaknya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Agam dapat diminimalisir dan dijadikan faktor pendukung untuk perkembangan wilayah ini di masa datang.
4. Wilayah Kabupaten Agam masih membutuhkan pusat-pusat pengembangan untuk mengembangkan daerah-daerah yang jauh dari pusat terutama untuk daerah Agam Barat karena pada saat ini hanya Lubuk Basung sebagai Ibukota Kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pengembangan di wilayah Agam Barat.
5. Untuk strategi pengembangan wilayah Kabupaten Agam ke depan, hendaknya dilakukan dengan mengoptimalkan pusat-pusat pertumbuhan di masing-masing wilayah (Agam Barat dan Agam Timur) dengan orientasi secara eksternal dan internal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.1.
6. Dikotomi yang terjadi di Kabupaten Agam merupakan dikotomi yang spesifik (disebabkan fisik alam/geografis dan sejah budaya) yang belum tersentuh oleh teori-teori dikotomi yang telah ada sebelumnya, hendaknya dapat dijadikan kajian lebih lanjut sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu perencanaan pembangunan wilayah.

**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG - 2004**

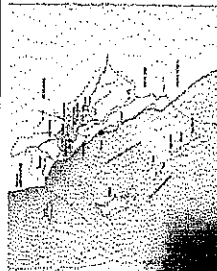
**DIKOTOMI WILAYAH BARAT - TIMUR  
DAN KETIDAKSEIMBANGAN PERKEMBANGAN  
KABUPATEN AGAM**

**PETA STRATEGI PENGEMBANGAN**

**KETERANGAN :**

- IBU KOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KOTAMADYA
- IBUKOTA KECAMATAN
- ▭ BATAS KABUPATEN
- ▭ BATAS KECAMATAN
- ▭ JARINGAN JALAN
- ▭ SUNGAI
- ▭ DANAU
- ↑ ORIENTASI EXTERNAL
- ↑ ORIENTASI INTERNAL
- ↑ ARAH PENGEMBANGAN

**INSERT**



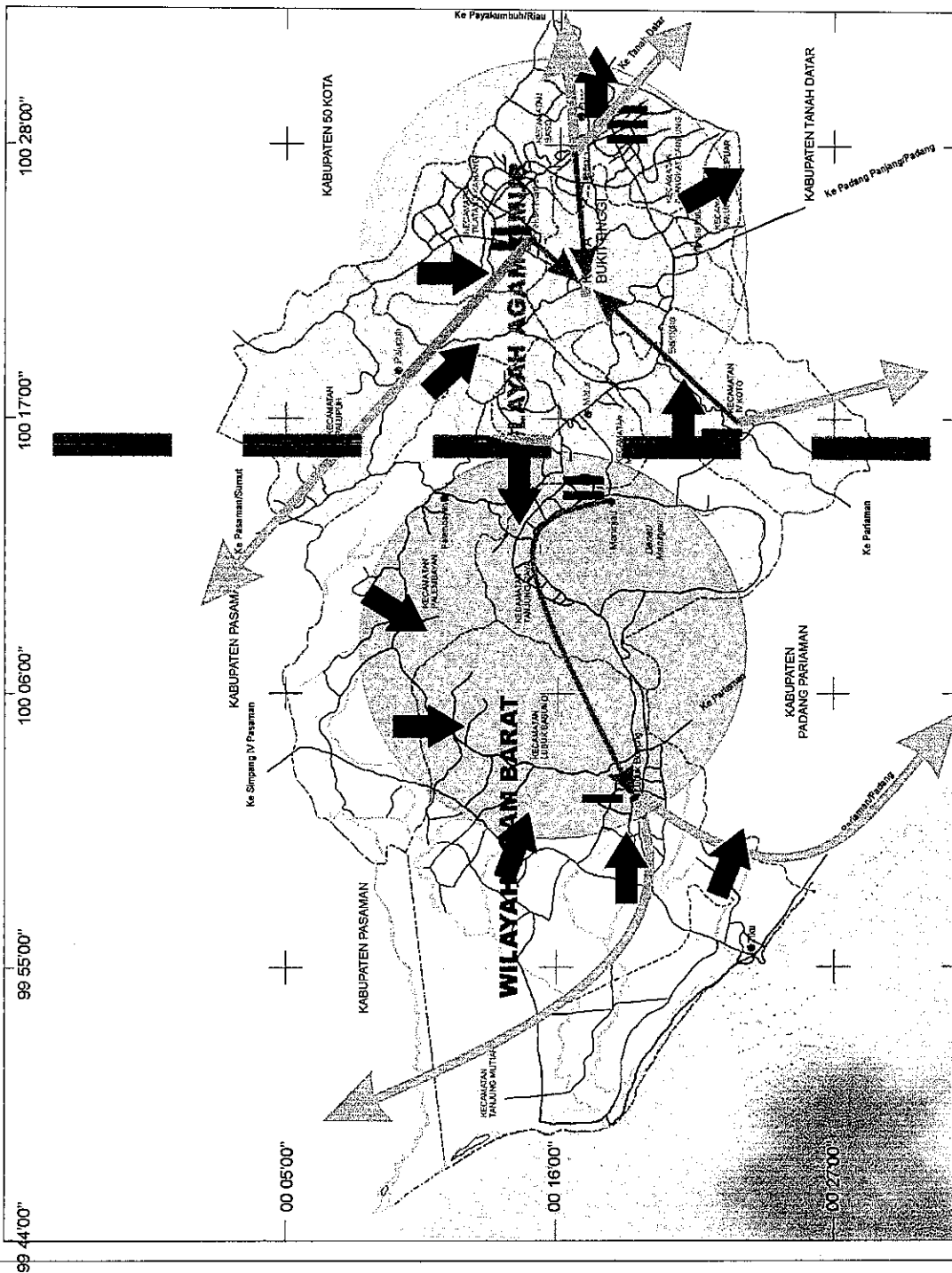
**SKALA**



**NOMOR**

Halaman: 137  
Gambar: 3.1

SUMBER : BAPPEDA KABUPATEN AGAM, 2002  
SK DPRD TINGKAT II KABUPATEN AGAM  
No. 03/SP-DPRD/Aggs-1995



# KABUPATEN AGAM

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A. A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiri Press, Jakarta, 1984.
- Alkadri et al, *Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah*, Direktorat Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, 1999.
- Ardani, A, *Kriteria Penentuan Sektor-Sektor Strategis*, P4N UGM, Yogyakarta, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bingham, Richard D and Robert Mier Ed. *Theories of Local Economic Development, Perspective From Across the Disciplines*, SAGE Publications, New Bury Park, 1993.
- Bintarto, R dan Surastopo Hadisumarno, *Metode Analisa Geografi*, LP3ES, Yogyakarta, 1978.
- Bintarto, *Interaksi Desa – Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.
- Blair, John P, *Local Economic Development Analysis and Practice*, Sage Publication Inc., California, 1995.
- Blakely, E.J, *Planning Local Economic Development : Theory and Practice*, Sage Publication, California, 1989.
- Branch, Melville C, *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*, edisi terjemahan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Budiharsono, Sugeng, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Catanese, Anthony J dan James C. Snyder, *Perencanaan Kota*, Edisi Terjemahan, Erlangga, 1996.
- Dobbin, Christine, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah*, Edisi Terjemahan Lilian D. Tedjasudhana, INIS, Jakarta, 1992.

- Dunn William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik – Edisi Kedua*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000
- Friedman, John, *Regional Development, A Case Study of Venezuela*, MIT Press, 1966.
- Friedman, John and Alonso, William, *Regional Policy, Reading in Theory and Application*, MIT Press, 1975.
- Glasson, John, *Pengantar Perencanaan Regional*, Edisi Terjemahan Paul Sihotang, LPFE UI, Jakarta, 1977.
- Green, R.J, *Country Planning, The Future of The Rural Regions*, Manchester University Press, London, 1971.
- Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Ulama di Sumatera Barat*, Uminda, Jakarta, 1984.
- Jayadinata, Johara T, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB Bandung, 1999.
- Kadariah, *Ekonomi Perencanaan*, LPFE UI Jakarta, 1985.
- Leung Hok Lin, *Policy Planning and Evaluation*, Ronald P. Frye and Company, Winnipeg, Canada, 1971.
- M. D. Mansur, et al, *Sedjarah Minangkabau*, Bhratara, Djakarta, 1970.
- Moelong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta, LP3-ES, 1973.
- Myrdal, Gunnar, *Economic Theory In Underdeveloped Regions*, Duckworth London, 1957.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1988.
- Oppenheim, Norbert, *Applied Models in Urban and Regional Analysis*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Parr, John B, *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : A Retrospective View*, Carfax Publishing 1999.
- Perlof, HS, ES Dunn, EE Lampard and RF Muth, *Regions, Resources and Economic Growth*, Resources of The Future Inc. John Hopkins Press, Baltimore 1960.



- Poernomosidhi Hadjisarosa, *Teori dan Strategi Pengembangan Wilayah di Indonesia*, HMP-ITB, Bandung, 1978.
- Richardson, Harry W, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, (edisi terjemahan: Paul Sihotang), LPFE UI, Jakarta, 2001.
- Rondinelli, D, *Applied Methods of Regional Analysis*, Westview Press, Colorado 1985.
- Rusli Amran, *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*, Sinar Harapan, Jakarta, 1981.
- Saaty, Thomas L, *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*, PT Pustaka Binaman Pressindo, 1993.
- Sadono Sukirno, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, LPFE-UI, Jakarta, 1976.
- Sidi Ibrahim Boechari, *Pengaruh Timbal Balik Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau*, Gunung Tiga, Jakarta, 1981.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES Jakarta 1995.
- Tjahjati, B. dan B.S Kusbiantoro, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta. PT Grasindo Jakarta, 1997.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1996.
- Whitby, M.C. et. Al, *Rural Resource Development*, Methuen & Co Ltd, London, 1974.

## **B. BULETIN/TERBITAN BERKALA/STUDI TERBATAS**

- Akil, Syarifuddin, *Konsep Pengembangan Wilayah di Indonesia*, Dirjen Penataan Ruang Departemen Kimpraswil, 2002.
- Anonim, *Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana*, Geo-FMIPA UI, 1989.
- Datoek Soetan Maharadja, *Tambo dan Oendang-oendang Adat Alam Minang Kabau*, Adatrechtundel Bag. V, Jilid XXVII, 1928.

- Hanafiah, HT, *Tata Laksana dan Kelembagaan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan*, Sarasehan Pemantapan Rencana Peraturan Pemerintah Kawasan Perdesaan, Cisarua Bogor, 1996.
- Hendarto, R. Mulyo, *Analisis Potensi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi*, Makalah Diklat Prop. Jawa Tengah, 2001.
- Keilstra, E.B, *Sumatera's Westkust van 1826 – 1832 deel II*, BKI No. 37, 1888.
- Ma'rif, Samsul, *Ekonomi Wilayah dan Kota, Ekonomika dalam Perencanaan Identifikasi Sektor Strategis*, Diktat Kuliah PWK UNDIP Semarang, 2002.
- North, DC, *Location Theory and Regional Economic Growth*, Journal of Political Economy, 1955.
- Santoso, Jo, *Konsep Pengembangan dan Penataan Ruang Wilayah Kota Bercirikan Lokal*, Buletin Tata Ruang Vol. 1 No. 5 Tahun 2000
- Sjafrizal, *Teori Ekonomi Regional : Konsep dan Perkembangannya*, ISEI Sekretariat FE Univ Andalas, Padang, 1983.
- Steinmentz, H. E, *Inlandsche Onderwijs van Overheidwege in de Padangche Bovenlanden voor 1850*, BKI No. 64 hlm 301 – 312, 1924.
- Taufan, Muhammad, *Penerapan Model Analisis Proses Hirarki (AHP) dalam Penentuan Prioritas Usulan Rencana Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar dalam Rapat Koordinasi Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Jawa Barat*, Tesis pada Prog. Magister PWK ITB, Bandung, 1996.
- Widyaningsih, Nikken Setyowati, *Relevansi Preferensi Penduduk terhadap Fasilitas Kota yang Mempengaruhi Faktor Perkembangan Kota*, Planint Journal, Th I/No.2 Juli-Agustus 2001.
- Zulqaiyyim, *Sejarah Kota Bukittinggi (1837 – 1942)*, Tesis pada Prog. Studi Sastra Indonesia dan Jawa Jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, UGM, Yogyakarta, 1996.

### C. BUKU DATA/LAPORAN/PERATURAN

- Agam dalam Angka Tahun 2000*, Kerja Sama Bappeda dan BPS Kabupaten Agam, 2001
- Agam dalam Angka Tahun 2001*, Kerja Sama Bappeda dan BPS Kabupaten Agam, 2002

- Agam dalam Angka Tahun 2002*, Kerja Sama Bappeda dan BPS Kabupaten Agam, 2003
- APBD Kabupaten Agam Tahun 2003*, Pemda Kabupaten Agam, 2003
- Besluit van Gouverneur Generaal, No. 13 tanggal 1 April, 1856*
- Laporan PDRB Kabupaten Agam*, Bappeda Kabupaten Agam, 2000.
- Laporan PDRB Kabupaten Agam*, Bappeda Kabupaten Agam, 2001.
- Laporan Potensi Desa*, Bappeda Kabupaten Agam, 2001
- Laporan Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam*, Disperindag Kabupaten Agam, 2003.
- Laporan Tahunan Persatuan Hotel dan Restaurant Kabupaten Agam*, PHRI Kabupaten Agam, 2003.
- Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Agam Tahun 2001 – 2005*, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, 2002.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1998 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Agam*, Departemen Dalam Negeri, 1998.
- RTRW Kabupaten Agam Tahun 1995/2000*, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, 1995.
- Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2001*, BPS Propinsi Sumatera Barat, 2002